

Volume I Tahun 2012



# UNDUNGGGA

EDISI KHUSUS

## Bangunan Keraton dan Rumah Tradisional Kalimantan



Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala  
Wilayah Kalimantan

Buletin Pelestarian Cagar Budaya

### **Susunan Redaktur Buletin "KUNDUNGA"**

- a. Penanggung Jawab : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Wilayah Kalimantan
- b. Pimpinan Redaksi : Eko Budi Hartono
- c. Editor : Stevanus Reawaru
- d. Lay Out/Grafis : Edi Gunawan, Bayu Cahyoadi Fernado
- e. Sekretariat : Tisna Arif Marifat
- f. Redaktur Pelaksana : Dra. Ririet Surjandarie  
Stevanus Reawaru  
Bayu Cahyoadi Fernado,  
Triza Galih Gumilang  
Azahar Purwanto  
Fithriani Jamaluddin

## Pengantar Redaksi

Bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 2012, untuk pertama kali Balai Pelestarian Cagar Budaya wilayah kerja Kalimantan telah berhasil menerbitkan sebuah buletin yang berjudul Kundungga. Pemilihan nama Kundungga diambil dari sebuah prasasti batu yang berasal dari abad IV, dan lebih dikenal dengan nama Yupa yang ditemukan di Kutai Kartanegara, dalam prasasti Yupa tersebut disebutkan beberapa tokoh yang bernama *Kundungga-Aswawarman-Mulawarman*. Prasasti ini juga menandai masa sejarah di Indonesia yaitu dengan dikenalnya tulisan. Menurut para ahli nama *Kundungga* merupakan nama asli Indonesia, oleh karenanya dalam rangka mengangkat kembali jati diri dan kebanggaan nasional, nama Kundungga kami pilih dan gunakan sebagai nama bulletin Balai Pelestarian Cagar Budaya wilayah Kalimantan.

Penerbitan Buletin Kundungga ini merupakan wujud keprihatinan kami terhadap kondisi kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala di wilayah Kalimantan yang semakin tergesur oleh pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian budaya masyarakat asli. Perubahan ini terlihat dari ekologi, tradisi dan kehidupan sosial masyarakat lokal yang berubah secara signifikan yang diakibatkan oleh perluasan tanaman kebun sawit dan maraknya pertambangan batu bara. Yang jelas terlihat adalah rumah komunal yang menjadi tempat tinggal bersama (rumah Lamin/Batang/Panjang) mulai ditinggalkan. Ketika rumah-rumah ini ditinggalkan, maka sudah dapat dipastikan keterawatannya akan terancam. Demikian pula sejumlah kraton-kraton di masa Islam juga semakin ditinggalkan, bahkan pewarisnya pun sudah tidak mampu lagi membiayai pemeliharaannya. Kekhawatiran inilah yang membuat kami berpacu untuk segera melakukan perekaman data dengan mencoba mengemas dalam tulisan-tulisan singkat agar data-data tersebut tidak hilang dan sekaligus kami berharap bahwa bulletin ini sebagai jembatan penghubung antara kami dengan *stake holder*. Oleh karenanya dalam edisi khusus perdana ini, tema yang menjadi pilihan kami adalah mengangkat tentang beberapa tinggalan bangunan Keraton dan Rumah Tradisional di Kalimantan. Tulisan-tulisan tersebut merupakan hasil kajian terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang telah berjalan.

Terdapat lima karya tulis yang coba kami kaji melalui pendekatan historis dan arkeologis yang mengacu kepada konsep pelestarian pada ketentuan dan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tinggalan bersejarah tersebut adalah Keraton Sadurangas di Paser, Keraton Mulawarman di Kutai Kartanegara, Keraton Kesultanan Pontianak di Pontianak, Rumah Tradisional Bubungan di Martapura Kalimantan Selatan. Analisa terhadap kelima bangunan tersebut mengacu kepada teori kajian budaya yaitu terhadap bentuk, fungsi dan makna bangunan, yang diharapkan mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang pemaknaan terhadap kekinian.

Tulisan ini masih banyak kekurangannya, oleh karenanya saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan ini secara akademik. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buletin ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hingga terbitnya bulletin ini.

**Redaksi**

## **Sambutan**

### **Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wilayah Kalimantan**

Kalimantan adalah pulau dengan daratan yang terluas di Indonesia bahkan pulau terbesar nomor 3 di Dunia setelah Pulau Greenland dan Papua, dilintasi oleh banyak sungai-sungai besar dan kecil yang menjadi penghubung antar wilayah. Keberadaan sungai ini menjadi sangat penting karena pola pemukiman kuno mengikuti bentukan sungai-sungai secara linier hingga jauh kepedalaman. Di sepanjang sungai inilah ditemukan berbagai pola pemukiman kuno yang ditandai dengan rumah-rumah panggung yang linier menghadap sungai. Sehingga tidak mengherankan apabila tinggalan masa prasejarah dan sampai dengan masuknya pengaruh Hindu/Buddha, Islam, Belanda hingga perang dunia kedua banyak ditemukan tidak jauh dari sungai, karena pada masa itu transportasi darat perkembangannya masih terbatas.

Keberadaan situs-situs tersebut kini dalam keadaan terancam, akibat pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak dimbangi dengan melestarikan ekologis yang menjadi sumber kehidupan manusia yaitu tanah, air dan udara. Saat ini hutan di Kalimantan telah kritis, kemudian batu bara dieksploitasi secara besar-besaran, perluasan kebun sawit, yang kemudian juga mempengaruhi pola dan gaya kehidupan masyarakat suku asli yang mendiami didalamnya. Demikian pula tinggalan yang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya mengalami kemunduran secara kualitas dan kuantitas karena mulai ditinggalkan masyarakat pendukungnya ataupun tergusur karena pembangunan yang semakin tumbuh pesat.

Sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dalam bentuk catatan (*preserve by record*), kami menerbitkan sebuah buletin "*Kundungga*" adalah sebuah langkah awal dalam melestarikan cagar budaya yang ada di pulau Kalimantan. Penerbitan ini juga untuk mendukung Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dalam rangka "Memperkuat Kebudayaan Indonesia yang Multikultur, Bermartabat dan menjadi Kebanggaan Masyarakat dan Dunia.

Potensi keragaman cagar budaya yang dimiliki oleh pulau Kalimantan cukup bervariasi, ketika kontak-kontak budaya terjadi muncul budaya-budaya baru yang tumbuh sebagai bagian dari proses pembelajaran dan adaptasi. Secara garis besar etnis asli di Kalimantan terdiri dari 8 etnis besar yaitu; Suku Dayak Ngaju, Suku Dayak Apu Kayan, Dayak Iban dan Heban atau Dayak laut, Dayak Klemantan atau Dayak Datar, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum yang masing-masing juga masih terbagi dalam beberapa sub etnis. Kemudian terdapat juga Suku Melayu dan Suku Banjar yang mendiami kawasan pantai. Etnis-etnis ini memiliki adat dan tradisi yang tidak sama demikian pula karya budaya yang dihasilkan. Keragaman budaya yang unik ini perlu dilestarikan dalam rangka memperkuat jati diri dan kebanggaan nasional.

Dengan demikian kami berharap bahwa kehadiran bulletin ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak untuk mengetahui kegiatan pelestarian yang sudah dan akan dilakukan di wilayah Kalimantan. Yang sekaligus dapat dijadikan sarana pembelajaran dalam rangka pembangunan jatidiri bangsa melalui kearifan lokalnya yang masih dapat dipelajari dari wujud benda-benda budaya yang ditinggalkan maupun yang masih dimanfaatkan.

Akhirnya kepada seluruh staf Balai Pelestarian Cagar Budaya, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas upaya dan kerja kerasnya, sehingga buletin Kundungga ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya wilayah Kalimantan.

Samarinda, 2 Juni 2012

Drs. I Made Kusumajaya M.Si  
NIP. 19590703 198503 1 001

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Sambutan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala	.....	iii
Wilayah Kalimantan		iv
Resume		
Potensi Rumah Adat Tradisional Bubungan Tinggi Sebagai Objek	.....	1
Wisata Sejarah	.....	16
Pemanfaatan dan Pengembangan Bangunan Keraton Sadurangas	.....	31
Potensi Bangunan Keraton Kadriah, Kesultanan Pontianak	.....	46
Keraton Kutai Kartanegara (Museum Mulawarman)	.....	61
Astana Alnursari		

# Potensi Bangunan Keraton Kadariah, Kesultanan Pontianak

## Oleh

### Eko Budi Hartono, SS

### Triza Galih Gumilang, ST

#### 1. Pendahuluan

##### 1.1 Latar Belakang



Lambang Kota Pontianak

Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak, etnis Tionghoa. melafalkan Pontianak dengan sebutan *Kūndiān*, kota ini dilewati oleh garis Khatulistiwa karena dilalui oleh garis lintang nol derajat bumi lokasinya berada di Siantan. Selain itu, Kota Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas, dan Sungai Landak. Kedua sungai yang membelah kota disimbolkan di dalam logo Kota Pontianak.

Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

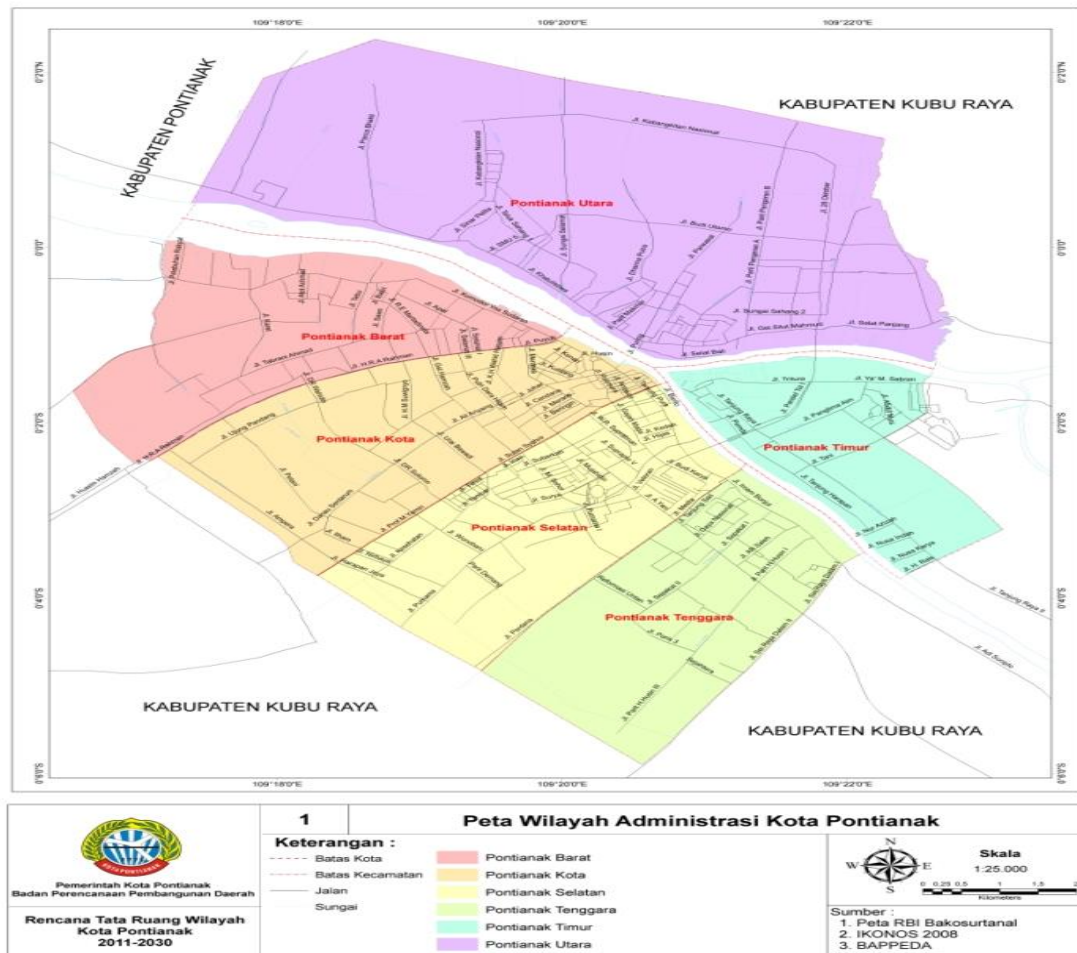
Nama Pontianak dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika beliau menyusuri Sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanan didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting.

Berdasarkan *besluit* Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai *stadsgemeente*. R. Soepardan ditunjuk menjadi *syahkota* atau pemimpin kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads. Hidayat.



Tugu Katulistiwa, Kebanggaan Pontianak

Pembentukan *stadsgemeente* bersifat sementara, maka *Besluit* Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No.



Peta Adminstrasi Kota Pontianak

40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Walikota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib.

Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan *Landschap Gemeente*, ditingkatkan menjadi kota praja Pontianak. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Praja Pontianak diubah dengan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak, kemudian dengan Undang-undang No.5 Tahun 1974, nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah mengubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak, sebutan Kotamadya Pontianak diubah kemudian menjadi Kota Pontianak. Kota Pontianak Dipimpin Oleh Seorang Walikota. Saat Ini Walikota Pontianak Dijabat Oleh H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. Dengan Paryadi, S.Hut. Sebagai Wakilnya.

## 1.2 Tinjauan Geografis dan Faktor Ekologi Kota Pontianak

Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,1 sampai 1,5 meter diatas permukaan laut. Kota dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Dengan demikian Kota Pontianak terbagi atas tiga belahan. Dengan demikian maka kota Pontianak pada dasarnya berada pada kawasan delta sungai. Struktur tanah kota merupakan lapisan tanah gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Lapisan tanah liat baru dicapai pada kedalaman 2,4 meter dari permukaan laut.

Batas-batas wilayah kota ini adalah sebagai berikut:

- ✓ sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
- ✓ sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Siantan, Sungai Ambawang dan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak
- ✓ sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak;
- ✓ sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siantan dan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak.

Keadaan geologi atau struktur tanah di kota Pontianak termasuk ke dalam wilayah penepant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Keadaan ini sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah. Secara



Kondisi Topografis Yang Membuat Sebagian Pemukiman Berada Di Atas Sungai

umum ketinggian tanah di kota Pontianak relatif merendah di tengah kota dan meninggi di pinggiran kota. Menurut keadaan topografi, kota Pontianak terletak di dataran rendah dan dilalui sungai Kapuas dan Sungai Landak yang membentuk delta tepat di wilayah kota (sungai dan parit di kota Pontianak). Dengan ketinggian tanah 1-3 meter di atas permukaan laut dan mempunyai kemiringan lahan melandai ke arah aliran sungai dengan kemiringan rata-rata 0,8-1,5 meter.

Keadaan pasang surut Sungai Kapuas merupakan aspek hidrologis yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap kota Pontianak. Ada dua faktor fisik utama yang berpengaruh terhadap aspek hidrologis ini, yaitu keadaan topografi yang rata-rata rendah di atas permukaan laut dan posisi geografis kota

yang berada pada garis khatulistiwa. Besarnya pengaruh pasang dan curah hujan yang tinggi terutama terjadi pada daerah-daerah pinggiran sungai. Besarnya pengaruh pasang surut ini berkisar antara 1-2 meter.

Berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Supadio Pontianak, keadaan klimatologi kota Pontianak dan sekitarnya dapat dijelaskan sebagai berikut: banyaknya curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar antara 200-350 milimeter per bulan; rata-rata tekanan udara berkisar 1,010-1,012 milibar per bulan; rata-rata penyinaran matahari berkisar antara 40-60 persen per bulan; rata-rata temperatur udara berkisar antara 24-27 derajat Celcius tiap bulan; kecepatan angin rata-rata berkisar antara 4-5 knots.

Besarnya curah hujan di Kota Pontianak berkisar antara 3.000–4.000 mm per tahun. Curah hujan terbesar (bulan basah) jatuh pada bulan Mei dan Oktober, sedangkan curah hujan terkecil (bulan kering) jatuh pada bulan Juli. Jumlah hari hujan rata-rata per bulan berkisar 15 hari. Secara administratif, kota Pontianak dibagi atas enam kecamatan, yaitu Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara, yang kemudian dibagi lagi menjadi 29 kelurahan. (<http://www.pontianakonline.com/pontianak/equatopedia/fisiografi/>, diakses tanggal 12 Mei 2012)

### **1.3 Tinjauan Sosial Budaya Kota Pontianak**

#### **1.3.1 Kependudukan Kota Pontianak**

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, penduduk Kota Pontianak berjumlah 554.764 jiwa, terdiri dari 277.971 (50,1%) laki-laki dan 276.793 (49,9%) perempuan. Suku bangsa penduduk Kota Pontianak terdiri dari Cina (31,2%), Melayu (26,1%), Bugis (13,1%), Jawa (11,7%), Madura (6,4%), Dayak, dan lainnya. Sebagian besar penduduk memeluk agama Islam (75,4%), sisanya memeluk agama Buddha (12%), Katolik (6,1%), Protestan (5%), Konghucu (1,3%), Hindu (0,1%), dan lainnya (0,1%).

Hampir seluruh penduduk Kota Pontianak memahami dan menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Namun bahasa ibu masing-masing juga umum digunakan, antara lain Bahasa Melayu Pontianak, Bahasa Tiociu, Bahasa Khek, dan bahasa daerah lainnya.

#### **1.3.2 Perekonomian Kota Pontianak**

Sebagian besar perekonomian kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Pontianak yang telah terdata selama tahun 2005 adalah 34 perusahaan. Tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri tersebut berjumlah 3.300 orang yang terdiri



Salah Sudut Perekonomian Kota Pontianak

dari pekerja produksi 2.700 orang dan pekerja lainnya atau administrasi 600 orang. Perusahaan industri besar atau sedang yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 2.952 orang.

## 1.4 Nilai- Nilai Arkeologis Keraton Kadriah, Kesultanan Pontianak Sebagai Bangunan Cagar Budaya

### 1.4.1 Nilai Penting Keraton Kadriah

Nilai penting sebuah bangunan cagar budaya adalah apabila sebuah benda yang berasal dari masa lalu dan atau mencerminkan kebudayaan masa lalu masih ada sampai sekarang dan menjadi sebuah dasar bagi kebudayaan dan pembentukan jati diri dan karakter suatu komunitas (dalam hal ini adalah masyarakat dari tingkat paling kecil sampai pada tingkatan kebangsaan).

Pembentukan nilai-nilai budaya dan jati diri komunal ini dalam undang – undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dibagi menjadi 5 bagian yaitu, *nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, agama dan kebudayaan*. Kelima bagian tersebut merupakan dasar-dasar pembentukan nilai-nilai karakter dan jati diri suatu bangsa. Keraton kesultanan Pontianak atau keraton Kadriah adalah sebuah bangunan yang dibangun pada tanggal 23 Oktober 1771 oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie. Sebelum didirikan keraton, tempat yang sekarang dikenal sebagai kota Pontianak tersebut adalah hutan belantara dan kemudian berkembang menjadi kota. Bangunan tersebut terbuat dari kayu ulin/belian dengan sistem pemasangan yang bersifat tradisional tetapi memiliki kekuatan yang kuat dalam konstruksinya.

Dari hal tersebut diatas maka beberapa hal yang masuk dalam kriteria nilai penting pada keraton Kadriah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan bagian dari sejarah awal pendirian kota Pontianak;
2. Awal penyebaran agama Islam di wilayah Pontianak dan sekitarnya;
3. Menjadi studi ilmiah yang penting dalam penggunaan konstruksi kayu dan kaitannya dengan nilai kearifan lokal;
4. Menjadi ikon dan jati diri kebudayaan kota Pontianak dan Kalimantan Barat.

### 1.4.2 Nilai Arkeologis Keraton Kadriah

Ilmu arkeologi adalah ilmu yang mempelajari manusia masa lalu melalui hasil kebudayaan yang ditinggalkannya. Hasil kebudayaan ini berupa tinggalan materi terpakai dan mempunyai hubungan dengan kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Nilai arkeologis sebuah bangunan haruslah memenuhi kriteria yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Undang-undang seperti tersebut diatas merupakan dasar hukum dalam mengelola benda arkeologis sehingga bisa dijadikan sebagai benda budaya yang memiliki payung hukum.

Definisi Bangunan Keraton Kadriah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 1, ayat 1 adalah “*Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan*”.

Sementara itu, kriteria cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya termaktub dalam pasal 5 yaitu :

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasar pada dua hal diatas, maka keraton Kadriah layak untuk dijadikan cagar budaya, karena telah memenuhi unsur-unsur seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, terutama pasal 1 dan pasal 5.

## 2. Kajian Historis Kesultanan Pontianak

### 2.1 Sejarah Kesultanan Pontianak



Keraton Kadriah tampak depan

Kesultanan Kadriah berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H), yaitu pada masa kekuasaan Van Der Varra (1761-1775), Gubernur Jenderal VOC ke-29. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Alkadrie, merupakan putra Habib Husein Alkadrie, ulama penyebar Islam di Pontianak asal Yaman. Sejak usia muda, Syarif Abdurrahman telah menunjukkan bakat dan ambisinya yang sangat besar. Ia pernah melakukan petualangan hingga ke Siak dan Palembang, mengadakan kegiatan perdagangan di Banjarmasin, dan

berperang hingga berhasil menghancurkan kapal Perancis di Pasir (Banjarmasin).

Sejarah awal mula berdirinya kesultanan ini ditandai dengan keinginan Syarif Alkadrie dan saudara-saudaranya beserta para pengikutnya untuk mencari tempat tinggal setelah ayahnya meninggal pada tahun 1184 H di Kerajaan Mempawah. Dengan menggunakan 14 perahu mereka menyusuri Sungai Peniti hingga pada akhirnya mereka menetap di sebuah tanjung bernama Kelapa Tinggi Segedong. Namun, Syarif Alkadrie merasa bahwa tempat tersebut tidak tepat untuk didiami, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan balik ke hulu sungai melalui Sungai Kapuas Kecil. Ketika menyusuri



Masjid Jami' Sultan Abdurachman

sungai tersebut rombongan Syarif Alkadrie menemukan sebuah pulau kecil bernama Batu Layang.



Bendera Kesultanan Pontianak

Menurut *oral story* masyarakat, penentuan tempat berdirinya kesultanan dilakukan dengan cara menembakkan meriam dari mempawah ke arah selatan (Pontianak sekarang). Jatuhnya bola meriam itu yang dijadikan tempat untuk mendirikan kesultanan. Setelah dua kali menembakkan meriam dari mempawah, bola meriam akhirnya jatuh di daerah batu layang yang kemudian dijadikan wilayah untuk menetap. Konon ketika rombongan Syarif Abdurrahman mendirikan masjid di daerah batu layang, rombongan itu diganggu oleh hantu Pontianak/kuntilanak yang menyebabkan Syarif Alkadrie

meminta anggotanya untuk mengusirnya. Setelah berhasil mengusir hantu tersebut, daerah tersebut diberi nama Pontianak.

Pada tanggal 8 bulan Sya'ban tahun 1192 H, Syarif Alkadrie akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak (Kesultanan Kadriah) dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al Habib Alkadrie. Acara penobatan tersebut juga dihadiri oleh Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu, dan Matan. Kesultanan ini merupakan kerajaan paling akhir yang ada di Kalimantan dan sebagai cikal bakal berdirinya Kota Pontianak. Setelah kesultanan Kadriah berakhir, sistem pemerintahan kesultanan secara otomatis berubah menjadi sistem pemerintahan Kota Pontianak.

Kesultanan ini berlangsung selama hampir dua abad, yaitu sejak tahun 1771 hingga tahun 1950. Selama kesultanan ini masih eksis terdapat delapan sultan yang pernah berkuasa. Ketika kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak. (<http://ace-informasibudaya.blogspot.com/2011/02/kesultanan-pontianak.html> diakses tanggal 11 Mei 2012).

Berdasarkan *besluit* Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK menetapkan status Pontianak sebagai *stadsgemeente*. R. Soepardan ditunjuk menjadi *syahkota* atau pemimpin kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads. Hidayat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka status Pontianak yang awalnya berada dibawah kepemimpinan seorang sultan (kesultanan Pontianak) berubah menjadi kota Pontianak.



Lambang Kesultanan Pontianak



Selama masa pemerintahan yang berbentuk kesultanan, sultan yang pernah memimpin adalah sebagai berikut :

1. Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie (1771-1808)
2. Sultan Syarif Kasim Alkadrie (1808-1819)
3. Sultan Syarif Osman Alkadrie (1819-1855)
4. Sultan Syarif Hamid Alkadrie (1855-1872)
5. Sultan Syarif Yusuf Alkadrie (1872-1895)
6. Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (1895-1944)
7. Sultan Syarif Thaha Alkadrie (1944-1945)
8. Sultan Syarif Hamid II Alkadrie (1945-1950)

([http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan\\_Pontianak#Daftar\\_Sultan\\_Pontianak](http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Pontianak#Daftar_Sultan_Pontianak), diakses tanggal 8 Mei 2012)



Pintu gerbang masuk kompleks Keraton Kadriah

Setelah masa Sultan Syarif

Hamid II Alkadrie, kesultanan Pontianak masuk dalam negara kesatuan Indonesia, terjadi masa interregnum (masa peralihan pemerintahan) sampai dengan 15 Januari 2004. Pada tahun 2003 ada upaya untuk menghidupkan kembali kesultanan Pontianak yang tidak berkuasa atas wilayah geografis tetapi berkuasa hanya sebatas pada kekuasaan secara adat dan budaya. Akhirnya pada Januari 2004 terpilih Sultan Syarif Abubakar Alkadrie bin Syarif Mahmud Alkadrie bin Sultan Syarif Muhammad Alkadrie sebagai Sultan di Kesultanan Pontianak.

## 2.2 Garuda Pancasila Dan Sultan Hamid Al Kadrie II

Sampai saat ini tidak banyak yang tahu asal muasal lambing negara kita yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara yang begitu sakral dan penuh dengan arti pada setiap ornamennya ternyata adalah buah pemikiran dari Sultan ke-8 dari kesultanan Pontianak yaitu Sultan Hamid Alkadrie II.

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, yaitu Sultan Hamid Alkadrie II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama menjabat menteri negara tersebut yaitu Sultan Hamid Alkadrie II ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan,



Garuda Rancangan Sultan Hamid II

merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

Pada Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinasi Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.



Garuda lambang Kerajaan Sanggau yang dianggap sebagai inspirasi Sultan Hamid II dalam merancang Konsep Garuda Republik Indonesia

Pada pada proses tersebut terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka

bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang "gundul" menjadi "berjambul" dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan

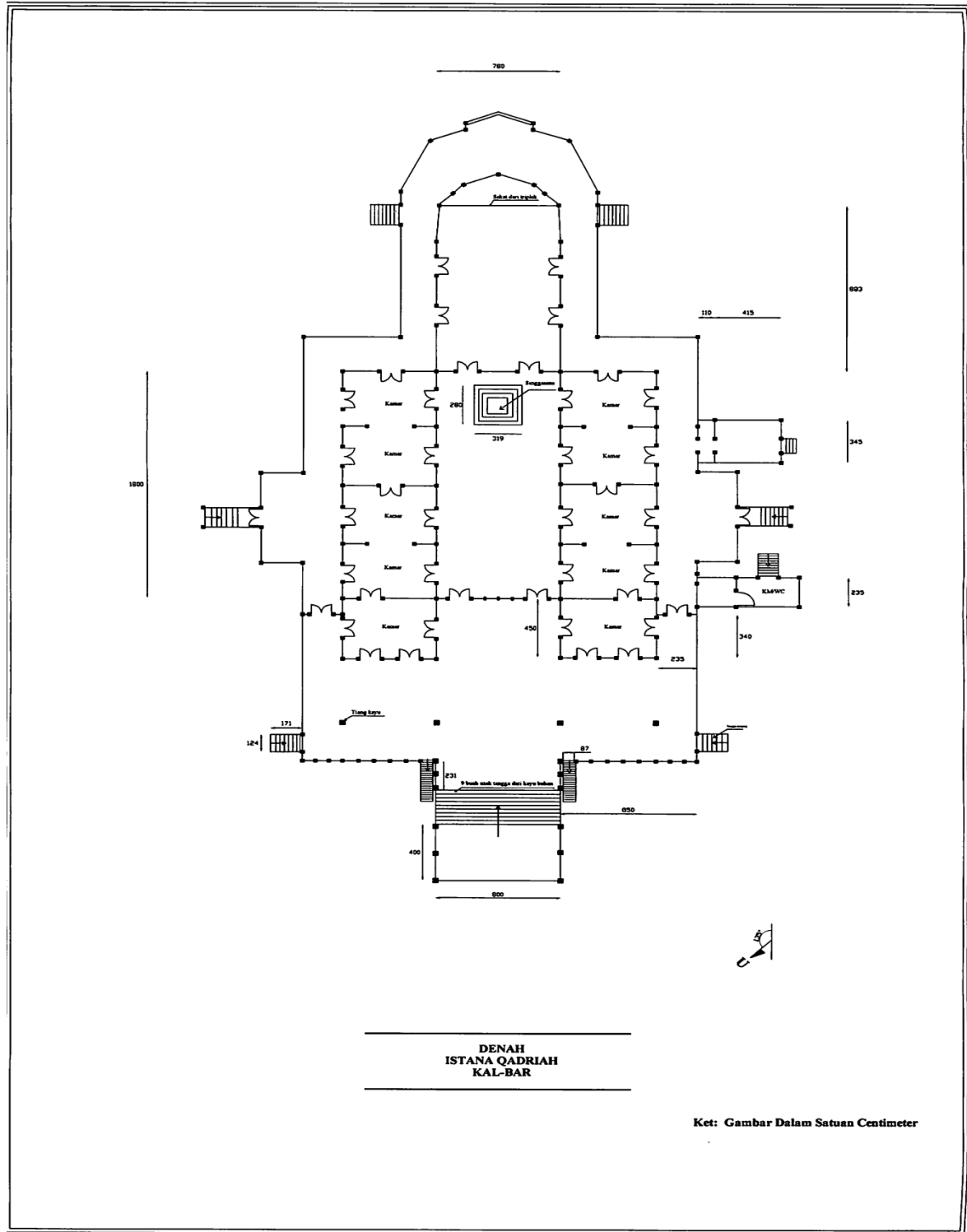


Sultan Hamid Alkadrie II

secara resmi sampai saat ini. ([http://wiant-d-a-fib11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-23326-Sejarah-Perancang Lambang Republik Indonesia.html](http://wiant-d-a-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-23326-Sejarah-Perancang-Lambang-Republik-Indonesia.html), diakses tanggal 11 Mei 2012)

### 2.3 Tinjauan Arsitektural Bangunan Keraton Kadriah Pontianak

*Denah Keraton Kadriah*



Keraton Kadriah adalah sebuah bangunan yang dibangun pada abad 18 oleh Sultan Abdurcahman, seorang keturunan arab yang berasal dari Mempawah. Bangunan ini didirikan setahun setelah pendirian masjid



yang berjarak ±200 m. keraton ini dibangun di tepi sungai Kapuas dengan menggunakan bahan dari kayu Belian atau dikenal juga dengan kayu Ulin. Bahan kayu Belian ini mencakup keseluruhan dari bangunan secara keseluruhan. Baik itu yang berupa papan, balok dan sirap. Sistem pemasangan pun tidak menggunakan unsur logam, tetapi menggunakan pasak kayu.

Ada dua alasan utama kenapa bangunan ini menggunakan kayu Belian, kedua alasan itu adalah :

1. Faktor ketersediaan bahan yang cukup banyak
2. Faktor lahan, yaitu lahan gambut yang membutuhkan bahan yang sanggup untuk mengatasi efek negatif dari lahan gambut. Lahan gambut biasanya sangat basa sehingga tidak semua kayu mampu bertahan pada lahan ini. Kayu yang memiliki keunggulan pada kondisi lahan seperti ini adalah kayu Belian/Ulin tersebut.

Tipe bangunan keraton Kadriah adalah rumah panggung yang mempunyai kolong pada bagian bawahnya dan lantai utama di topang oleh tonggak/tiang penyangga lantai. Pada bagian kolong tertutup oleh pagar kecil yang diberi ornamen/ukiran berbentuk lubang yang tegak lurus keatas. Pada bagian depan bangunan terdapat pintu masuk utama, bangunan untuk pintu masuk ini berupa bangunan tambahan yang lebih menjorok kedepan semacam bordess. Bordess ini berhubungan langsung dengan teras utama bangunan di bagian depan.

Bentuk dasar bangunan ini pada dasarnya adalah persegi panjang (memanjang dari depan kebelakang) dengan tambahan bordess pada bagian depan dan bagian belakang yang berbentuk setengah lingkaran. Kpada bagian depan terdapat teras dan pada bagian kanan dan kiri teras tersebut terdapat dua buah kamar yang difungsikan sebagai mushalla dan alat-alat keagamaan. Pada bagian dalam/utama ruangan dibagi dua bagian yaitu kamar dan ruang singgasana. Singgasana berada ditengah ruang utama dan diapit oleh barisan kamar di kanan kirinya. Pada sisi kanan terdapat tiga kamar dan tiga lagi disisi kiri. Pada bagian belakang, ruangan berbentuk setengah lingkaran dan berfungsi sebagai ruang pertemuan antara raja dan para bangsawannya. Ruangan ini bersifat tertutup dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu yang berkaitan dengan kesultanan. Lantai bangunan secara keseluruhan menggunakan bahan papan kayu Belian. Demikian juga juga dengan bahan atap yang terbuat dari papan tipis/sirap kayu Belian. Atap pada bangunan ini berbentuk perisai dan tumpang tiga. Pada pemisah tumpang antar atap terdapat lubang angin yang diberi kaca tembus pandang, kemungkinan ini dibuat untuk penerangan dalam bangunan. Pada bagian depan terdapat satu lantai tambahan berbentuk setengah lingkaran, lantai tambahan ini berbentuk balkon dan difungsikan sebagai sarana sultan untuk memberi taklimat kepada masyarakat dan sarana sultan untuk menonton pertunjukan yang dilaksanakan di halaman istana.

Pada bagian puncak atap terdapat loteng yang pada bagian atasnya diberi hiasan lambing kerajaan dan setiap jendelanya tertutup kaca. Keliling halaman ditutup dengan pagar papan kayu ulin setinggi 3 meter dan pada bagian ujung atasnya diruncingkan. Sayangnya pada masa sekarang, pagar ulin tersebut hanya tersisa sedikit dan telah diganti oleh pagar tembok bata dan ornamen stainless steel.

Dinding bangunan dibuat dari bahan papan ulin yang dipasang berdiri. Pada bagian-bagian tertentu terdapat hiasan lambang kerajaan yang berupa bulan sabit dan bintang (unsur Islam). Dan pada bagian dinding dalam terdapat hiasan berupa garis-garis tegas yang disimbolkan sebagai simbol rukun Islam dan rukun Iman

### 3. Potensi pengembangan Keraton Kadriah, Kesultanan Pontianak

*Setiap cagar budaya dalam bentuk apapun mempunyai nilai yang bisa dikembangkan. Nilai-nilai ini bisa berupa nilai yang inmateriil yang bersifat pada pengembangan karakter dan jatidiri masyarakat baik itu yang bersifat individual maupun komunal. Selain itu nilai yang terkandung dalam cagar budaya juga bisa bersifat materi yang berbicara pada pengembangan cagar budaya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1, Ayat 33. Agar setiap cagar budaya memiliki nilai yang bisa dipetik hasilnya, maka untuk perlu kiranya setiap stakeholder cagar budaya mengenali terlebih dahulu potensi yang terkandung dalam setiap cagar budaya, dalam hal ini adalah Keraton Kadriah di Pontianak.*

#### 3.1 Potensi wisata

Fenomena pembangunan di bidang kepariwisataan kini sudah nampak dari segala sisi yang diawali dari Perencanaan disertai pengembangan berkesinambungan ( Interconnectivity result program development ) yang kian saban berlanjut. Berbagai animo masyarakat dalam beraktivitas plesiran memancing pihak pengelola mulai dari instansi terkait sampai pada pihak pengelola industri pariwisata mulai merencanakan disesuaikan dengan permintaan masyarakat ( Demand Public ) sebagai sasaran tindak lanjut pembangunan atas pengelolaan asset wisata yang menguntungkan bagi PAD maupun sebagai sokongan pada masyarakat setempat akan terciptanya ekonomi kerakyatan. (Arham Pasrah, S.S.T.Par, *Menjajaki Pengembangan Kepariwisataan dan Budaya Kab. Singjai yang Berorientasi Global (I)*, <http://www.sinjaikab.go.id>, 2012).



Singgasana Kesultanan Pontianak

Pusaka budaya (*heritage*) dewasa ini telah mendapat perhatian yang luas. Tumbuhnya kesadaran tentang perlunya penyelamatan benda budaya yang merupakan bukti sejarah masa lalu, dan di sisi lain, adanya peluang ekonomi pariwisata yang memanfaatkan benda budaya tersebut, melahirkan berbagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan untuk kepentingan peningkatan kehidupan masyarakat. Jika benda-benda tersebut dikelola secara

baik dan profesional, sebagai bagian dari suatu kebudayaan, pusaka budaya bisa menjadi alat pemberdayaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah selaku pemegang kebijakan politik, pengusaha dalam bidang

ekonomi, dan masyarakat sebagai pemilik kebudayaan (I Ketut Setiawan, "Pusaka Budaya Pura Tirta Empul dan Pengembangan Pariwisata " <http://iaaipusat.wordpress.com>, 2012)

Pariwisata merupakan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mempunyai energi pendobrak yang kuat dan mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan, baik ke arah perbaikan maupun ke arah penurunan (degradasi) dalam berbagai aspek.

Berdasar pada teori diatas, maka keraton Kadriah merupakan tinggalan yang bisa dikembangkan sebagai wisata pusaka dan mempunyai nilai-nilai pengembangan. Sub pokok bahasan ini pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan secara ekonomis yaitu pengembangan wisata. Sebagai sebuah bangunan yang bersifat monumental, keraton ini memiliki nilai kenangan kolektif terhadap romantika masa lalu kota Pontianak. Nilai tersebut memunculkan potensi untuk menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

Potensi seperti tersebut diatas harus tetap bisa dijaga dan dikembangkan dengan landasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pengembangan yang dilakukan untuk kepentingan ekonomis menjadi sebuah keharusan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan yang berdasar pada teori ekonomi kerakyatan. Aspek pelestarian harus tetap diperhatikan sehingga aspek ekonomi yang dipakai dalam pengelolaan tidak harus merusak cagar budaya yang ada.

### 3.2 Potensi Pengembangan Adat dan Budaya

Dewasa ini Kebudayaan Daerah yang kita miliki sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia hampir punah dan lenyap dari muka bumi ini. Hampir semua masyarakat dalam seluruh lapisan semakin lupa akan keberadaan kebudayaan Daerah. Hal itu disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang *notabene* datang dari *western countries* yang jauh dari budaya-budaya negara timur seperti kita, Indonesia.

Keraton Kadriah adalah bangunan keraton yang menjadi landasan adat dan istiadat di wilayah Pontianak. Bisa dikatakan bahwa keraton ini adalah bagian dari adat dan budaya Pontianak itu sendiri. Sebagai ikon dan symbol budaya kota Pontianak, diharapkan keraton Kadriah bisa membawa Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk menjadi salah satu modal sosial



Al Qur'an tulisan tangan Sultan Abdurachman salah satu daya tarik di Keraton Kadriah

yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pelestarian adat istiadat dan kebudayaan sangat berkaitan dengan aspek keberlanjutan identitas sosial budaya masyarakat yang menyokong pada integrasi nasional.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2007 Pasal 1, Ayat 7 disebutkan bahwa *"Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat"*.

Ayat tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa fungsi keraton adalah untuk melestarikan dan mengembangkan adat budaya dan nilai sosial budaya. Pelestarian nilai adat, sosial dan budaya masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat inmateriil sehingga dapat menjadi filter dalam era informasi yang makin mengglobal. Filter bidang budaya ini sangat diperlukan agar arah pembangunan yang dilakukan tetap pada koridor budaya ketimuran yang mengedepankan nilai kearifan lokal.

Proses pembangunan di Indonesia masih banyak didasarkan pada eksplorasi sumber daya alam, apabila eksplorasi tersebut tidak dilandasi pada nilai kearifan lokal maka akan berubah menjadi bentuk eksploitasi yang akan merusak alam dan nilai budaya masyarakat. Untuk itu maka akar budaya yang mengedepankan kearifan lokal harus tetap dipertahakan untuk menjaga arah pembangunan tetap pada landasan kebudayaan itu sendiri.

Dari hal tersebut maka, jelas pelestarian keraton Kadriah adalah sebuah keharusan dalam menjaga nilai adat dan budaya masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat sehingga nilai kearifan lokal yang diajarkan oleh nenek moyang kita tetap menjadi paradigma dalam melakukan proses pembangunan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pasrah, Arham., 2012, "Menjajaki Pengembangan Kepariwisata dan Budaya Kab. Sinjai yang Berorientasi Global (I)", <http://www.sinjaikab.go.id>, (diakses tanggal 15 Mei 2012)
- Setiawan, I ketut, 2012 "*Pusaka Budaya Pura Tirta Empul dan Pengembangan Pariwisata* " <http://iaaipusat.wordpress.com>, (diakses tanggal 15 Mei 2012).
- Anonim, 2007, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Masyarakat Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah"
- Anonim, 2011, <http://www.pontianakonline.com/pontianak/equatopedia/fisiografi> ( diakses tanggal 12 Mei 2012)
- Anonim, 2011, "[http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan\\_Pontianak#Daftar\\_Sultan\\_Pontianak](http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Pontianak#Daftar_Sultan_Pontianak)", (diakses tanggal 8 Mei 2012)
- Anonim, 2011, "[http://wiant-d-a-fib11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-23326-Sejarah-Perancang Lambang Republik Indonesia.html](http://wiant-d-a-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-23326-Sejarah-Perancang_Lambang_Republik_Indonesia.html)", (diakses tanggal 11 Mei 2012).
- Anonim, 2011, "<http://ace-informasibudaya.blogspot.com/2011/02/kesultanan-pontianak.html>".( diakses tanggal 11 Mei 2012).
- Anonim, 2011, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pontianak](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak)

# Potensi Rumah Adat Tradisional Bubungan Tinggi Sebagai Objek Wisata Sejarah

Oleh : Tisna Arif Ma'rifat, SS, dan Azahar Purwanto, ST

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Tradisi membangun rumah adat merupakan suatu karya komunal masyarakat dalam menciptakan untuk keperluan pemenuhan hidupnya. Sedangkan membangun merupakan wujud pengalaman manusia dalam menempatkan pilihannya pada sebidang lahan untuk keberlangsungan hidup. Menurut Gunawan Tjahjono (2010), pengertian dari bangun adalah keadaan sadar yang menunjukkan gejala bangkit dari suatu keadaan rebah. Dengan “bangun” maka diri ada dan hidup, keadaan ini tercermin pada keberadaan “bangun” yang amat jelas saat proses pendiriannya. Proses ini merupakan cerminan diri yang terlihat dari sosok bangunan. Bangunan adalah bentuk fisik yang mengandung makna bagi pembangunan. Membangun diri dan mendirikan bangunan terpadu dalam tindakan pembuatan bangunan, mendirikan bangunan bagi memantapkan dunia. Diri itu cerminan dunia yang tertib ada tata aturnya (Antar, 2010 : 12-15).

Begitu pula masyarakat Banjar, bentuk permukiman sebagai wujud dari pola tata ruang masyarakat juga tercermin melalui karya dan hasil wujud fisik berdasarkan hasil pengalaman yang panjang dalam mendirikan bangunan yang dikenal dengan istilah rumah panggung. Rumah panggung tersebut terdiri dari berbagai bentuk salah satunya adalah rumah bubungan tinggi (Sunarningsih, 2009: 78-79).

Pada era globalisasi serta pesatnya pembangunan di setiap wilayah perkotaan membuat bangunan rumah tradisional tergerus dan relatif ditinggalkan dengan memilih rumah dengan bahan beton pada umumnya. Tinggalan rumah tradisional tersebut tidak semuanya dapat kita lihat pada era globalisasi ini. Salah satu rumah bubungan tinggi yang masih eksis dan dapat dilihat yaitu rumah bubungan tinggi yang terletak di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Menilik begitu pentingnya pelestarian tinggalan rumah tradisional Kalimantan supaya tidak hilang ditelan derasnya pembangunan di Kabupaten Banjar penulis akan mencoba memaparkan mengenai arsitektur rumah adat bubungan tinggi serta potensinya sebagai salah satu tujuan wisata yang dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat sekitar.

## 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

### 1.2.1 Faktor Geografis dan Kondisi Ekologi Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar secara geografis terletak antara 2° 49' 55" - 3° 43' 38" garis Lintang Selatan dan 114° 30' 20" hingga 115° 35' 37" Bujur Timur. Terbagi menjadi 17 kecamatan, dengan 288 desa / kelurahan. Ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50–300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl.

Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik. Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, dan liat berpasir. sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, dan pasir berdebu.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah Kabupaten Banjar dijumpai beberapa jenis tanah; antara lain tanah organosol, glei humus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57% (Anonim, 2009 : 4)

Iklm merupakan suatu kondisi atau keadaan cuaca dalam jangka waktu yang relatif lama meliputi area yang luas (Hassan, 1985: 88). Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim adalah faktor curah hujan dan temperatur yang juga mempengaruhi suhu. Kondisi topografi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kelembaban, hidrologi, kesuburan tanah, keberagaman flora dan fauna hingga curah hujan yang terjadi dalam wilayah ini

Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2008, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 22,13 °C sampai 32,8 °C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei (32,8 °C) dan suhu minimum terjadi pada bulan September (22,8 °C). Selain itu, sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 40,0 % sampai 100,0 %, dengan kelembaban maksimum pada bulan Februari, Maret, April, Oktober, November, dan Desember dan serta minimum pada bulan September.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topographi dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan yang disajikan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan selama tahun 2008 tercatat rata-rata 210,2 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Mei (54,4mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Maret (554,3mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 22 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Maret (27 hari), sebaliknya jumlah hari terendah pada bulan September (14 hari).

Antara curah hujan dan keadaan angin biasanya ada hubungan erat satu sama lain. Walaupun demikian, tidak semuanya terjadi hubungan yang demikian. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu musim tersebut dikenal dengan sebutan musim barat. Pada musim kemarau angin timur bertiup dari benua Australia, keadaan angin pada saat itu bisa juga kencang, Pada tahun 2008 kecepatan angin yang terjadi rata-rata sebesar 6,7 knots per bulan (<http://kab.banjar.bps.go.id/>).

Tabel 1.1 Rata-rata suhu udara dan curah hujan perbulan

di Kabupaten Banjar tahun 2009

Bulan	Suhu Udara (°C)		Kelembaban (%)	Curah hujan (mm)
	Min	Max		
1	2	3	4	5
Januari	23,5	31,2	87,0	271,8
Februari	23,5	31,5	86,0	239,9
Maret	23,0	30,7	87,0	554,3
April	23,4	32,0	87,0	241,2
Mei	23,0	32,8	82,0	54,4
Juni	22,3	32,0	84,0	259,5
Juli	22,3	30,9	86,0	143,8
Agustus	22,4	31,3	85,0	82,8
September	22,8	32,5	82,0	99,1
Oktober	23,2	31,9	86,0	77,7
November	23,8	31,6	87,0	287,8
Desember	23,4	30,3	91,0	391,9

### 1.2.2 Sosial Budaya

Berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, jumlah rumah tangga pada pertengahan tahun 2008 mencapai 128. 427 RT, dengan jumlah penduduk 489. 056 orang yang terdiri dari 240.823 laki-laki dan 248.233 perempuan, Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Martapura dengan kepadatan 2.078 penduduk perkilometer persegi. Dibanding tahun sebelumnya, kecamatan Martapura mengalami kenaikan jumlah penduduk. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kepadatan penduduk, dimana pada tahun 2007, kepadatannya tercatat sebesar 2.068 penduduk per km<sup>2</sup>. Kecamatan Paramasan dan Aranio hanya 7 penduduk/km<sup>2</sup> merupakan daerah dengan tingkat kepadatan rendah. (Anonim, 2009 : 51).

Jumlah sekolah negeri yang ada Kabupaten Banjar sebanyak 419 buah, dengan rincian 356 SD Negeri, 53 SMP dan 10 SMA. Sekolah swasta berjumlah 15 buah. Secara keseluruhan jumlah murid yang ditampung adalah 58.617 orang dengan 4.509 guru, berarti ratio guru : murid berkisar pada perbandingan 1:13. Sementara sekolah yang berada dalam lingkup Kandep Agama berjumlah 187 buah, dengan 2.866 guru dan 26.621 murid, sehingga ratio guru dan murid sekitar 1 : 9 Fasilitas pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Negeri yang ada/dapat dijangkau karena berada di sekitar lingkungan Kabupaten Banjar adalah Universitas Lambung Mangkurat.

### 1.3 Sejarah Rumah Adat Banjar

Rumah Banjar merupakan rumah tradisional suku Banjar yang menampilkan arsitektur tradisional dengan ciri-cirinya antara lain memiliki perlambang, penekanan pada atap, ornamental, dekoratif dan simetris. Menurut Idwar saleh Rumah tradisonal Banjar merupakan tipe rumah khas Banjar dengan gaya dan ukirannya sendiri berkembang sekitar tahun 1871 sampai tahun 1935. Dalam suatu perkampungan suku Banjar terdiri dari



bermacam-macam jenis rumah Banjar yang mencerminkan status sosial maupun status ekonomi sang pemilik rumah. Konsepsi pendirian rumah, dibangun dengan pola linier mengikuti arah aliran sungai maupun jalan raya terdiri dari rumah yang dibangun mengapung di atas air, rumah yang didirikan di atas sungai maupun rumah yang didirikan di daratan, baik pada lahan basah (alluvial) maupun lahan kering. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Banjar#Jenis-jenis\\_Rumah\\_Adat\\_Banjar](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Banjar#Jenis-jenis_Rumah_Adat_Banjar)).

Terdapat beberapa jenis rumah banjar yang dapat dikelompokkan berdasarkan hasil inventarisasi rumah adat banjar di Kalimantan Selatan antara lain :

1. Rumah Bubungan Tinggi
2. Rumah Gajah Baliku
3. Rumah Gajah Manyusu
4. Rumah Balai Laki
5. Rumah Balai Bini
6. Rumah Palimbangan
7. Rumah Palimasan (Rumah Gajah)
8. Rumah Cacak Burung/Rumah Anjung Surung
9. Rumah Tadah Alas
10. Rumah Lanting
11. Rumah Joglo Gudang
12. Rumah Bangun Gudang

Rumah adat Banjar, biasa disebut juga dengan **Rumah Bubungan Tinggi** dikarenakan pada bentuk bagian atapnya begitu lancip dengan sudut 45°. Bangunan Rumah Adat Banjar diperkirakan telah ada sejak abad ke-16, yaitu ketika daerah Banjar di bawah kekuasaan Pangeran Samudera yang kemudian memeluk agama Islam, dan mengubah namanya menjadi Sultan Suriansyah dengan gelar Panembahan Batu Habang. Sebelum memeluk agama Islam Sultan Suriansyah tersebut menganut agama Hindu. Ia memimpin Kerajaan Banjar pada tahun 1596–1620. Pada mulanya bangunan rumah adat Banjar ini memiliki konstruksi berbentuk segi empat yang memanjang ke depan. Namun perkembangannya kemudian bentuk segi empat panjang tersebut mendapat tambahan di samping kiri dan kanan bangunan dan agak ke belakang ditambah dengan sebuah ruangan yang berukuran sama panjang. Penambahan ini dalam bahasa Banjar disebut *disumbi*. Bangunan tambahan di samping kiri dan kanan ini tamapak menempel (dalam bahasa Banjar: *Pisang Sasikat*) dan menganjung keluar. Bangunan tambahan di kiri dan kanan tersebut disebut juga anjung; sehingga kemudian bangunan rumah adat Banjar lebih populer dengan nama **Rumah Ba-anjung**.

Sekitar tahun 1850 bangunan-bangunan perumahan di lingkungan keraton Banjar, terutama di lingkungan keraton Martapura dilengkapi dengan berbagai bentuk bangunan lain. *Rumah Ba-anjung* adalah bangunan induk yang utama karena rumah tersebut konon merupakan istana tempat tinggal Sultan (Sunarningsih, 2008 : 78-79). Bangunan-bangunan lain yang menyertai bangunan *Rumah Ba-anjung* tersebut ialah yang disebut dengan *Palimasan* sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan kesultanan berupa emas dan perak. *Balai Laki* adalah tempat tinggal para menteri kesultanan, *Balai Bini* tempat tinggal para inang pengasuh, *Gajah Manyusu* tempat tinggal keluarga terdekat kesultanan yaitu para Gusti-Gusti dan *Anang*. Selain bangunan-bangunan tersebut masih dijumpai lagi bangunan-bangunan yang disebut dengan Gajah Baliku, Palembang, dan Balai Seba Rumah Banjar

Pada perkembangan selanjutnya, semakin banyak bangunan-bangunan perumahan yang didirikan baik di sekitar kesultanan maupun di daerah-daerah lainnya yang meniru bentuk bangunan *Rumah Ba-anjung*. Sehingga pada akhirnya bentuk *Rumah Ba-anjung* bukan lagi hanya merupakan bentuk bangunan yang

merupakan ciri khas kesultanan (keraton), tetapi telah menjadi ciri khas bangunan rumah penduduk daerah Banjar.

Bentuk rumah-rumah tradisional banjar pada mulanya dibangun untuk kepentingan istana. Namun kemudian berkembang dikalangan masyarakat luas setelah Belanda mengeluarkan surat segel izin pembuatan Rumah Tradisional Bubungan Tinggi pada tahun 1871. Sejak itu daerah-daerah lainnya bermunculan rumah model seperti itu. Pada masa-masa perjuangan kemerdekaan sering digunakan sebagai markas para pejuang dan tempat latihan Tentara Republik Indonesia (TKR) (<http://www.urangbanua.com>.)

## **2. Arsitektur dan Nilai Arkeologis Rumah Bubungan Tinggi**

### **2.1 Tinjauan Arsitektural Rumah Bubungan Tinggi**

Bentuk rumah Bubungan Tinggi diibaratkan tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian secara vertikal yaitu kepala, badan dan kaki. Sedangkan anjung diibaratkan sebagai tangan kanan dan tangan kiri yaitu anjung kanan dan *anjung* kiwa (kiri). Pada rumah bubungan tinggi bagian tersebut berupa bagian pondasi, tiang (bagian kaki), bagian badan berupa bangunan utama seperti dinding bangunan, lantai, teras, ruangan privat, ruangan tengah, dan dapur. Serta atap bangunan yang diibaratkan sebagai (kepala).

Kondisi geografis serta iklim di Kalimantan Selatan yang berawa membuat pola pemukiman masyarakat pada masa lalu membuat rumah dengan tiang tinggi. Hal ini sebagai salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya. Kondisi alam tersebut membuat bangunan dibuat lebih tinggi dari tanah sekitar.

Struktur di Rumah Bubungan Tinggi terbuat dengan konstruksi kayu. Konstruksi dimulai dari dasar, papan instalasi, kemudian sampai ke kasau. Konstruksi tersebut membentuk struktur kerangka seluruh sistem stabil dan memiliki kekakuan baik secara vertikal dan lateral. Rumah Bubungan Tinggi memiliki struktur bentang panjang dan mampu berdiri stabil di bawah tanah lemah (berawa), dengan beban yang berbeda di bagian depan, tengah dan belakang rumah, serta berat dari bahan bangunan. Tingkat kesulitan yang tinggi dalam pembangunan rumah, membawa kearifan budaya lokal yang menyatu dengan alam. Hasil arsitektur dan bangunan rumah bubungan tinggi merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.

Jenis material yang digunakan dalam membangun rumah bubungan tinggi berasal dari alam sekitar yang terdapat di Kalimantan Selatan. Jenis kayu yang digunakan rumah Bubungan Tinggi terbagi dalam fungsinya yaitu :

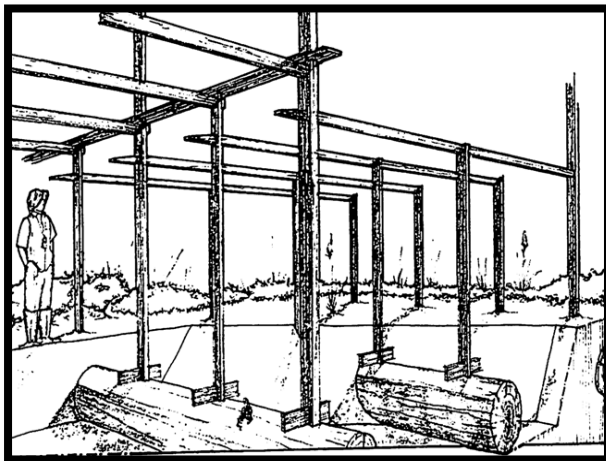
1. Galam kayu dan Kayu Kapur Naga. Kedua jenis kayu biasanya digunakan untuk pondasi rumah. Pondasi ini adalah bagian penting dalam konstruksi Rumah Bubungan Tinggi. Rumah Bubungan Tinggi biasanya dibangun di daerah berawa dan berlumpur, sehingga lembaga ini harus kuat dan kokoh untuk menghindari busuk ketika ia dikuburkan di dalam rawa atau lumpur. Oleh karena itu, mereka menggunakan Galam atau Kayu Kapur Naga. Kedua jenis kayu memiliki keunikan. Mereka bisa menahan sampai 70 tahun jika mereka dikubur di daerah berawa, dan 60 tahun di daerah kering.

2. Kayu ulin. Kayu ini dikenal awet, tahan air, dan tahan panas. Kayu ulin biasanya digunakan sebagai tiang, tongkat, gelagar (split bambu digunakan sebagai dasar tempat duduk), pasak, lantai, watun barasuk, kusen pintu dan jendela, dan kasau dari atap.
3. Lanan kayu. Kayu ini biasanya digunakan untuk membangun dinding.
4. Putih resin kayu. Kayu ini biasanya digunakan untuk gelagar, turus tawing, balabat, titian tikus, bujukan sampaian, dan riing.
5. Daun Rumbia. Digunakan untuk atap.
6. Paring (bambu). Hal ini digunakan untuk membangun Palupuh halayung dinding dan Hanau. Selain itu, Paring juga digunakan untuk membangun lantai di padu atau pambayuan.

### 2.1.2 Proses Pendirian rumah Bubungan Tinggi

Faktor geografis serta kondisi yang berlahan basah dan berawa di sungai-sungai pesisir menghadirkan adaptasi, bagaimana membuat bangunan berdiri tegak dan kokoh yang dapat menahan beban berat bangunan di lahan basah. Konstruksi bangunan dengan penguatan pondasi sangatlah penting. Sistem pondasi ini menggunakan kayu dari jenis kayu kapur naga ditempatkan sebagai alas duduk. Daya tahan kayu tentu menjadi pertimbangan, secara alami ada dalam proses pengawetan kayu pada saat tenggelam di dalam lumpur atau rawa. Terbukti dengan cara ini, kayu bisa bertahan ratusan tahun. Selanjutnya untuk beban di atas dasar kacapuri lebih ringan digunakan. Sistem pondasi ini menggunakan kayu yang lebih kecil, umumnya ulin, atau kayu galam, dengan melakukan persiapan dan memanjang melewati garis kolom yang akan diinstal.

Pondasi Kacapuri juga merupakan dasar untuk tiang bangunan dan tongkat, yang akan berdiri di atasnya. Tiang dan tongkat akan diinstal dengan kedalaman sekitar 50cm untuk meningkatkan luas permukaan



Gambar 1. Sistem Pondasi pada Rumah Bubungan Tinggi Anatomi Rumah Bubungan Tinggi

tiang beristirahat pada yayasan. Dengan demikian kekakuan lateral horizontal telah dibuat oleh satu arah.

Setelah instalasi dasar selesai, proses selanjutnya adalah pemasangan tiang dan tongkat. Tiang dan tongkat merupakan struktur vertikal yang menyalurkan beban dari atap ke pondasi. Biasanya kayu yang digunakan, dengan panjang sekitar 12 meter, 20 cm lebar, dan tebal 20 cm. Untuk membangun Bubungan Tinggi Rumah dibutuhkan 60 batang. Adapun tongkat, panjang kayu Ulin adalah tentang 5meters dengan

ketebalan 20 cm dan lebar 20 cm. Adapun jumlah yang dibutuhkan sekitar 120 sampai 150 baris

Setelah instalasi tiang dan tongkat selesai, langkah berikutnya adalah kerangka Rumah Bubungan Tinggi. Kerangka rumah tradisional Banjar ini cukup unik karena selain memiliki arsitektur yang cukup tinggi, untuk mengukur panjang dan lebar, mereka menggunakan depa dan panjang kaki yang jatuh pada hitungan ganjil. Penggunaan hitungan ganjil ini diyakini memiliki nilai spiritual yang tinggi. kerangka ini adalah:

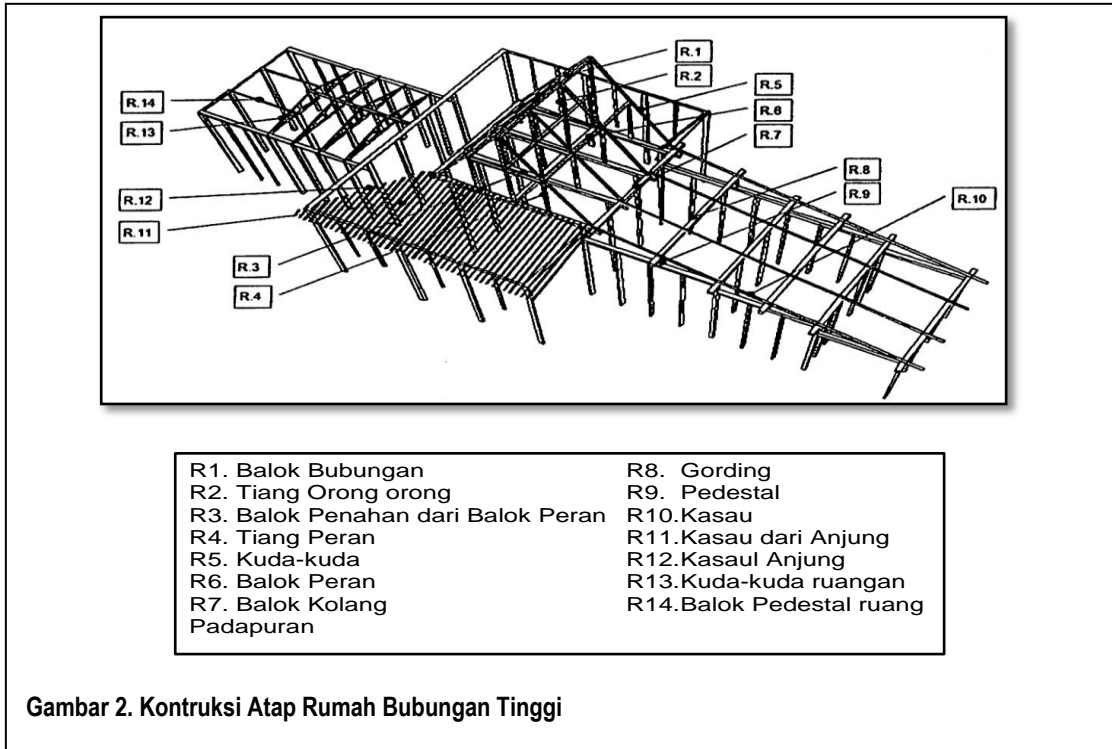
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implan terbuat dari kayu Ulin.</li> <li>• Balok terbuat dari kayu Ulin, Belangiran, Resin Putih.</li> <li>• Papan lantai terbuat dari bahan Ulin setebal 3 cm.</li> <li>• Turus Tawing terbuat dari resin kayu.</li> <li>• Watun Barasuk balokan terbuat dari Ulin.</li> <li>• Pintu dan jendela terbuat dari papan dan balok Ulin.</li> <li>• Bujuran Sampiran dan tirai yang terbuat dari Ulin atau putih damar kayu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titian Tikus terbuat dari kayu damar putih.</li> <li>• Riing terbuat dari papan kayu dan kuning putih.</li> <li>• Kutub OrongOrong dan berisik dan Tulang punggung bukit ini terbuat dari bahan, Kayu Ulin, kayu lanan, dan putih kayu damar.</li> <li>• Balabad terbuat dari kayu damar putih</li> <li>• Kasau terbuat dari kayu Ulin atau Damar Putih.</li> </ul>
---	--

Pembangunan Rumah Bubungan Tinggi dapat diklasifikasikan dalam dua kegiatan, pemasangan lantai dan dinding. Pemasangan lantai biasanya bertumpu pada pilar utama, termasuk balok lantai ke dalam lubang di tiang utama. Sebelum lantai dipasang papan, balok gelagar pertama dipasang pada balok lantai pertama. Tujuannya adalah selain untuk mengikat tiang utama, juga bahwa lebar minimum balok lantai yang tidak menimbulkan kelenturannya lantai. Setelah balok lantai dan balok gelagar terpasang, langkah berikutnya adalah pemasangan papan lantai.

Papan yang digunakan untuk lantai dibuat dengan papan kayu Ulin dengan ketebalan 2-3 cm. Instalasi termasuk dua teknik, lantai dipasang rapat dan dipasang antara 0,25 cm - 0,50 cm. Sebagian besar lantai di kamar pada Bubungan Tinggi Rumah erat dipasang, kecuali: Surambi Muka, *Anjung* Jurai Kiri, Pedapuram, dan pelatar belakang.

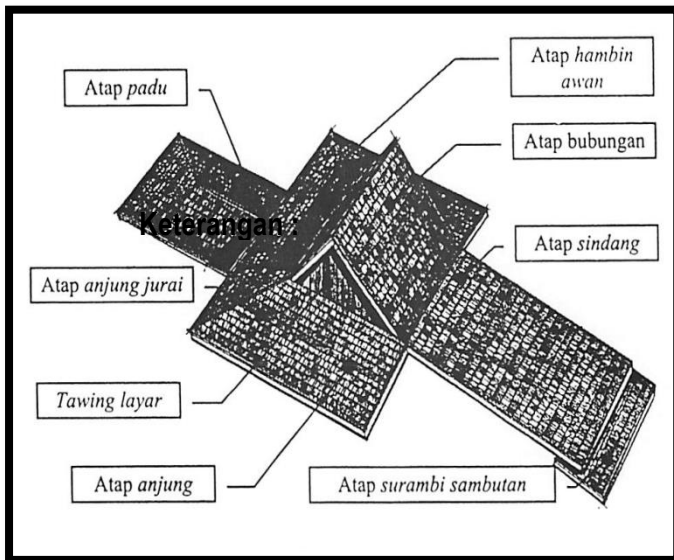
Setelah papan lantai terpasang, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan penutup bangunan atau dinding Rumah Bubungan Tinggi. Dinding terdiri dari papan yang dipasang dalam posisi berdiri, sehingga di samping tiang juga diperlukan Turus Tawing dan Balabad untuk merakit papan. Bahan dinding adalah papan ulin dan Palupuh. Di belakang, samping dan dinding Tawing alat penggunaan kayu ulin. Pada Anjung Kiwa, Anjung Kanan, Anjung Jurai dan Ruang Padu, terkadang mereka menggunakan Palupuh sebagai dinding bangunan. Kerangka rumah ini biasanya menggunakan ukuran tradisional depa atau tapak kaki dengan ukuran ganjil yang dipercayai punya nilai magis / sakral. Bagian-bagian rangka tersebut adalah :

1. susuk dibuat dari kayu Ulin.
2. Gelagar dibuat dari kayu Ulin, Belangiran, Damar Putih.
3. Lantai dari papan Ulin setebal 3 cm.
4. Watun Barasuk dari balokan Ulin.
5. Turus Tawing dari kayu Damar.
6. Rangka pintu dan jendela dari papan dan balokan Ulin.
7. Balabad dari balokan kayu Damar Putih.
8. Titian Tikus dari balokan kayu Damar Putih.
9. Bujuran Sampiran dan Gorden dari balokan Ulin atau Damar Putih.
10. Tiang Orong Orong dan Sangga Ributnya serta Tulang Bubungan dari balokan kayu Ulin, kayu Lanan, dan Damar Putih.
11. Kasau dari balokan Ulin atau Damar Putih.
12. Riing dari bilah-bilah kayu Damar putih.



Gambar 2. Kontruksi Atap Rumah Bubungan Tinggi

Setelah lantai dan dinding telah terpasang, langkah berikutnya dilanjutkan dengan memasang *hatap* (atap). Atap Rumah Bubungan Tinggi terdiri dari beberapa jenis atap. Mereka adalah atap bubungan (ini adalah karakter khusus dari Bubungan Tinggi), atap *Sindang Langit* (atap yang memanjang dari kaki atap bubungan ke



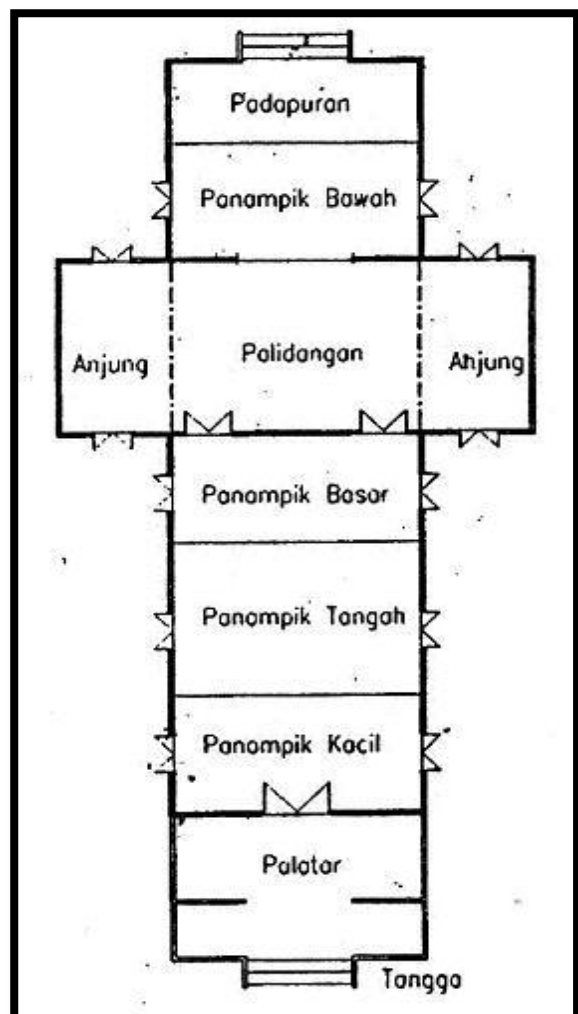
Gambar 3. Atap Pada Rumah Bubungan Tinggi Anatomi Rumah Bubungan Tinggi

pengadilan), atap *hambin awan* (atap yang memanjang dari kaki atap bubungan ke belakang), dan atap *anjung* (atap yang menutupi bagian Anjung). Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan daun rumbia sebagai atap rumah secara bertahap menurun. Hal ini karena atap rumbia sangat mudah tertiuip oleh angin dan masyarakat Banjar menjadi lebih sadar bahwa sifat tempat mereka tinggal menyediakan kayu Ulin berlimpah, yang kemudian digunakan sebagai penutup atap.

## 2.2 POLA TATA RUANG

Pola tata ruang antara Rumah Bubungan Tinggi dengan rumah tradisional lainnya terdapat perbedaan dalam pembagiannya. Pada Rumah Bubungan Tinggi terdapat tiga jenis ruang yaitu, ruang terbuka, ruang semi privat dan ruang privat.

- Ruang terbuka terdiri dari halaman atau teras yang terbagi lagi menjadi *surambi muka* dan *surambi sambutan*.
- Ruang semi privat diberikan batas konstilasi yang disebut *Pamedangan*.
- Ruang Privat dibagi menjadi *Pacira* dan *Panurunan* (*Panampik Kacil*), *Paluaran* (*Panampik Basar*), *Paledangan* (*Panampik Panangah*) terdiri dari *Palidangan Dalam*, *Anjung Kanan* dan *Anjung Kiwa*, serta *Panampik Padu* (*dapur*)
- Secara berurutan ruang-ruang itu disebut :
- *Palatar* (paviliun atau teras), ruang depan yang merupakan ruang pertama setelah tangga masuk. Ruangan ini adalah lantai yang lebih tinggi, dikelilingi pagar rasi. Biasanya di ruang ini terdapat sepasang kursi panjang. *Palatar* disebut juga *Pamedangan*. *Panampik kacil*, adalah ruangan yang agak kecil setelah masuk melalui pintu depan *Hadapan Lawang*. Permukaan lantai lebih tinggi dari *Palatar* lantai. *Ambang* sini disebut *Watun Sambutan*.
- *Panampik Basar* atau *Ambin sayup*, bahwa ruangan menghadap ke dinding tengah (Banjar: *Tawing Hālāt*). Permukaan lantai juga lebih tinggi dari lantai sebelumnya. Lantainya disebut *Watun Jajakan*, sama dengan *ambang* lantai pada *Panampik tengah*. Ruangan itu cukup besar untuk digunakan untuk berbagai kegiatan keluarga dan masyarakat. Jika masih kekurangan ruang yang memisahkan *Tawing ālāt* dengan *Palidangan* dapat dibuka. Dalam *Palidangan* atau selempang, ruang dalam rumah yang berbatas dengan *Panampik Basar*. Tingkat lantai *Palidangan* sama dengan lantai *panampik basar*. Di dalam ruangan *Palidangan* telah pilar besar mendukung *bubungan tinggi* (8 bar). Kutub disebut *Tihang Pitugur* atau *Tihang Guru*. Ruangan ini terdiri dari *Paledangan Dalam* dan *Anjung Kiwa Anjung Kanan*. Fungsi ruang yang sama dengan *Paluaran*, namun biasanya diperuntukkan bagi



Gambar 4. Pola Tata Ruang Rumah Bubungan Tinggi

perempuan. Di sini ada alat kelengkapan lemari besar, lemari buta, kanap, dan teko. Lantainya diberi Hambal sebagai alas duduk.

- *Panampik Dalam* atau Panampik Bawah, yaitu di sebuah kamar yang cukup besar dengan permukaan lantai lebih rendah dari Palidangan lantai dan ketinggian yang sama dengan permukaan lantai panampik tengah. Ambang Lantai disebut juga dengan Watun Jajakan.
- Anjung Kanan - Anjung Kiwa. Anjung Kanan ruangan ini juga dilengkapi ruang istirahat dengan make up dan aksesoris ibadah. Sedangkan Anjung Kiwa merupakan tempat melahirkan dan tempat merawat jenazah. Di sini juga diberi peralatan seperti lemari, tempat tidur, meja dan lain-lain.

Padapuran atau Padu, yang merupakan ruang terakhir bagian belakang Rumah Bubungan Tinggi. Permukaan lantai juga lebih rendah dari panampik. Ambang lantai disebut Watun. Kadang-kadang Watun cukup tinggi sehingga sering di beri yang diberikan untuk turun naik tangga. Ruangan dibagi menjadi beberapa bagian Padapuran Tangan (juru masak) dan parut (tempat kayu bakar kering), Pajjiban dan Pagaduran (tempat mencuci piring atau pakaian).

### 2.3 Ornamen Rumah Bubungan Tinggi

Penampilan rumah tradisional Bubungan Tinggi juga ditunjang oleh bentuk-bentuk ornamen berupa ukiran. Penempatan ukiran tersebut biasanya terdapat pada bagian yang konstruktif seperti tiang, tataban, pilis, dan tangga.

Ornamen yang digambarkan adalah motif flora (daun dan bunga). Motif fauna (binatang) seperti pada ujung pilis yang menggambarkan burung enggang dan naga juga distilir dengan motif floral. Di samping itu juga terdapat ukiran bentuk kaligrafi. Kaligrafi Arab merupakan ragam hias yang muncul belakangan yang memperkaya ragam hias suku Banjar. (Museum Lambung Mangkurat - Banjarbaru, "Rumah Tradisional Bubungan Tinggi dan Kelengkapannya", 1992/1993)

Pola hiasan Rumah Bubungan Tinggi berdasarkan teknik pengerjaannya dibuat dengan 3 teknik pengerjaan yaitu

- a. Teknik ukiran relief. Teknik ukiran relief adalah teknik mengukir dengan cara melubangi sesuai dengan motif yang ingin diwujudkan. Lubang dibuat hingga kedalaman tertentu/separuh tebal bidang yang diukir, biasanya bidang berupa bidang datar atau sisi-sisi bidang. Hasil dari teknik ukiran relief ini dapat dianalogikan bagai gambar satu dimensi;
- b. Teknik ukiran tembus. Teknik ini serupa dengan teknik ukiran relief, namun lubang ukiran dibuat hingga menembus bidang yang diukir. Pembuatan teknik ukiran tembus diawali dengan menggambarkan pola motif di atas bidang yang akan diukir dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari kertas. Selanjutnya bidang yang diukir dipotong menggunakan gergaji tembus. Pada tahapan ini motif sudah dapat terlihat, namun belum berbentuk simbolisasi yang utuh. Berikutnya dengan menggunakan peralatan ukir yang menyerupai alat pahat, seluruh permukaan diukir seperti pada saat membuat ukiran relief. Dengan teknik ini ukiran bisa dilihat dari 2 sisi dan menjadikan bentuk terlihat 2 dimensional; dan

- c. Teknik ukiran berupa. Teknik ukiran berupa sebenarnya juga mengukir pada permukaan bidang sebagaimana teknik ukiran relief namun karena bidang yang diukir merata di seluruh permukaan sehingga menyerupai bentuk sepenuhnya dari obyek yang disimbolisasikan. Ukiran ini menjadikan obyek terlihat secara 3 dimensional (Bani, dkk. 2008 : 39 – 41).

Ukiran sebagai sarana penyampaian suatu maksud tentunya diupayakan dengan penyimbolan yang sesuai. Penyimbolan melalui (metode) ukiran ini menciptakan berbagai wujud bentuk yang menjadi ciri khas dari setiap kebudayaan. Dalam setiap kebudayaan simbol yang ingin disampaikan sangat dipengaruhi oleh sejarah pembentukan histori dan kepercayaan (religi). Ukiran dalam arsitektur rumah bubungan tinggi diwujudkan melalui berbagai motif antara lain, motif flora, fauna, unsur kehidupan serta geometris.

### 2..3.1 Motif Flora

Beberapa ukiran motif flora pada rumah bubungan tinggi antara lain bunga melati. Ukiran bunga melati relatif banyak ditemukan dalam ukiran rumah bubungan tinggi. Dalam perwujudannya, bunga melati ditampilkan meliputi seluruh bagiannya, yaitu bagian bunga, bagian daun dan bagian batang. Makna melati diibaratkan bahwa agama islam yang pada waktu itu masih sedikit pengikutnya adalah seperti melati yaitu kendati kecil, mampu memberikan keharuman disekitarnya. Melati dibuat saling berhubungan yang dimaksudkan agar semua orang di sekitarnya dapat hidup rukun walaupun berbeda agama.



Foto 1. Motif flora bunga melati pada pagar rumah bubungan tinggi

### 2.3.2 Motif Fauna

Motif fauna pada rumah bubungan tinggi biasanya ditempatkan pada bagian atap bangunan. Perwujudan motif fauna dalam arsitektur rumah bubungan tinggi menggunakan teknik pengerjaan ukiran tembus. Motif fauna tersebut merupakan stilisasi dari flora yang digubah sedemikian rupa hingga menampilkan perwujudan hewan yang ingin ditampilkan.



Foto 2. Simbolisasi fauna (ayam jago) dengan elemen flora

### 2.3.3 Motif Geometris

Motif geometris merupakan motif yang mengambil bentuk dasar segi empat, lingkaran, dan segitiga. Dalam rumah bubungan tinggi di desa teluk selong Ulu gambaran motif geometris yang ada berupa Kaligrafi. Pola ini berupa tulisan beraksara Arab. Motif kaligrafi tersebut berisi kalimat mulia seperti Asma Allah, Rosulullah Muhammad SAW serta kalimat sahadat yang menunjukkan pengakuan diri terhadap Allah SWT.

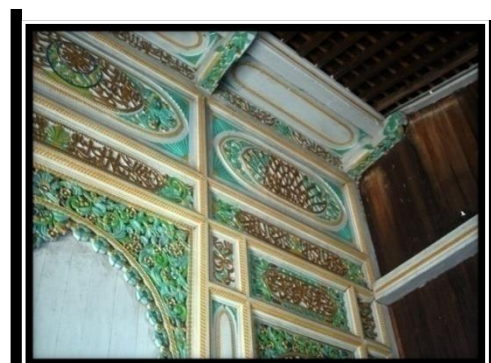


Foto 3. Ornamen kaligrafi pada rumah bubungan tinggi



Seluruh ukiran kaligrafi dalam rumah bubungan tinggi diletakkan pada bagian ruangan publik atau ruangan yang mudah terlihat. Keletakan ornamen kaligrafi berada pada area yang digunakan untuk menerima tamu tepatnya di dinding pembatas (*tawing halat*) antara kelompok ruang tamu dengan kelompok ruang hunian. Keletakan ukiran pada dinding pembatas ini jelas dimaksudkan untuk menjadi *point of interest* bagi setiap tamu yang berkunjung.

## 2.2 Nilai Arkeologis Rumah Bubungan Tinggi

Aspek bentuk, ruang, dan waktu tidak bisa dilepaskan dalam suatu bangunan rumah adat. Selain itu bentuk dan fungsi dari rumah adat juga tidak sembarangan dalam pembuatannya dimana hal tersebut merupakan suatu penanda atau ciri suatu masyarakat pendukungnya tersebut.

Meskipun orang Banjar sudah memeluk Islam, namun dalam kegiatan sehari-hari yang sehubungan dengan kebudayaan masih melekat unsur animisme, Hindu-Buddha yang berkembang sebagai dasar adat pada masa lalu. Akan tetapi hal itu tidak secara keseluruhan. Religi yang dianggap asal adalah dari Kaharingan yang dikembangkan oleh orang Dayak. Pengaruh Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen tidak berarti kepercayaan nenek moyang dengan segala upacara religinya hilang begitu saja. Orang-orang Dayak yang telah memeluk Islam dianggap sebagai Suku Bangsa Banjar dan tidak lagi menganggap dirinya sebagai suku Dayak. Suku Banjar hampir semua sendi keagamaannya didasarkan pada sentimen keagamaan yang bersumber pada ajaran Islam. Jadi setiap rumah tangga memiliki peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan keagamaan. Demikian pula pada rumah tradisional Banjar banyak dilengkapi dengan ukiran yang berkaitan dengan persaudaraan, persatuan, kesuburan, maupun *khat-khat* kaligrafi Arab yang bersumber dari ajaran Islam seperti dua kalimat syahadat, nama-nama Khalifah, Shalawat, atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Namun ukiran-ukiran di rumah Banjar juga masih ada yang berhubungan dengan kepercayaan Kaharingan, Animisme, Dinanisme, maupun Hindu-Buddha, misalnya swastika, enggang, naga dan sebagainya

Pemisahan jenis dan bentuk rumah Banjar sesuai dengan filsafat dan religi yang bersumber pada kepercayaan Kaharingan pada suku Dayak bahwa alam semesta yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam atas dan alam bawah. Rumah Bubungan Tinggi merupakan lambang mikrokosmos dalam makrokosmos yang besar. Penghuni seakan-akan tinggal di bagian dunia tengah yang diapit oleh dunia atas dan dunia bawah. Di rumah mereka hidup dalam keluarga besar, sedang kesatuan dari dunia atas dan dunia bawah melambangkan Mahatala dan Jata (suami dan isteri). rumah Bubungan Tinggi melambangkan berpadunya Dunia Atas dan Dunia Bawah

Pada peradaban agraris, rumah dianggap keramat karena dianggap sebagai tempat bersemayam secara ghaib oleh para dewata seperti pada rumah Balai suku Dayak Bukit yang berfungsi sebagai rumah ritual. Pada masa Kerajaan Negara Dipa sosok nenek moyang diwujudkan dalam bentuk patung pria dan wanita yang disembah dan ditempatkan dalam istana. Pemujaan arwah nenek moyang yang berwujud pemujaan Maharaja Suryanata dan Puteri Junjung Buih merupakan simbol perkawinan (persatuan) alam atas dan alam bawah Kosmogoni Kaharingan-Hindu. Suryanata sebagai manifestasi dewa Matahari (Surya) dari unsur kepercayaan Kaharingan-Hindu, matahari yang menjadi orientasi karena terbit dari ufuk timur selalu dinantikan kehadirannya sebagai sumber kehidupan, sedangkan Puteri Junjung Buih berupa lambang air, sekaligus lambang kesuburan

tanah berfungsi sebagai Dewi Sri di Jawa. Pada masa tumbuhnya kerajaan Hindu, istana raja merupakan citra kekuasaan bahkan dianggap ungkapan berkat dewata sebagai pengejawantahan lambang Kosmos Makro ke dalam Kosmos Mikro. Puteri Junjung Buih sebagai perlambang "dunia Bawah" sedangkan Pangeran Suryanata perlambang "dunia atas". Pada arsitektur Rumah Bubungan Tinggi pengaruh unsur-unsur tersebut masih dapat ditemukan. Bentuk ukiran naga yang tersamar/didestilir (*bananagaan*) melambangkan "alam bawah" sedangkan ukiran burung enggang melambangkan "alam atas".

Wujud bentuk rumah Banjar Bubungan Tinggi dengan atapnya yang menjulang ke atas merupakan citra dasar dari sebuah "pohon hayat" yang merupakan lambang kosmis. Pohon Hayat merupakan pencerminan dimensi-dimensi dari satu kesatuan semesta. Ukiran tumbuh-tumbuhan yang subur pada Tawing Halat (Seketeng) merupakan perwujudan filosofi "pohon kehidupan" yang oleh orang Dayak disebut Batang Garing dalam kepercayaan Kaharingan yang pernah dahulu berkembang dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan pada periode sebelumnya.

Wujud bentuk rumah Banjar Bubungan Tinggi dengan atapnya yang menjulang ke atas merupakan sebuah citra dasar sebuah payung yang menunjukkan suatu orientasi kekuasaan ke atas. Payung juga menjadi perlambang kebangsawanan yang biasa menggunakan "payung kuning" sebagai perangkat kerajaan. Payung kuning sebagai tanda-tanda kemartabatan kerajaan Banjar diberikan kepada para pejabat kerajaan di suatu daerah.

Wujud bentuk rumah Banjar Bubungan Tinggi yang simetris, terlihat pada bentuk sayap bangunan atau anjung yang terdiri atas Anjung Kanan dan Anjung Kiwa. Hal ini berkaitan dengan filosofi simetris (seimbang) dalam pemerintahan Kerajaan Banjar, yang membagi kementerian, menjadi Mantri Panganan (Kelompok Menteri Kanan) dan Mantri Pangiwa (Kelompok Menteri Kiri), masing-masing terdiri atas 4 menteri, Mantri Panganan bergelar 'Patih' dan Mantri Pangiwa bergelar 'Sang', tiap-tiap menteri memiliki pasukan masing-masing. Konsep simetris ini tercermin pada rumah bubungan tinggi.

Pada rumah Banjar Bubungan Tinggi (istana) terdapat ruang Semi Publik yaitu Serambi atau surambi yang berjenjang letaknya secara kronologis terdiri dari surambi muka, surambi sambutan, dan terakhir surambi Pamedangan sebelum memasuki pintu utama (Lawang Hadapan) pada dinding depan (Tawing Hadapan) yang diukir dengan indah. Setelah memasuki Pintu utama akan memasuki ruang Semi Private. Pengunjung kembali menapaki lantai yang berjenjang terdiri dari Panampik Kacil di bawah, Panampik Tengah di tengah dan Panampik Basar di atas pada depan Tawing Halat atau "dinding tengah" yang menunjukkan adanya tata nilai ruang yang hierarkis.

Ruang Panampik Kecil tempat bagi anak-anak, ruang Panampik Tengah sebagai tempat orang-orang biasa atau para pemuda dan yang paling utama adalah ruang Panampik Basar yang diperuntukkan untuk tokoh-tokoh masyarakat, hanya orang yang berpengetahuan luas dan terpandang saja yang berani duduk di area tersebut. Hal ini menunjukkan adanya suatu *tatakrama* sekaligus mencerminkan adanya pelapisan sosial masyarakat Banjar tempo dulu yang terdiri dari golongan berdarah biru disebut Tutus Raja (bangsawan) dan lapisan bawah adalah golongan Jaba (rakyat) serta di antara keduanya adalah golongan rakyat biasa yang telah mendapatkan jabatan-jabatan dalam kerajaan beserta kaum hartawan

Ruang dalam rumah Banjar Bubungan Tinggi terbagi menjadi ruang yang bersifat private dan semi private. Di antara ruang Panampik Basar yang bersifat semi private dengan ruang Palidangan yang bersifat private dipisahkan oleh Tawing Halat artinya "dinding pemisah", kalau di daerah Jawa disebut Seketeng. Jika ada selamatan maupun *menyampir* (nanggap) Wayang Kulit Banjar maka pada Tawing Halat ini bagian tengahnya dapat dibuka sehingga seolah-olah suatu garis pemisah transparan antara dua dunia (luar dan dalam) menjadi terbuka. Ketika dilaksanakan "wayang sampir" maka Tawing Halat yang menjadi pembatas antara "dalam" (Palidangan) dan luar (Paluaran/Panampik Basar) menjadi terbuka. Raja dan keluarganya serta dalang berada pada area "dalam" menyaksikan anak wayang dalam wujud aslinya sedangkan para penonton berada di area "luar" menyaksikan wayang dalam bentuk bayang-bayang.

### 3. Pelestarian Rumah Bubungan Tinggi

Rumah bubungan tinggi secara arsitektural dan arkeologis memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Keunikan Rumah bubungan tinggi perlu untuk dilestarikan sebagai bagian dari arsitektur tradisional di Kalimantan Selatan. Upaya pelestarian tersebut tidak hanya melindungi dan menjaga bangunan rumah dari faktor kerusakan dan pelapukan namun bagaimana suatu bangunan tersebut memberi nilai ekonomis dan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pelestarian menurut UU No. 11 Tentang Cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Menilik hal tersebut rumah bubungan tinggi sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, konsep pelestarian tidak hanya mencakup pelindungan saja namun diperlukan juga pengembangan dan pemanfaatannya sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Konsep manajemen sumber daya arkeologi sama halnya dengan konsep manajemen sumber daya budaya secara umum dan sumber daya manusia atau sumber daya alam serta sumber daya lingkungan, yaitu bagaimana mengelola sumber daya tersebut secara arif, bijaksana agar dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Hal ini secara khusus dinyatakan oleh Haryono (2003:9) yang mengingatkan bahwa perkembangan pariwisata yang secara langsung berkaitan dengan perkembangan ekonomi sebagai salah satu sumber devisa negara, tidak akan ada artinya jika keselamatan warisan budaya tersebut tidak terjaga. Hubungan resiprokal antara pelestarian dan pemanfaatan, khususnya pariwisata sekaligus merupakan dua kepentingan yang strategis. Kerangka pemikiran untuk mendekati persoalan resiprokal adalah konsep *peddle or perish* (Macleod, 1977:63-72) yang menyatakan bahwa benda cagar budaya dapat terancam kelestariannya apabila tidak dimanfaatkan (Riyanto S., 2006:26).

Masyarakat pada hakekatnya adalah pemegang penuh hak atas pemanfaatan sumber daya arkeologi. Mereka pada dasarnya yang akan memberikan makna sumber daya arkeologi tersebut, baik untuk identitas, media hiburan atau hobi, sarana rekreasi, dan untuk kepariwisataan. Namun demikian, sumber daya arkeologi dapat pula dimaknai secara berbeda sesuai dengan orientasinya misalnya untuk media pendidikan atau ilmu pengetahuan, bahkan sebagai peneguhan jati diri bangsa (Macleod, 1977:65, Cleere, 1989:7-10).

Pengembangan dan pemanfaatan kawasan teluk selong (rumah bubungan tinggi dan sekitarnya) dengan memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang sejarah dan nilai budaya merupakan upaya pelestarian sumber daya budaya di daerah ini. Pengembangan dengan membangun pusat informasi dapat bermanfaat untuk kepentingan ideologik, akademik, dan ekonomik.

Potensi rumah bubungan tinggi sebagai tempat wisata sejarah sangat sangat besar, mengingat tidak jauh dari rumah bubungan tinggi terdapat pula rumah gajah baliku. Lokasi rumah juga sekitar 20 menit dari pusat perbelanjaan batu permata (martapura) atau sekitar 45 menit dari bandar udara Syamsudin Noor. Hal ini menandakan bahwa Desa Teluk Selong Ulu pada masa lalunya merupakan salah satu daerah pemukiman kuno yang terbantar di tepian sungai.

Berdasarkan konsep pelestarian serta manajemen sumberdaya arkeologi yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal yang kiranya bisa diterapkan di rumah bubungan tinggi sebagai upaya menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pelestarian, sejarah dan arsitektur yang melekat pada rumah bubungan tinggi, antara lain :

1. Pengembangan kawasan Desa Teluk Selong sebagai objek wisata sejarah arsitektur
2. Perkuatan pusat informasi mengenai arsitektur rumah bubungan tinggi khususnya dan perkembangan rumah adat banjar di wilayah Kalimantan Selatan
3. Penataan lingkungan sekitar bangunan rumah bubungan tinggi supaya meminimalisir kerusakan dan pelapukan bangunan
4. Pemugaran pada bagian yang kiranya mengalami kerusakan untuk meminimalisir
5. Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan rumah bubungan tinggi sebagai objek wisata sejarah agar masyarakat juga memiliki kepedulian dan rasa cinta akan tinggalan leluhur
6. Penyebarluasan informasi mengenai arsitektur rumah bubungan tinggi melalui media massa maupun dengan kunjungan langsung ke lapangan.

#### **4. Penutup**

Keunikan dan ciri khas rumah bubungan tinggi perlu untuk dilestarikan. Pemanfaatan sebagai obyek wisata sejarah kiranya merupakan salah satu cara dalam meningkatkan nilai dan informasi mengenai arti pentingnya pelestarian cagar budaya (rumah bubungan tinggi). Rumah bubungan tinggi hampir punah dan jarang ditemui lagi di Kalimantan Selatan. Peningkatan informasi dengan dijadikannya salah satu tujuan wisata kiranya akan berdampak positif bagi penguatan dan pengenalan kearifan lokal karya nenek moyang. Pengembangan dan pemanfaatan sebagai daerah tujuan wisata juga perlu memperhatikan kondisi bangunan supaya dalam pemanfaatannya sehingga tidak merusak cagar budaya tersebut.

Paradigma baru dalam pengelolaan potensi sumber daya arkeologi di Indonesia tidak hanya terbatas pada penilaian arti pentingnya tinggalan arkeologi dan situs untuk dijadikan sebagai sumber daya arkeologi tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan bagaimana manajemen sumber daya tersebut agar dapat di pahami dan diberdayakan oleh masyarakat umum tidak hanya oleh para peneliti.

## DAFTAR PUSTKA

- Anonim. 2010. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- \_\_\_\_\_. 2009. Kabupaten Banjar Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.
- Bani Noor Muchamad, Ira Mentayani. 2007. *Anatomi Rumah Bubungan Tinggi*. Banjarmasin: Pustaka Banua
- Mohamad Idwar Saleh, Rumah tradisional Banjar, rumah bubungan tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan, 1980
- Sunarningsih. 2009. Ragam Hias Seni ukir Pada Bangunan tradisional Banjar : Dulu dan Sekarang. *Naditira widya Volume 2 Nomor 1*. Balai Arkeologi Banjarmasin
- Tjahjono, Gunawan. 2010. Membangun Diri dan Mandiri Bangunan Dalam Pembuatan Rumah Adat Di Desa Wae Rebo : Suatu pengantar. *Pesan Dari Wae Rebo (kelahiran kembali Arsitektur Nusantara Sebuah Pelajaran Dari Masa Lalu untuk Masa Depan)*. Jakarta : Gramedia pustaka Utama.

## INTERNET

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Banjar](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Banjar)
- <http://kab.banjar.bps.go.id/>
- <http://dinaspariwisata.banjarmasin.go.id>
- <http://www.wikipedia.com>
- <http://www.radarbanjarmasin.co.id/index.php/berita/detail/59/874>

# Pemanfaatan dan Pengembangan Bangunan Keraton Sadurangas

Oleh: Drs. I Made Kusumajaya, M.Si dan Eko Budi Hartono, SS

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang



Gambar 1  
Lambang Kabupaten Paser

Kabupaten Paser adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang letaknya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya alam berupa sumberdaya alam biotik (terbaharukan) maupun sumberdaya alam abiotik (tidak terbaharukan). Kata Paser diambil dari nama kerajaan yang pernah ada di bumi Paser yaitu kerajaan Sadurangas pada abad 15 M. Proses masuknya Islam abad ke 17 M telah merubah sistem pemerintahan yang pada awalnya kerajaan menjadi kesultanan.

Kabupaten Paser awalnya adalah daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum UU 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Paser berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara, dan Penetapan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14. Lahirnya UU Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah Swatantra Tingkat II Paser dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 3 Agustus 1961, Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan ke dalam Wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakan serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto di Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Melalui perjuangan Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi dan Wakil H.M. Hatta Garit waktu itu, Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007. (anonim, 2012, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Paser](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Paser))

### 1.2 Tinjauan Geografis dan Faktor Ekologi Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling selatan, tepatnya pada posisi 00 45'18,37" - 20 27'20,82" LS dan 115 36'14,5" -166 57'35,03" BT. Kabupaten Paser terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kecamatan dengan 125 buah desa/kelurahan (data sampai tahun 2008).



Peta 2  
Keletakan Kabupaten Paser

Secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu:

bagian timur, merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang. Daerah ini memanjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar di bagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan Negara Penajam- Kedeman- Kuaro dan Kuaro Batu Aji sebagai batas topografi.

Bagian barat, merupakan daerah bergelombang hingga berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Tengah. Secara geografis posisi Kabupaten Paser cukup strategis disamping memiliki sungai lebar yang mampu dilayari oleh kapal hingga masuk pedalaman juga memiliki garis pantai yang cukup panjang yang memungkinkan didarati oleh kapal-kapal dagang yang singgah di kawasan ini. Paser menjadi salah satu penghasil Rotan dan hasil bumi lainnya, yang membuat Pemerintah Belanda terpancing untuk datang langsung ke sumber penghasil komoditas hutan tersebut. Bahkan pada masa yang lebih tua pada abad ke-12 M kerajaan Majapahit juga telah menjadikan wilayah ini menjadi salah satu kerajaan bawahannya yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan upeti.

### 1.3 Tinjauan Sejarah Kabupaten Paser

#### 1.3.1 Sejarah Kerajaan Sadurangas

Kesultanan Paser Balengkong pada awalnya adalah sebuah kerajaan yang berdiri karena pada abad ke-



Gambar 6

Keraton Paser tahun 1932

Sumber Foto : <http://sejarahpaser.blogspot.com/>

15 M terjadi kekacauan politik di Kerajaan Kuripan, Kalimantan Selatan. Letak Kerajaan ini diperkirakan identik dengan salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, tetapi menurut sumber lain, Kuripan berada di sekitar Amuntai sekarang.

Kekacauan politik ini menyebabkan dua orang panglima dari kerajaan Kuripan yaitu Temenggung Duyung dan Temenggung Tuki meninggalkan kerajaan dan mencari daerah baru untuk ditinggali. Pada perjalanannya ini mereka menuju arah timur dengan membawa seorang bayi, puteri salah seorang bangsawan kerajaan yang bernama Aria Manau. Tidak selang berapa lama, Aria Manau menyusul kedua panglima yang telah menyelamatkan puterinya dan bermukim bersama di tempat yang baru dibuka oleh Temenggung Duyung dan Temenggung Tuki. Masyarakat di sekitar tempat tersebut tidak mengetahui nama asli dari Aria Manau, kemungkinan nama aslinya memang dirahasiakan karena pertikaian yang terjadi di kerajaan Kuripan sebelumnya. Masyarakat hanya mengenal Aria Manau sebagai Kakah Ukop dan istrinya dipanggil dengan sebutan Itak Ukop atau kakek/nenek yang memelihara Ukop. Aria Manau memang memelihara seekor kerbau putih yang diberi nama Ukop. Puteri Aria Manau yang dulu diselamatkan Temenggung Duyung dan Temenggung Tuki diberi nama Puteri Petung.

Daerah yang ditinggali oleh Aria Manau atau Kakah Ukop semakin berkembang sehingga dibutuhkan suatu sistem yang mengatur masyarakat dalam bentuk pemerintahan. Bentuk ini akan mempunyai aturan tidak hanya berdasar pada aturan normatif dan aturan moral. Aturan yang dibutuhkan adalah aturan dasar yang bersifat mengikat dan dilandasi pada kebutuhan bersama. Aturan positif pada sebuah sistem juga akan disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Atas dasar tersebut maka masyarakat menyepakati untuk membuat sebuah sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Dalam kesepakatan tersebut kakah Ukop ditugaskan untuk menjadi semacam ketua dalam membentuk sistem pemerintahan tersebut. Dalam mitos tentang Puteri Petung dikisahkan bahwa Kakah Ukop berlayar ke daerah seberang lautan untuk mencari raja yang akan berkuasa. Dalam pelayaran tersebut Kakah Ukop menemukan sebuah bambu Petung yang didalamnya terdapat sebutir telur dan ketika telur tersebut menetas, maka yang ada di dalam telur tersebut adalah seorang puteri yang diberi nama Puteri Petung.

Dalam hal ini, kemungkinan Aria Manau sengaja dipilih untuk dijadikan raja karena darah kebangsawanan yang dibawanya dari Kuripan, akan tetapi karena usia yang sudah lanjut (ini bisa dibuktikan dengan panggilan Kakah atau Kakek pada Aria Manau) maka Aria Manau melimpahkan pada puterinya yang sudah berusia 22 tahun. Kepemimpinan pada masa-masa tersebut sangat memperhitungkan masalah trah atau garis keturunan. Garis keturunan ini sangat penting karena seseorang akan sangat dihormati dan dihargai dari garis keturunannya. Seseorang yang memiliki garis keturunan bangsawan dianggap memiliki prabha atau cahaya kedewataan sehingga masyarakat pada umumnya sangat menghormatinya. Dalam beberapa sumber nama asli dari Puteri Petung adalah Sri Sukma Dewi. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan\\_Paser](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Paser) dan [http://kesultanan\\_pasir.tripod.com/Sadurangas/id10.htm](http://kesultanan_pasir.tripod.com/Sadurangas/id10.htm))

Setelah Puteri Petung diangkat menjadi raja, maka kerajaan yang baru dibentuk diberi nama "Kerajaan Sadurangas" atau berarti Inti Kekuatan, hal ini tersebut dalam buku sejarah singkat Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser oleh Haji Aji Padang Arjan disebutkan bahwa pendirian kerajaan Sadurangas tersebut diyakini pada tahun 921 Hijriyah atau 1516 Masehi. Setelah memerintah Kerajaan Paser dalam jangka waktu tertentu, Puteri Petung akhirnya menikah dengan seorang Pangeran dari Giri (identik dengan Gresik), Jawa yang bernama Pangeran Abu Mansyur Indera Jaya.





Gambar 7

Kehidupan masyarakat Paser pada tahun 1930an  
Sumber Foto : <http://sejarahpaser.blogspot.com/>

Dikisahkan bahwa Pangeran Abu Mansyur ini adalah seorang Pangeran dari Giri yang datang ke Kerajaan Sadurangas dengan menaiki sebuah perahu. Batu pemberat dari perahu/kapal tersebut dikenal dengan nama Batu Giri karena dibawa oleh Indera Jaya atau Abu Mansyur Indera Jaya maka oleh masyarakat dikenal dengan nama Batu Indera Giri. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dikeramatkan oleh masyarakat.

Kedatangan Pangeran dari Giri kemungkinan besar dilandasi oleh semangat penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku dan merupakan putera dari salah satu ulama besar di tanah Jawa yang bernama Syeh Maulana Ishak dan berasal dari Samarkhan Uzbekistan

Seperti diketahui Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo (Sembilan Wali) yang dianggap sebagai Wali Allah yang berada di Tanah Jawa. Salah satu tugas para wali tersebut adalah menyebarkan Islam ke segenap penjuru negeri. Dalam menyebarkan agama Sunan Giri membuat sebuah pesantren di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik - Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Karena didirikan di perbukitan, pesantren tersebut dikenal sebagai pesantren Giri, Raden Paku (nama asli Sunan Giri) dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri.

Pernikahan antara Puteri Petung dengan Pangeran Abu Mansyur Indera Jaya dikaruniai tiga orang putera dan puteri yaitu :

1. Aji Mas Pati Indera Jaya
2. Aji Mas Arum Indera
3. Aji Meter (puteri)

Puteri dari Pangeran Abu Mansyur Indera Jaya dan Puteri Petung menikah dengan seorang keturunan Arab dari Mempawah, Kalimantan Barat yang bernama Said Ahmad Chairuddin. Pernikahan keluarga kerajaan dengan penyebar Islam menjadi bukti nyata proses penyebaran agama Islam di kerajaan Sadurangas. Proses dilakukan oleh para penyebar Islam yang menggunakan jalur perkawinan dengan anggota kerajaan sebagai cara dalam menyebarkan Islam itu sendiri. Apabila raja dari sebuah komunitas memeluk agama baru, maka masyarakat pendukungnya akan ikut serta untuk memeluk agama baru tersebut. Kedatangan Islam di Paser diketahui dari berbagai tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Palayaran Mencari Raja Tanah Paser". Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul "Sejarah Kerajaan Kutai dan Kesultanan Paser" tanpa tahun. Sumber yang lain dapat ditelusuri dari sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C Knappert dengan judul "*Tijdschrift voor nedederland Indie 1883*"

Pada masa pemerintahan Puteri Petung, Kesultanan Paser terkenal sebagai kerajaan yang makmur dan menjadi penghasil beras bagi daerah-daerah lainnya. Hubungan perdagangan dengan daerah luar terjadi dengan bebas. Arus kedatangan pendatang juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pernikahan Puteri Petung dan puterinya dengan pendatang dari luar. Sungai Kandilo yang berhubungan langsung dengan laut (selat Makasar) menjadi akses utama bagi pelayaran dari dan menuju ke daerah-daerah lainnya. Alur sungai yang lebar dan kedalamannya menjadikan kapal-kapal besar bisa masuk ke daerah pedalaman.

Puteri Petung kemudian digantikan oleh puteranya yang bernama Aji Mas Pati Indera. Tahta kerajaan kemudian diteruskan oleh Aji Mas Anom Indera yang merupakan putera dari Aji Mas Pati Indera. Berikut ini adalah daftar nama raja yang berkuasa di Kerajaan Sadurangas dan Kesultanan Paser Balengkong.

### **1.3.2 Latar belakang berdirinya Kerajaan Sadurangas**

Dalam uraian tentang sejarah Kerajaan Sadurangas di atas, disebut adanya kerajaan lain yang menjadi cikal bakal Kerajaan Sadurangas. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kuripan yang sekarang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam beberapa sumber dinyatakan bahwa Kerajaan Kuripan, atau disebut pula Kahuripan, adalah kerajaan kuno yang beribukota di kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kerajaan Kuripan berlokasi di sebelah hilir dari negeri Candi Agung (Amuntai Tengah).

Diduga pusat pemerintahan kerajaan ini berpindah-pindah di sekitar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong saat ini. Kabupaten Tabalong terletak di sebelah hulu dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena di kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara sungai Bahan/sungai Negara bercabang ke arah hulunya menjadi dua yaitu daerah aliran sungai Tabalong dan daerah aliran sungai Balangan. Menurut kebiasaan di Kalimantan, penamaan sebuah sungai biasanya berdasarkan nama kawasan yang ada di sebelah hulunya. Karena itu penamaan sungai Tabalong berdasarkan nama daerah yang ada di sebelah hulu dari sungai tersebut, yang pada zaman Hindia Belanda disebut Distrik Tabalong. Sungai Tabalong adalah anak sungai Bahan, sedangkan sungai Bahan adalah anak sungai Barito yang bermuara di selat Makasar.

Diduga nama Kerajaan Kuripan adalah sebutan lain dari Kerajaan Tabalong yang disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis pujangga Majapahit yakni Mpu Prapanca pada tahun 1365. Sebutan Kerajaan Tabalong berdasarkan nama kawasan dimana kerajaan tersebut berada. Sedangkan nama Kuripan mungkin nama ibukotanya saat itu. Nama Kuripan diduga adalah nama lama kota Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di sekitar muara Sungai Tabalong.

Pada abad 15 disebutkan terjadi kekacauan politik di Kerajaan Kuripan sehingga banyak pembesar-pembesarnya yang meninggalkan Kuripan dan membentuk daerah baru. Daerah-daerah baru yang dibuka dan dijadikan pemukiman oleh pembesar Kerajaan Kuripan ini adalah Kerajaan Dipa. Kerajaan Dipa ini berpindah dan kemudian berubah jadi Kerajaan Daha yang merupakan pendahulu dari Kerajaan Banjar. Sementara itu, pembesar lain dari Kerajaan Kuripan mendirikan kerajaan Sadurangas di wilayah timur Kerajaan Kuripan. Pembesar tersebut adalah Aria Manau yang dikenal dengan nama Kakah Ukop dan mempunyai puteri bernama Sri Sukma Dewi atau dikenal dengan nama Puteri Petung (puteri dalam bambu petung).

Dari penjelasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa kerajaan Sadurangas adalah kerajaan baru yang didirikan di atas pemukiman yang dibuka oleh seorang pembesar/bangsawan dari Kerajaan Kuripan. Kekacauan secara politik di Kerajaan Kuripan menjadikan para bangsawannya meninggalkan kerajaan dan membuka daerah baru atau memindahkan kerajaan dengan nama baru. Bila ditilik dari beberapa terjemahan Hikayat Banjar Kerajaan Kuripan adalah kerajaan pendahulu dari kerajaan-kerajaan di wilayah Kalimantan Selatan yang kemudian bermuara pada Kesultanan Banjar. Jadi dapat dikatakan bahwa kekacauan politik di Kerajaan Kuripan tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan para pembesarnya menyelamatkan diri dan memindahkan kerajaan ke daerah lain dengan nama baru.

### **1.3.3 Masuknya Islam di Kerajaan Sadurangas**

Pada akhir abad 14 kekuatan Islam semakin besar, hampir seluruh kerajaan-kerajaan di pulau Jawa (terutama kerajaan di pantai utara Jawa) sudah berubah fundamental ideologisnya dari Hindu-Budha menjadi kerajaan Islam. Perkembangan Islam yang luas ini juga mulai melebar ke luar pulau Jawa baik itu di pulau Sumatera maupun Kalimantan. Utusan-utusan maupun ekspedisi dakwah banyak dilakukan untuk mengajak para raja-raja di kepulauan Indonesia. Salah satu ulama yang paling bersemangat dalam melakukan ekspedisi dakwah adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Sunan Giri dari Kedaton Giri (sekarang Gresik – Jawa Timur).

Salah satu ekspedisi yang dilakukan adalah meng-Islamkan Kerajaan Sadurangas yang waktu itu diperintah oleh raja perempuan yaitu Puteri Petung yang merupakan raja pertama di kerajaan Sadurangas. Utusan Sunan Giri untuk mengIslamkan Kerajaan Sadurangas tersebut adalah Pangeran Abu Mansyur Indera Jaya. Perlu dipelajari lebih lanjut gelar Pangeran yang disematkan pada Pangeran Abu Mansyur Indera Jaya apakah gelar ini memang sudah disandang karena keturunan atau sebuah legitimasi karena pernikahannya dengan raja dari Kerajaan Sadurangas. Jalur pernikahan adalah sebuah cara yang ditempuh oleh Pangeran Abu Mansyur Indera Jaya untuk mempermudah proses dakwah yang dilakukannya.

Kesimpulannya adalah penyebaran Islam di kerajaan Sadurangas dilakukan oleh para ulama yang merupakan utusan langsung dari Kedaton Giri dan cara untuk mempermudah penyebaran Islam adalah dengan menggunakan jalur pernikahan dengan bangsawan kerajaan, dalam hal ini adalah raja dari kerajaan Sadurangas. Sehingga ketika raja dan keluarganya sudah memeluk Islam, maka dengan otomatis ideologi kerajaan akan diikuti oleh rakyatnya.

### **1.3.4 Perpindahan Ibukota Kerajaan Sadurangas**

Kerajaan Sadurangas mengalami perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya, akan tetapi ada persamaan dari setiap perpindahannya yaitu tetap berada di tepi sungai. Sungai adalah akses utama kerajaan Sadurangas dengan dunia luar baik itu di pulau Kalimantan maupun dengan pulau-pulau lain di luar pulau Kalimantan. Transportasi utama bagi masyarakat di pulau Kalimantan adalah perahu dan kapal. Sebagai salah satu akses transportasi, sungai-sungai di Kalimantan juga menjadi bagian dari perpindahan manusia dan barang baik itu dari aspek sosial budaya maupun aspek sosial ekonomi. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab

sebuah kerajaan memindahkan pusat pemerintahannya dari satu lokasi ke lokasi lain. Peperangan, ekonomi, akses atau penetrasi dari budaya luar adalah sebagian alasan perpindahan tersebut, pun demikian halnya dengan kerajaan Sadurangas. Analisa dari berbagai sumber yang bisa dihimpun daerah-daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan Sadurangas adalah :

1. Desa Lempesu (27 KM dari Tanah Grogot, Kaltim) merupakan pusat kerajaan untuk pertama kalinya
2. Gunung Sahari (1 Km sebelah selatan Museum Sadurangas terletak di Kec. Paser Belengkong, Kaltim)
3. Benuwo atau Benuo (Paser Belengkong, Kaltim)
4. Tanah Grogot (Paser, Kaltim)

### 1.3.5 Konflik Internal

Sebagai sebuah komunal, sebuah kerajaan tidak akan terlepas dari konflik internal, konflik ini bersumber pada berbagai macam penyebab. Inti dari setiap konflik adalah banyaknya kepentingan dalam keluarga dan bangsawan kerajaan.

Sudah banyak kerajaan yang mengalami kehancuran karena konflik yang berkepanjangan, contoh utamanya adalah kerajaan Singasari, Majapahit dan juga Kerajaan Pajang. Demikian juga dengan kerajaan Sadurangas, meskipun konflik tersebut tidak sampai membuat kerajaan tersebut hancur dan hilang dari tatanan sejarah bumi Paser.

Konflik-konflik tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Penyerangan dari Tanah Dusun yang menyebabkan Aji Anom Singa Maulana meninggal.**

Ada dua versi cerita tutur yang mengisahkan penyerangan dari Tanah Dusun. Versi pertama adalah versi dari Haji Aji Padang Arjan dalam buku "Sejarah Singkat Kerajaan Sadurangas dan Kesultanan Paser". Cerita versi Haji Aji Padang Arjan penyerangan ini adalah karena ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Aji Anom Singa Maulana yang sangat menyiksa rakyat untuk kepentingan pribadinya. Akibat penyerangan ini, Aji Anom Singa Maulana akhirnya meninggal dunia dan beruntung ketiga putera beliau dapat diselamatkan oleh Said Abdurahman yang menjadi guru ngaji bagi ketiga putera beliau.

Versi lain adalah versi Aji Budi Koriangsyah dalam sebuah forum di (<http://melayuonline.com/ind/history/dig/496/kesultanan-pasir>) yang menyatakan bahwa, penyerangan Tanah Dusun merupakan rangkaian konflik berkepanjangan di Kerajaan Kuripan, seperti dijelaskan bahwa pendiri kerajaan Sadurangas adalah berasal dari kerajaan Kuripan yang meninggalkan kerajaan ketika terjadi konflik.

Pada masa Panembahan Soeleman (pengganti Aji Anom Singa Maulana) kerajaan Sadurangas membalas serangan tersebut ke Tanah Dusun dengan dibantu oleh Kesultanan Banjar yang diperintah oleh Sultan Musta'in Billah dan memperoleh kemenangan.

#### **b. Penyerangan Andi Mappanyuki dari Bugis Panneki yang menyebabkan Panembahan Adam bunuh diri.**

Seperti halnya penyerangan oleh Tanah Dusun, penyerangan oleh Andi Mappanyuki ini juga bersifat eksternal, akan tetapi karena mengakibatkan raja Sadurangas pada waktu itu meninggal dunia dan terjadi pergantian kekuasaan dari Panembahan Adam ke adiknya yaitu Aji Geger. Pemindahan kekuasaan kepada adik beliau ini bukan karena Panembahan Adam tidak mempunyai putera akan tetapi dikisahkan bahwa Panembahan Adam melakukan bunuh diri beserta seluruh anak dan istrinya karena salah membaca bendera kemenangan yang dikibarkan dari kejauhan.

### **c. Perebutan kekuasaan pada masa Sultan Abdurrahman**

Kolonialis Belanda tidak akan pernah membiarkan sebuah kerajaan yang memiliki sumberdaya alam melimpah untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Belanda akan selalu berusaha memecah belah kerajaan tersebut agar raja yang memerintah mau dijadikan boneka kepentingan Belanda dalam mengeruk kekayaan alam dari daerah tersebut. Demikian juga dengan kerajaan Sadurangas, setelah masa pemerintahan Aji Tenggara dengan gelar Sultan Sepuh II Alamsyah, terjadi ketegangan diantara para keluarga raja.

Pasal ketegangan tersebut adalah wasiat dari Sultah Sepuh II yang menginginkan sistem pemilihan sultan di Sadurangas adalah dengan pengangkatan putera mahkota, berbeda dengan sistem sebelumnya yang mengangkat sultan melalui sidang majelis adat dan ulama. hal ini menimbulkan ketegangan diantara kepala-kepala wilayah yang merasa suaranya tidak lagi didengar. Ketegangan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk ikut campur dalam masalah internal kerajaan Sadurangas dan berharap keuntungan dari hal tersebut.

Belanda melalui *Resident Zuider En Ooster Afdeling Banjarmasin* memaksa majelis untuk mendukung pengangkatan putera dari Sultah Sepuh II sebagai Sultan. Dengan pemaksaan ini maka Aji Timur Balam menjadi Sultan Sadurangas dengan gelar Sultan Abdurrahman Syah.

## **1.4 Hubungan Kerajaan Paser Balengkong Dengan Dunia Luar**

Lokasi yang strategis yang didukung dengan sumber daya alam dan hutan yang memadai, menjadikan kerajaan Paser Balengkong menjadi daya tarik para pedagang untuk mengunjungi wilayah ini. Pengaruh-pengaruh dari luar menjadikan kerajaan ini semakin berkembang dalam bidang perdagangan.

### **1.4.1 Pengaruh Bugis Di Kerajaan Sadurangas**

Orang-orang Bugis sangat terkenal sebagai pelaut, pedagang dan prajurit yang handal. Sebagai pelaut mereka mampu membuat dan mengemudikan kapal yang bisa diandalkan untuk mengarungi perairan Indonesia bahkan mampu berlayar sampai ke beberapa wilayah Asia dan Afrika Barat. Sebagai pedagang mereka dikenal sangat ulet dan mampu berdagang di berbagai wilayah di Indonesia, dan sebagai perajurit orang-orang Bugis banyak dimanfaatkan sebagai prajurit diberbagai kerajaan.

Kemampuan ini telah menjadikan orang-orang Bugis menyebar ke berbagai wilayah Indonesia bahkan sampai ke semenanjung Malaya.

Penyebaran orang-orang Bugis di berbagai wilayah kerajaan di Kalimantan Timur sedikit banyak memberikan pengaruh yang kuat baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Di Berau terdapat prasasti kayu yang berbahasa Bugis kuno dan menjadi tata tertib kerajaan. Di Kutai Kartanegara suku Bugis (Wajo) mendapat hak atas pemukiman yang dikemudian hari menjadi Ibukota Kalimantan Timur yaitu Samarinda. Demikian juga di Kerajaan Sadurangas persentuhan antara orang-orang Sadurangas dengan orang-orang Bugis juga terjadi dan memberi pengaruh besar dalam berbagai hal.

Persentuhan orang-orang Bugis dengan kerajaan Sadurangas antara lain berdampak sebagai berikut :

a. Timbulnya Konflik/peperangan

Konflik ini terjadi antara kerajaan Sadurangas dengan orang-orang Bugis Panekki yang dipimpin oleh Andi Mappanyukki pada masa pemerintahan Panembahan Adam pada abad 17 M. Dikisahkan bahwa konflik terjadi karena lamaran Andi Mappanyukki terhadap Aji Rainah, putri dari Panembahan Adam ditolak dengan alasan Aji Rainah masih terlalu kecil untuk menikah. Penolakan ini tidak bisa diterima oleh Andi Mappanyuki dan menyerang kerajaan Sadurangas. Meski pada akhirnya serangan Andi Mappanyuki berhasil dikalahkan tetapi akibat dari hal ini Panembahan Adam meninggal dunia karena bunuh diri beserta seluruh keluarganya dan tahta kerajaan berpindah ke Aji Geger yang merupakan adik dari Panembahan Adam.

b. Pernikahan

Persentuhan kedua dengan Bugis adalah pernikahan antara puteri raja Kerajaan Sadurangas (Aji Moehamad Alamsyah dengan gelar Sultan Sepuh Alamsyah) yaitu Aji Doyah dengan seorang bangsawan dari Bugis Wajo yaitu Petta Sebarengkeng atau Andi Sebarengreng atau dikenal juga dengan Andi Sibangareng putera dari La Madukkeleng. Pernikahan ini menyebabkan secara geneokologi darah bangsawan Bugis sudah menyatu dengan darah bangsawan kerajaan Sadurangas. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh besar dalam ketatanegaraan kerajaan Sadurangas.

Selain pernikahan Aji Doyah dan Petta Sebarengkeng pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Alamsyah 1772 – 1798 M, terjadi hubungan kekerabatan lainnya dengan Kerajaan Wajo di Sulawesi Selatan. Salah satu Raja Wajo pada saat itu adalah seorang perempuan yang bersuamikan seorang keturunan Arab. Salah satu putera dari pernikahan tersebut adalah Said Taha Al-Idrus.

#### **1.4.2 Kekerabatan Kerajaan Sadurangas dan Kutai Kartanegara**

Secara geografis, keletakan kerajaan Kutai Kartanegara dan Kerajaan Sadurangas adalah berdampingan. Kedua kerajaan sangat memperhitungkan keletakan ini sejak awal kerajaan berdiri. Secara umum kedua kerajaan berada diantara kerajaan-kerajaan besar serta mempunyai hubungan dengan kerajaan di Jawa dan Sulawesi. apabila terjadi konflik diantara kedua kerajaan maka, akan dengan mudah dikuasai oleh kerajaan lainnya karena konflik yang terjadi akan melemahkan kedua kerajaan tersebut. Untuk itu maka hubungan kekerabatan dijalin untuk lebih mendekatkan kerja sama

kedua kerajaan, sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan saling menjaga. Dalam buku salasilah Kutai karangan D. Adham dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Aji Mandarsyah, terjadi pernikahan antara puteri raja Kutai Kartanegara dengan Temenggung Baya Baya dari Kerajaan Paser. Aji Mandarsyah adalah raja keempat kerajaan Kutai Kartanegara sementara tidak ada data yang signifikan mengenai Temenggung Baya Baya di kerajaan Sadurangas.

#### 1.4.3 Paser Dalam Negarakertagama

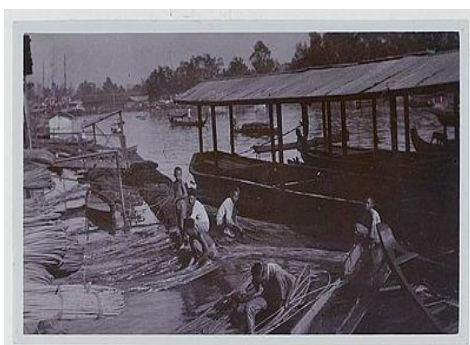
Kata Paser sudah tentu merujuk pada kata Paser atau Pasir. Wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang tinggi. Tingginya nilai sumberdaya alam ini tentu saja memicu kekuatan yang lebih besar untuk menguasainya. Salah satu kerajaan yang mempunyai sejarah panjang serta pernah berkuasa di seluruh pelosok nusantara bahkan ke wilayah lain di Asia Tenggara adalah kerajaan Majapahit. Sebagai sebuah kekuatan besar tentu saja potensi sumberdaya alam di wilayah Paser menjadi sasaran utama untuk dikuasai. Tidak ada data eksplisit yang dapat diungkap dari sumber data di Paser sendiri, akan tetapi dalam kitab Negarakertagama yang dibuat oleh Mpu Prapanca dengan jelas menyebutkan kata Pasir sebagai wilayah terkemuka di wilayah Tanjungpura (Kalimantan). Dalam Negerakertagama kata Pasir disebutkan pada pupuh ke-45 sebagai wilayah yang mengakui kebesaran Majapahit. Hal ini menjadi sebuah dasar bahwa Kerajaan Pasir pernah berhubungan dengan Kerajaan Majapahit dalam bentuk tertentu hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

#### 1.4.4 Potensi Sumberdaya Alam Paser Dalam Bidikan Kolonial Belanda

Sebagaimana Majapahit, Belanda mempunyai kepentingan di kerajaan Sadurangas terkait dengan tingginya potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh kerajaan Sadurangas. Rangkuman dari berbagai sumber yang menyebutkan komoditi yang dimiliki atau diperdagangkan di kerajaan Sadurangas antara lain adalah :

- |  |   |
|--|---|
| a. Emas  | e. Getah wangkang (?)                   |
| b. Damar ( <i>Agathis dammara</i> (Lamb.) Rich.) | f. Semambu ( <i>Calamus scipionum</i> ) |
| c. Karet ( <i>Hevea Braziliensis</i> )           | g. Madu lebah                           |
| d. Beras   | h. Lilin lebah                          |

Potensi sumberdaya di atas, terutama emas, damar, karet dan lilin adalah sumberdaya yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Potensi tersebut menjadi sasaran Belanda (VOC) untuk menguasai kerajaan Sadurangas.



Gambar 8

Rotan yang menjadi salah satu komoditi Paser incaran Belanda

Sumber Foto : <http://sejarahpaser.blogspot.com/>

Kontak pertama Belanda dengan Kerajaan Sadurangas terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Alamsyah 1808 – 1825 M. Kontak itu terjadi saat kapal niaga Belanda bernama BRIK bersandar di pelabuhan kerajaan serta melakukan perniagaan. Salah satu penumpang dalam kapal tersebut bernama Alexander Van Soow mengajukan permintaan untuk menemui

sultan dan menyampaikan keinginannya untuk membuat rumah atau gudang perniagaan di wilayah kerajaan Sadurangas. Keinginan tersebut dikabulkan dan didirikan di sebuah wilayah yang bernama Tana Garoro'e (yang kemudian berubah menjadi Tanah Grogot).

Kontak pertama tersebut dilanjutkan dengan oleh *Resident Zuid En Ooster Afdeeling Van Borneo* di Banjarmasin dengan mengajukan perjanjian jangka pendek (*Korteverklaring*) dan kemudian semakin lama menjadikan Belanda mulai makin jauh ikut campur dalam urusan dalam negeri Pasir.

#### 1.4.5 Hubungan Kesultanan Banjar dan Paser

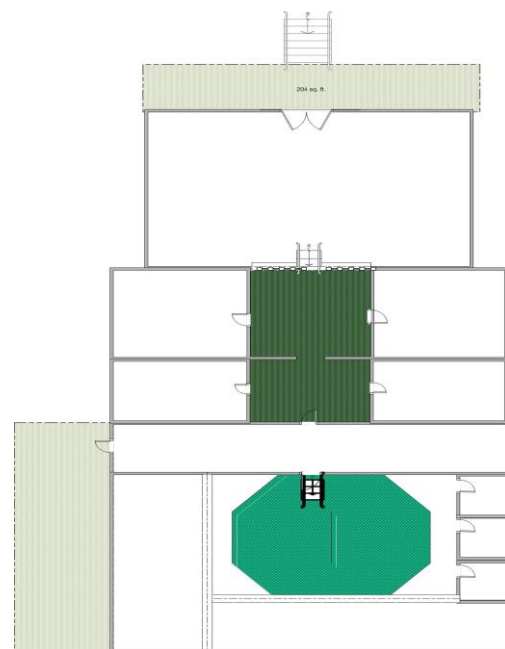
Kerajaan Sadurangas adalah sebuah kerajaan yang berdiri di tanah Pasir yang merupakan efek jangka panjang dari konflik yang terjadi di Kerajaan Kuripan yang sekarang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan kuno di Kalimantan Selatan, kemungkinan besar kerajaan ini juga bernama kerajaan Tabalong yang disebutkan dalam Negarakartagama serta dikenal dengan nama Nan Sarunai oleh suku Maanyan.

Kontak awal kerajaan Sadurangas dan Kesultanan Banjar terjadi ketika masa pemerintahan Panembahan Sulaiman di kerajaan Sadurangas dan Sultan Musta'in Billah dari Kesultanan Banjar. Hubungan ini terjadi karena konflik peperangan internal di Kerajaan Sadurangas yang mengakibatkan meninggalnya raja Sadurangas yaitu Aji Anom Singa Maulana yang kemudian digantikan oleh puteranya yaitu Panembahan Sulaiman. Panembahan Sulaiman bermaksud membalaskan dendam ayahandanya dengan meminta dukungan dari Kesultanan Banjar. Pada akhirnya Kerajaan Sadurangas berhasil mengalahkan para penyerang semasa ayahandanya berkuasa dengan dukungan persenjataan dan pasukan dari Kesultanan Banjar.

Hubungan lain antara kerajaan Sadurangas dan Kesultanan Banjar disebutkan dalam Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, Gubernur Kerajaan Majapahit untuk Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang besar (penguasa) Pasir sudah menjadi taklukannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, selanjutnya sampai masa Sultan Suriansyah.

#### 1.5 Tinjauan Arsitektural Bangunan Keraton Sadurangas

Bangunan keraton Sadurangas adalah sebuah bangunan yang pada awalnya dipergunakan untuk kediaman pribadi sultan dan kemudian dijadikan keraton karena musibah kebakaran yang menimpa keraton yang sebenarnya. Bangunan keraton ini berdiri di tepian bantaran Sungai Kandilo menghadap ke sungai. Bangunan keraton secara keseluruhan dibuat



Denah 1  
Denah Keraton Kesultanan Paser Balengkong



dari kayu ulin/belian bertipe bangunan panggung yang di cat warna kuning. Bentuk secara umum memiliki kemiripan dengan rumah tradisional adat Banjar baik secara horizontal maupun vertikal, yakni dengan denah persegi panjang dan berbentuk panggung. Pada bagian depan terdapat teras atau serambi yang diberi pagar. Teknik pengerjaan bangunan ini dengan sistem pasak, namun pada pemugaran yang telah dilakukan telah menggunakan paku.

Adapun deskripsi bangunan keraton Sadurangas, sebagai berikut:

**a. Bagian kaki bangunan**

Secara umum bangunan ini adalah tipe panggung yang ditopang oleh tonggak kayu ulin, meskipun berada di tepi sungai, panggung bangunan ini tidak terlalu tinggi (jauh lebih pendek dari rumah panggung tipe Bugis atau tipe Kutai). Pada bagian depan ketinggian bangunan dibuat lebih rendah dibanding bagian belakang. Untuk memasuki istana terdapat tangga naik yang juga dibuat dari kayu. Yang unik dari kraton ini adalah terdapat ruangan khusus yang berada di bawah kolong kamar raja dan keluarga, konon digunakan sebagai tempat istirahat para prajurit sekaligus untuk menjaga keselamatan raja dan keluarga maupun difungsikan untuk menyimpan perbekalan keraton.

**b. Bagian tubuh bangunan**

Bagian tubuh bangunan terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu, ruang bagian depan, ruang bagian tengah dan ruang bagian belakang. Ketinggian lantai pada setiap ruang tidak sama. Ruang bagian depan merupakan bagian yang paling rendah; ruang bagian tengah lebih tinggi dari pada ruang-ruang yang lain karena raja dan keluarganya bertempat tinggal di bagian ruang tengah. Pada setiap perbedaan ketinggian atau perbatasan setiap sub ruangan diberi anak tangga. Pola pembagian ruang pada bangunan keraton Sadurangas selengkapnya sebagai berikut.

1) Ruang bagian depan

Pada ruangan terdepan terdapat tangga dan teras dengan ukuran 3,45 X 5,68 meter dan terdapat tangga naik dan 3 pintu masuk dengan ukuran 2,93 X 1,86 meter, dengan 2 pintu ganda (atas dan bawah bisa dibuka). Pintu masuk ini diapit oleh dua buah jendela besar pada bagian kanan dan kirinya. Ruang depan merupakan ruangan yang paling luas dengan ukuran 15,4 X 13,89 m, disamping kiri dan kanan terdapat 8 jendela dengan ukuran cukup lebar. Ruangan ini dimanfaatkan untuk ruang tamu dan para bangsawan keraton tatakala akan menghadap sultan.

2) Ruang bagian tengah

Ruang bagian tengah dibuat lebih tinggi sekitar 1 meter, dibanding ruang depan, karena merupakan tempat raja atau sultan duduk ketika menerima tamu. Antara ruang depan dan tengah dihubungkan oleh tangga naik/undakan. Ruangan ini terbagi lagi menjadi 4 ruangan yang digunakan untuk kamar pribadi sultan, permaisuri dan keturunannya, dengan ukuran 4,70 X 5,45 meter. Ruangan sultan menempati bagian kiri (arah hadap dari ruang depan) ruangan, dan diseberangnya adalah ruang permaisurinya. Antara ruang sultan dan ruang permaisuri dipisahkan oleh lorong yang berhubungan langsung dengan ruang depan dan ruangan belakang. Di belakang ruang pribadi sultan terdapat ruang pribadi keluarga sultan (berjumlah dua ruang sesuai dengan jumlah ruang pada bagian depan) dan antar ruang juga

dipisahkan oleh lorong yang sejajar dengan lorong pada bagian depan. Antara ruang sultan dan ruang keluarga sultan dipisahkan dinding papan dan mempunyai penghubung berupa pintu dua bilah ditengahnya.

Pada lorong bagian depan diberi pagar untuk memisahkan ruangan untuk sultan dan ruangan untuk para tamu yang berada di bagian depan. Pada bagian belakang ruang pribadi keluarga sultan diberi ruang kosong lagi yang memanjang dari kanan ke kiri dan pada bagian kanan diberi pintu keluar kecil yang berhubungan dengan teras panggung bagian samping belakang.

### 3) Ruang bagian belakang

Pada bagian belakang difungsikan sebagai dapur, namun tidak semua ruangan di bagian belakang yang beratap. Susunan bentuknya adalah bagian kiri dibuat 3 ruangan yang difungsikan sebagai gudang dan tertutup, sementara bagian kanan dan belakang adalah selasar tanpa dinding pemisah kecuali dinding yang berhubungan dengan bagian luar. Pada bagian tengah ruangan tidak ada atap, tetapi hasil peninjauan terakhir, diberi tambahan kanopi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Paser. Pada bagian ruang yang ketiga terdapat dua kamar putri dan dayang-dayang dengan ukuran 4,70 X 5,45 meter. Sebelum memasuki ruang dapur masih terdapat ruangan berukuran 2,15 X 4,70 meter, setelah itu bagian belakang sendiri terdapat dapur dengan ukuran 17 X 15,4 meter. Ruang dapur dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 3 ruangan untuk dapur dan gudang makanan dan satu ruangan untuk kamar mandi.

## c. Bagian Atap



Foto no. 1, Bentuk atap dan pola hias yang dipengaruhi gaya Belanda

Bagian atas merupakan bagian atap berbentuk pelana dengan konstruksi kerangka kayu, dengan lapisan penutup atap menggunakan sirap kayu berbentuk persegi panjang. Keseluruhan bagian atas bangunan terbuat dari kayu ulin (tetapi telah banyak pergantian bahan). Pada bagian luar kuda-kuda atap, ditutup dengan papan kayu ulin yang dipasang secara vertikal dan diberi lubang

cahaya berjumlah dua buah dan ditutup kaca (lihat foto no. 1). Pada bagian kemuncak terdapat hiasan sulur-suluran yang menjadi ciri khas melayu, serta hiasan mahkota di depan penutup atap yang mencirikan rumah seorang raja (dipengaruhi oleh Belanda).

## 1.6 Nilai Penting Cagar Budaya

Dalam kamus bahasa Indonesia nilai bermakna: harga dalam arti tafsiran, harga sesuatu, angka kedalaman, kadar mutu, banyak sedikitnya isi (Tim Pustaka Phoenix: hlm.600). Dalam UU No 11 tahun

2010 Tentang Cagar Budaya, yang disebut '*nilai*' berhubungan dengan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan (pasal 1). Artinya ketika sebuah cagar budaya ditetapkan maka akan mengacu kepada prinsip-prinsip nilai seperti yang tertuang dalam amanah undang-undang tersebut.

Kemudian dalam pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Pemahaman tentang nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan inilah yang perlu dijabarkan agar amanah yang tertulis dalam pasal 32 ayat (1) dapat diapresiasi oleh masyarakat. Oleh karenanya Tanudirdjo (2004b) mengusulkan pedoman penentuan nilai penting yang terkait dengan nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mengacu pada UU No 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

- a. Yang disebut dengan memiliki *nilai penting bagi sejarah* adalah apabila sumber daya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari sebuah peristiwa yang berasal dari masa prasejarah dan sejarah, yang berkaitan erat dengan tokoh sejarah;
- b. *Nilai penting ilmu pengetahuan*, adalah apabila potensi sumber daya budaya tersebut memiliki bobot sebagai sumber pengetahuan dalam rangka pengembangan keilmuan tertentu atau ilmu lainnya, misalnya arkeologi, antropologi, arsitektur, sipil, hayati dsbnya;
- c. *Nilai Kebudayaan* apabila sumber daya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri bangsa atau komunitas tertentu.

Sedangkan penulis menambahkan penjelasan terkait dengan nilai lainnya seperti yang dijabarkan oleh UU No 11 Tahun 2010 yaitu:

- a. *Nilai pendidikan*, apabila cagar budaya tersebut dapat dan mampu menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan ilmu tertentu yang dapat bermanfaat untuk menggugah apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan mampu menumbuhkan cinta tanah air dan kebanggaan nasional;
- b. *Nilai agama*, apabila cagar budaya tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan toleransi dan harmoni dengan keragaman budaya yang dihasilkan.

Nilai-nilai penting dalam UU No. 10 Tahun 2010 dijelaskan pula yaitu apabila memiliki keunikan, kelangkaan dari segi keaslian bahan, bentuk, warna, teknik pengerjaan, tata letak dan latar belakang alam dan budayanya.

## **1.7 Nilai-nilai Keraton Sadurangas**

### **1.7.1 Nilai Sejarah**

### **1.7.2 Nilai Ilmu Pengetahuan**

### **1.7.3 Nilai Pendidikan**

### **1.7.4 Nilai Agama**

### **1.7.5 Nilai Kebudayaan**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya nilai arkeologis dijelaskan dalam dua bentuk. Bentuk-bentuk tersebut adalah definisi, dan kriteria. Bangunan Keraton Sadurangas adalah salah satu ikon utama Kesultanan Paser Balengkong yang masih tersisa. Sebagai sebuah ikon penting, maka bangunan keraton ini menjadi simbol identitas budaya bagi masyarakat Paser pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya.

Berdasar pada Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka bangunan Keraton Sadurangas berada dalam lingkup ayat 1 sampai ayat 3 pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bangunan Keraton Sadurangas adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan dan memiliki arti penting bagi perkembangan kebudayaan dan pengembangan jati diri masyarakat Paser. Sebagai sebuah warisan budaya yang bersifat kebendaan, Keraton Sadurangas adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia dan di dalam undang-undang dikenal dengan istilah struktur binaan serta merupakan satu kesatuan utuh. Meskipun merupakan bangunan tunggal tetapi bangunan ini berada pada lahan yang menjadi kompleks keraton, sehingga bangunan ini mempunyai konteks dan asosiasi dengan cagar budaya lainnya.

Adapun benda cagar budaya yang berada dalam situs tersebut terdapat masjid dan meriam yang juga masuk dalam kriteria dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sementara itu kriteria cagar budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah yang berbunyi, sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasar pada hal tersebut di atas, maka bangunan Keraton Sadurangas di Kabupaten Paser masuk dalam kriteria sebagai benda cagar budaya tidak bergerak (berupa bangunan), situs dan kawasan cagar budaya dan

seluruh artefaktual yang memiliki konteks dengan keberadaan kraton yang berada di dalam kawasan tersebut adalah benda cagar budaya.

Salah satu nilai dalam jati diri bangsa adalah kebanggaan anak bangsa terhadap sejarah bangsa itu sendiri. Sejarah suatu bangsa adalah fondasi utama bagi pembentukan karakter dan jati diri bangsa yang bermartabat,



Gambar 5  
Bangunan Keraton Kesultanan Paser Balengkong

nilai kebanggaan terhadap sejarah bangsa itu sendiri menjadi parameter nasionalisme rakyatnya. Dalam lingkup yang mikro, nilai kebanggaan dan jati diri daerah juga ditentukan pada nilai sejarah dan budaya daerah setempat. Karakter dan militansi masyarakat akan terbentuk sesuai dengan kebanggaan masyarakat terhadap sejarah daerah tersebut.

Sadurangas adalah sebuah kerajaan (yang pada akhirnya berubah

menjadi kesultanan Paser Balengkong) yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebagai satu-satunya kerajaan yang pernah ada, Sadurangas sudah membentuk wilayah Paser dalam sebuah tatanan adat dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Paser pada masa sekarang.

Dari sedikit yang tersisa, bangunan Keraton Sadurangas, masjid dan makam Sultan Paser Balengkong mempunyai nilai penting bagi pengembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Paser. Pengembangan budaya ini haruslah diwakili oleh simbol yang menegaskan bahwa pada masa lalu sebuah kerajaan/kesultanan pernah ada dan besar di wilayah tersebut. Simbol tersebut harus bisa bercerita tentang masa lalu dan juga bisa menjadi sebuah gambaran penting di mata masyarakat Paser dan masyarakat nasional. Keberadaan bangunan keraton tersebut menjadi fundamen yang sangat nyata bagi pengembangan kebudayaan yang harus dikembangkan untuk pembangunan manusia dengan landasan budaya sehingga pembangunan yang dilakukan tetap berkaca pada karakter dan budaya bangsa itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, bangunan Keraton Sadurangas mempunyai nilai yang sangat penting tidak hanya dalam pengembangan budaya di wilayah Paser tapi juga pengembangan nilai karakter dan jati diri masyarakat Paser yang menjadi landasan pembangunan budaya nasional. Nilai penting tersebut menjadi landasan bahwa keraton Sadurangas adalah sebuah ikon penting bagi Suku Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

#### **d. Pengembangan dan Pemanfaatan Bangunan Keraton Sadurangas**

### a. Landasan Teoritis Tentang Pendirian Museum

Museum menurut International Council of Museums (ICOM) adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jatidiri manusia dan lingkungannya untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan rekreasi. Sedangkan Museum menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Museum dapat didirikan oleh instansi pemerintah, yayasan, atau badan Usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka pendirian museum harus memiliki dasar hukum seperti Surat Keputusan bagi museum pemerintah dan akte notaris bagi museum yang diselenggarakan oleh swasta. Bila perseorangan berkeinginan untuk mendirikan museum, maka dia harus membentuk yayasan terlebih dahulu. Menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih dalam proses pembangunan, maka museum mempunyai peranan yang besar untuk dapat ikut mewujudkan cita-cita tersebut museum diharapkan mampu membangun kesadaran ideologis bagi para pengunjungnya (masyarakat) yang didalamnya terkandung: kesadaran/wawasan kebangsaan, serta tidak dapat dipisahkan pula dengan wawasan nusantara koleksi-koleksi museum yang dipamerkan bukan hanya aspek material yang tanpa makna, tetapi dalam koleksi-koleksinya harus dapat dihadirkan roh-roh atau konsepsi-konsepsi tentang kebangsaan, persatuan, atau wawasan nusantara.

Pengelolaan sebuah museum tidak lagi harus tersentralistik pada satu satuan kerja atau wilayah kerja saja, pengelolaan sebuah museum haruslah melibatkan berbagai pihak agar museum tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu pihak. Rasa kepemilikan inilah yang mendorong semua pihak berjuang agar museum yang sudah berdiri tersebut bisa tetap aksis. Paradigma pengelolaan sumberdaya budaya berorientasi pada pengelolaan yang dinamis; pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik; pengelolaan oleh pemerintah semata menjadi pengelolaan berbasis masyarakat; pemanfaatan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh pengelolaan situs Gilimanuk dikelola oleh *Bali Cultural Heritage Conservation* yang terdiri dari elemen pemerintah, masyarakat dan akademisi.

Berdasar pada semua penjelasan di atas, Museum Sadurangas belum mempunyai suatu sistem kelola museum yang sesuai dengan standart. Bangunan bekas keraton yang dijadikan museum sekarang ini hanya berupa bangunan yang berfungsi menumpuk koleksi itupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Dalam pengamatan yang dilakukan saat peninjauan ke museum Sadurangas terdapat hal-hal yang perlu dibenahi dalam mengngeola dan mengembangkan museum Sadurangas sesuai dengan standar permuseuman, kekurangan tersebut yaitu :

1. Museum Sadurangas masih belum punya sistem kelola museum yang sesuai dengan standar;
2. Museum Sadurangas belum mempunyai struktur organisasi tersendiri;
3. Tidak ada visi dan misi pengelolaan dan pengembangan museum;
4. Tidak adanya sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan mengelola museum;

5. Belum mempunyai kurator sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

**b. Pengembangan dan Pemanfaatan Bangunan Keraton Sadurangas**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah payung hukum tentang pengelolaan cagar budaya dalam bentuk apapun di wilayah Republik Indonesia, pun demikian halnya dengan pengelolaan museum Sadurangas haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bukan hanya karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tersebut ada pasal-pasal yang mengatur tentang museum, akan tetapi juga bangunan museum tersebut adalah bangunan cagar budaya yang dilindungi secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam mengelola museum Sadurangas haruslah didasari oleh peraturan pemerintah lainnya yang secara spesifik mengatur tentang museum. Peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.45/um.001/MKP/2009 tentang pedoman permuseuman.

Sebagai sebuah bangunan yang masuk dalam kategori cagar budaya, maka peraturan paling dasar adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Penggunaan payung hukum ini adalah salah satu bentuk pelestarian bangunan cagar budaya (bangunan museum) sehingga pengalihan fungsi dan pengelolaan bangunan dalam bentuk yang lain tetap berada dalam koridor hukum yang ada.

**e. Penutup**

Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser Balengkong adalah bukti kejayaan masyarakat Paser pada masa lalu. Kejayaan itu tidak hanya meliputi bentuk fisik ataupun nilai materi yang dihasilkan oleh kerajaan tersebut. Lebih daripada itu, kejayaan Kerajaan Sadurangas adalah warisan adat dan budaya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Paser sampai pada masa sekarang. Sangat ironis bila kebesaran Paser pada masa lalu ini sedikit demi sedikit semakin memudar dan hanya dianggap sebagai cerita masa lalu.

Revitalisasi bangunan Keraton Sadurangas yang kemudian dialihfungsikan sebagai sebuah museum adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap nilai budaya masyarakat Paser sehingga adat dan budaya yang telah terbentuk pada masa lalu tetap dapat dilestarikan sampai pada anak cucu kita kelak.

Selain dari itu, pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Paser ini harus bisa menjadi landasan pembentukan karakter dan jatidiri masyarakat Paser sehingga dalam menjadi filter negatif bagi arus kemajuan teknologi yang sekarang makin mengglobal. Pembangunan sebuah wilayah sudah menjadi tuntutan untuk tujuan kesejahteraan rakyat, akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan haruslah berlandaskan pada akar budaya dan menggunakan kearifan lokal adat setempat. Bila pembangunan seperti tersebut di atas bisa dilaksanakan maka kemajuan tidak hanya mengembangkan masyarakat dari sisi ekonomi tetapi juga dapat menjaga aspek

perilaku dan moral masyarakat Paser. Pengembangan dan pemanfaatan Keraton Sadurangas sebagai sebuah ikon adat, budaya dan pariwisata harus terus dilakukan agar hal ini bisa diwujudkan secara ideal dan optimal.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Adham, D. 1981, "*Salasilah Kutai*", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta.
- Anonym, 1978, "*Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*", Samarinda, Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Arjan, Aji Padang, tanpa angka tahun, *Sejarah Singkat Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser*, Unpublish Ras, Johannes Jacobus, 1990, "*Hikayat Banjar*", diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
- Riana, I Ketut. 2009, "*Kakawin Dēśa Warnnana Uthawi Nāgara Kṛtāgama, Masa Keemasan Majapahit*", Kompas, Jakarta
- Wardani, Wahyu, 2008, "Kondisi Geomorfologi Kalimantan", Malang, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Geografi, universitas Negeri Malang.

#### Internet

- [http://kesultanan\\_pasir.tripod.com/sadurangas/](http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/), diakses tanggal 5 Maret 2012
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Kalimantan](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kalimantan), diakses tanggal 5 Maret 2012.



[http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_bangsa\\_di\\_Kalimantan\\_Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Kalimantan_Timur), diakses tanggal 5 Maret 2012.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Paser](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Paser), diakses tanggal 5 Maret 2012.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan\\_Paser](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Paser), diakses tanggal 5 Maret 2012.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Paser](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Paser), diakses tanggal 5 Maret 2012.

[http://kesultanan\\_pasir.tripod.com](http://kesultanan_pasir.tripod.com), diakses tanggal 5 Maret 2012.

<http://www.paserkab.go.id/>, diakses tanggal 5 Maret 2012.

<http://sejarahpaser.blogspot.com/>, diakses tanggal 5 Maret 2012.

<http://www.djpp.depukumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzcmZj1wcDQ5LTlwMDcuaHRtIjs=>,  
diakses tanggal 5 Maret 2012.



# POTENSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KERATON KUTAI KARTANEGARA

Oleh : *Edy Gunawan, S.Hum dan Bayu Cahyoadi Fernado, SS*

## 1. Kondisi Geografis dan Faktor Ekologi

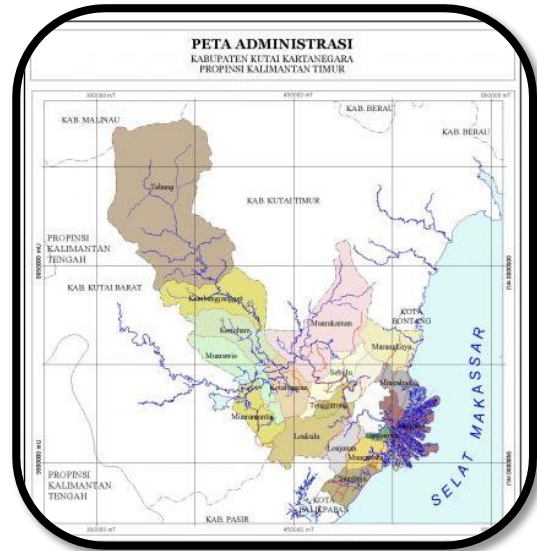
Keraton Kutai atau Istana Kutai secara administratif terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km<sup>2</sup> yang dilalui belasan sungai dan merupakan sarana angkutan utama disamping angkutan darat dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km dan lebar rata-rata 800 m.

Secara Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Barat serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makasar sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser utara dan Kota Balikpapan disebelah selatan, dan Dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan.

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian yaitu wilayah pantai dan DAS Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 m dpl.

Iklm di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografisnya yaitu iklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26° C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5° - 7° C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000 - 4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130 - 150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 - 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai, dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat. Curah hujan di wilayah Kecamatan Tenggarong antara 0 – 2000 mm/tahun dan pada wilayah ini terdapat 2 (dua) bulan lembab yaitu pada bulan agustus dan bulan september. (tisna arif, lap pantau kukar)

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk 4,13% per tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 547.422 jiwa (2005) dengan kepadatan penduduk rata-rata 20,08 jiwa/km<sup>2</sup>.



Gambar 1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

## 2. Nilai arkeologis Keraton Kutai Kartanegara sebagai cagar budaya

Keraton Kutai Kartanegara adalah bukti otentik dari perkembangan dan kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara yang memiliki arti penting bagi perkembangan masyarakat Kutai. Secara arkeologis merupakan tinggalan manusia yang dibuat untuk memenuhi kebutuhannya akan ruang. Sebagai data penting untuk merekonstruksi sejarah dan kebudayaan masa lalu dan dalam penggambaran proses budaya masyarakatnya.

Secara umum kriteria sebuah cagar budaya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengertian Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa Keraton Kerajaan Kutai Kartanegara adalah cagar budaya karena memiliki :

- Nilai penting bagi sejarah

Merupakan peninggalan dari sebuah kerajaan tertua yang ada di Kalimantan, walaupun merupakan bangunan yang dibangun pada masa akhir kerajaan berdiri.

- Nilai penting bagi ilmu pengetahuan

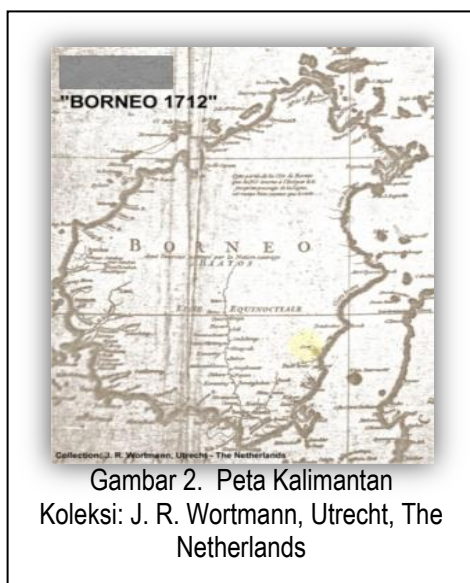
Mewakili salah satu tahapan dalam ilmu arsitektur yang menandakan adanya percampuran teknologi lokal dengan teknologi luar.

- Nilai penting bagi kebudayaan

Merupakan pencapaian budaya dari sebuah kerajaan yang ada di Kalimantan. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dapat membangun keraton yang megah dan saat ini menjadi jati diri sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam.

## 3. Sejarah Kerajaan

### 3.1. Sejarah Awal



Ditinjau dari sejarah Indonesia kuno, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti yang ditulis diatas yupa (tugu batu) yang ditulis dalam bahasa Sansekerta dengan menggunakan huruf Pallawa. Berdasarkan paleografinya, tulisan tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi.

Dari prasasti tersebut dapat diketahui adanya sebuah kerajaan dibawah kepemimpinan Sang Raja Mulawarman, putera dari Raja Aswawarman, cucu dari Maharaja Kudungga. Kerajaan yang diperintah oleh Mulawarman ini bernama Kerajaan Kutai Martadipura, dan berlokasi di seberang kota Muara Kaman.

Pada awal abad ke-13, berdirilah sebuah Kerajaan Kutai Kartanegara di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama (kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana) dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Nagarakretagama (1365), yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjunnagara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit.

Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara dibawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai (atau disebut pula: Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Mulawarman) yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.

Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Setelah beberapa puluh tahun, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778) merupakan sultan Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama Islami. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin (1663), negeri Kutai merupakan salah satu “tanah di atas angin” (sebelah utara) yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, raja Banjar-Hindu (Negara Dipa) pada abad ke-14. Sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu vazalnya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukkan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana (1622)<sup>[2]</sup>. Sebelumnya Banjarmasin merupakan vazal Kesultanan Demak (penerus Majapahit), tetapi semenjak runtuhnya Demak (1548), Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa. Sekitar tahun 1638 (sebelum perjanjian Bungaya) Sultan Makassar (Gowa-Tallo) meminjam Pasir serta Kutai, Berau dan Karasikan (Kepulauan Sulu/Banjar Kulan) sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar IV Mustain Billah/Marhum Panembahan ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654.

Pada Tahun 1747, VOC Belanda mengakui Pangeran Tamjidullah I sebagai Sultan Banjar padahal yang sebenarnya dia hanyalah mangkubumi. Pada 1765, VOC Belanda berjanji membantu Sultan Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Kutai berdasarkan perjanjian 20 Oktober 1756.<sup>[4]</sup> karena VOC bermaksud menyatukan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC. Padahal Kutai di bawah pengaruh La Maddukelleng yang anti VOC. Pangeran Amir, putra mahkota yang sah dibantu Arung Turawe (kelompok anti VOC) berusaha merebut tahta tetapi mengalami kegagalan.

Pada 13 Agustus 1787, Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah *protektorat* VOC sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi vazal Banjarmasin diserahkan secara sepihak

sebagai properti VOC Belanda. Tahun 1778 Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) telah diperoleh VOC dari Sultan Banten. Tahun 1809 pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Banjarmasin (kota Tatas) dan menyerahkan benteng Tatas dan benteng Tabanio kepada Sultan Banjar. Kemudian wilayah Hindia-Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan, Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1812. Tanggal 1 Januari 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar<sup>[4]</sup>. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholtz. Perjanjian berikutnya pada tahun 1823, negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.

Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut Perjanjian Sultan Adam al-Watsiq Billah dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826 atau 26 Ramadhan 1241 H.

### 3.2. Pemindahan ibukota kerajaan

La Madukelleng menawan daerah Paser dan Kutai. Aji Muhammad Idris merupakan raja Kutai Kartanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC. Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng berangkat ke tanah Wajo, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwalian.



Gambar 3. Peta Perpindahan Ibukota Kesultanan Kutai Kartanegara antara tahun 1300-1960. (sumber wikipedia.co.id)

Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan laga. Sepeninggal Sultan Idris, terjadilah perebutan tahta kerajaan oleh Aji Kado. Putera mahkota kerajaan *Aji Imbut* yang saat itu masih kecil kemudian dilarikan ke Wajo<sup>[1]</sup>. Aji Kado kemudian meresmikan namanya sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan menggunakan gelar Sultan Aji Muhammad Aliyeddin.

Setelah dewasa, Aji Imbut sebagai putera mahkota yang syah dari Kesultanan Kutai Kartanegara kembali ke tanah Kutai.

Oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Idris, Aji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Penobatan Sultan Muslihuddin ini dilaksanakan di Mangkujenang. Sejak itu dimulailah perlawanan terhadap Aji Kado.

Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangkujenang terhadap Pamarangan. Armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap Pamarangan. Tahun 1778, Aji Kado meminta bantuan VOC namun tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 1780, Aji Imbut berhasil merebut kembali ibukota Pamarangan dan secara resmi dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin di istana Kesultanan Kutai Kartanegara. Aji Kado dihukum mati dan dimakamkan di Pulau Jembayan.

Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibukota Kesultanan Kutai Kartanegara ke Tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado dan Pamarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti Rumah Raja, lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini. Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin setelah Aji Imbut mangkat pada tahun tersebut.

Pada tahun 1844, 2 buah kapal dagang pimpinan James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos



Foto 1. Sultan Sulaiman bersama putra mahkota dan para menteri kerajaan

dagang serta hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Namun Sultan A.M. Salehuddin mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Murray kurang puas dengan tawaran Sultan ini. Setelah beberapa hari di perairan Tenggarong, Murray melepaskan tembakan meriam ke arah istana dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan melarikan diri menuju laut lepas. Lima orang terluka dan tiga orang tewas dari pihak armada Murray, dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut.

Insiden pertempuran di Tenggarong ini sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai, namun ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda dan Belanda akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian Belanda mengirimkan armadanya dibawah komando t'Hooft dengan membawa persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada t'Hooft menyerang istana Sultan Kutai. Sultan Aji Muhammad Salehuddin diungsikan ke Kota Bangun. Panglima perang kerajaan Kutai, Awang Long yang bergelar *Pangeran Senopati* bersama pasukannya dengan gagah berani bertempur melawan armada t'Hooft untuk mempertahankan kehormatan Kerajaan Kutai Kartanegara<sup>[5]</sup>. Awang Long gugur dalam pertempuran yang kurang seimbang tersebut dan Kesultanan Kutai Kartanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda.

Pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan A.M. Salehuddin harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui pemerintahan Hindia Belanda dan mematuhi

pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang Residen yang berkedudukan di Banjarmasin.

Tahun 1846, H. von Dewall menjadi administrator sipil Belanda yang pertama di pantai timur Kalimantan<sup>[5]</sup>. Menurut *Staatsblad van Nederlandisch Indië* tahun 1849, wilayah Kesultanan Kutai termasuk dalam *zuid-ooster-afdeeling* berdasarkan *Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, pada 27 Agustus 1849, No. 8.

Pada tahun 1850, Sultan A.M. Sulaiman memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pada tahun 1853, pemerintah Hindia Belanda menempatkan J. Zwager sebagai Assisten Residen di Samarinda. Saat itu kekuatan politik dan ekonomi masih berada dalam genggaman Sultan A.M. Sulaiman (1850-1899). Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Kutai 100.000 jiwa. Tahun 1855, Kesultanan Kutai termasuk sebagai bagian dari *de zuid- en oosterafdeeling van Borneo*. Pada tahun 1863, kerajaan Kutai Kartanegara kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1888, pertambangan batubara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda, J.H. Menten. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun nampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksloitasian sumber daya alam di Kutai diberikan kepada Sultan Sulaiman. Tahun 1899, Sultan Sulaiman wafat dan digantikan putera mahkotanya Aji Mohammad dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alimuddin.

Pada tahun 1907, misi Katolik pertama didirikan di Laham, Kutai Barat. Setahun kemudian, wilayah hulu Mahakam ini diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi sebesar 12.990 Gulden per tahun kepada Sultan Kutai Kartanegara. Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja, beliau wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu putera mahkota Aji Kaget masih belum dewasa, tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Aji Pangeran Mangkunegoro.

Pada tanggal 14 Nopember 1920, Aji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Parikesit namun hal ini juga banyak mengalami kontroversi karena ada beberapa kerabat tidak setuju dengan pengangkatan Aji Muhammad Parikesit tersebut, hal ini dikarenakan anggapan bahwa Aji Pangeran Soemantri 1 lah yang berhak diangkat menjadi Sultan Kutai. dalam beberapa media juga di sebutkan bahwa pengangkatan Aji Muhamad Parikesit dikarenakan ke dua saudaranya telah meninggal. Hal inilah yang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak.

Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo-Sumatra Trade Co. Pada tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924, Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280.000 Gulden - jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu. Tahun 1936, Sultan A.M. Parikesit mendirikan istana baru yang megah dan kokoh yang terbuat dari bahan beton. Dalam kurun waktu satu tahun, istana tersebut selesai dibangun.



Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dua tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir dengan membentuk Dewan Kesultanan. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No.3 Th.1953. Pada tahun 1959, berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan", wilayah Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:

1. Daerah Tingkat II Kutai dengan ibukota Tenggarong
2. Kotapraja Balikpapan dengan ibukota Balikpapan
3. Kotapraja Samarinda dengan ibukota Samarinda

Pada tanggal 20 Januari 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, A.P.T. Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, dengan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah swatantra tersebut, yakni:

1. A.R. Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
2. Kapt. Soedjono sebagai Walikota Kotapraja Samarinda
3. A.R. Sayid Mohammad sebagai Walikota Kotapraja Balikpapan

**Tabel 1. Silsilah Raja / Sultan Kerajaan Kutai Kartanegara**

No	Nama Raja/Sultan	Masa
1	Aji Batara Agung Dewa Sakti	1300-1325
2	Aji Batara Agung Paduka Nira	1325-1360
3	Aji Maharaja Sultan	1360-1420
4	Aji Raja Mandarsyah	1420-1475
5	Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya	1475-1545
6	Aji Raja Mahkota Mulia Alam	1545-1610
7	Aji Dilanggar	1610-1635
8	Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martapura	1635-1650
9	Aji Pangeran Dipati Agung ing Martapura	1650-1665
10	Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura	1665-1686
11	Aji Ragi gelar Ratu Agung	1686-1700
12	Aji Pangeran Dipati Tua	1700-1730
13	Aji Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura	1730-1732
14	Aji Muhammad Idris	1732-1778
15	Aji Muhammad Aliyeddin 1	1778-1780
16	Aji Muhammad Muslihuddin 2	1780-1816
17	Aji Muhammad Salehuddin	1816-1845
18	Aji Muhammad Sulaiman 3	1850-1899
19	Aji Muhammad Alimuddin	1899-1910
20	Aji Muhammad Parikesit 4	1920-1960
21	H. Aji Muhammad Salehuddin II 5	1999-kini

Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari 1960 bertempat di Balairung Keraton Sultan Kutai, Tenggarong diadakan Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Kapten Soedjono (Walikota Samarinda) dan A.R. Sayid Mohammad (Walikota Balikpapan). Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dibawah Sultan Aji Muhammad Parikesit berakhir, dan beliau pun hidup menjadi rakyat biasa.

### 3.3. Penghidupan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara

Seiring dengan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, angin reformasi pun berhembus dan memberi hawa segar kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara untuk bangun dari tidurnya, demikian pula dengan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada tahun 1999, Bupati Kutai Kartanegara Drs. H. Syaukani HR, MM, berniat menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Selain itu, dihidupkannya tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura adalah untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pada tanggal 22 September 2001, putera mahkota H. Pangeran Praboe Anum Surya Adiningrat dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan HAM Salehuddin II. Sejalan dengan kebangkitan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membangun sebuah istana baru yang kemudian disebut "kedaton". Istana Kutai Kartanegara ing Martadipura yang selesai dibangun pada tahun 2002 ini terletak persis di samping Masjid Jami' Aji Amir Hasanuddin dan memiliki corak arsitektur yang mengacu pada bentuk istana Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura pada masa pemerintahan Aji Sultan Muhammad Alimuddin.

## 4. Tinjauan perkembangan arsitektural

Kata Kraton/Keraton yang berasal dari kata 'keratuan' memiliki arti sebagai istana atau tempat kediaman dari seorang ratu (raja), istilah istana ini juga biasa disebut dengan Kedaton yang berasal dari kata 'kedatuan'. Jika dilihat dari perjalanan panjang sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara sejak abad ke-13 yang telah mengalami tiga kali perpindahan ibukota, tentunya istana Kerajaan Kutai Kartanegara pun telah mengalami



Gambar 4. Lukisan Pendopo Sultan Kutai pada masa pemerintahan Sultan A.M. Sulaiman di tahun 1879 oleh Carl Bock



Gambar 5 Istana Kutai Kartanegara pada masa Sultan A.M. Parikesit

beberapa kali perpindahan atau perubahan. Namun sayang, tidak ada dokumentasi sejarah mengenai rupa bangunan istana raja-raja Kutai di masa lalu baik yang di Kutai Lama, ibukota pertama Kerajaan Kutai Kartanegara maupun di Pamarangan, ibukota kerajaan yang kedua.

Dokumentasi bentuk istana Sultan Kutai hanya ada pada masa pemerintahan Sultan A.M. Sulaiman yang kala itu beribukota di Tenggarong pada periode 1845 -1899. Masa ini tentu saja terpaut sangat jauh dengan masa awal Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang dideklarasikan pada sekitar tahun 1300 Masehi di bawah kepemimpinan Aji Batara Agung Dewa Sakti. setelah para penjelajah Eropa melakukan ekspedisi ke pedalaman Mahakam pada abad ke-18. Carl Bock, seorang penjelajah berkebangsaan Norwegia yang melakukan ekspedisi Mahakam pada tahun 1879 sempat membuat ilustrasi pendopo istana Sultan A.M. Sulaiman. Istana Sultan Kutai pada masa itu terbuat dari kayu ulin dengan bentuk yang cukup sederhana.

Setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1899, Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipimpin oleh Sultan A.M. Alimuddin (1899-1910). Sultan Alimuddin mendiami keraton baru yang terletak tak jauh dari bekas keraton Sultan Sulaiman. Keraton Sultan Alimuddin ini terdiri dari dua lantai dan juga terbuat dari kayu ulin (kayu besi). Keraton ini dibangun menghadap sungai Mahakam. Hingga Sultan A.M. Parikesit naik tahta pada tahun 1920, keraton ini tetap digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan.

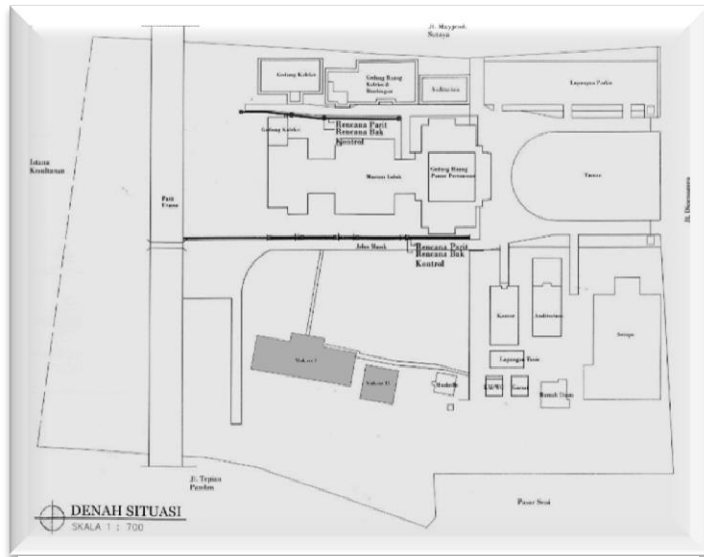
Di dalam perjalanan pemerintahan Aji Sultan Muhammad Parikesit, bangunan istana sempat direnovasi, yakni dengan mengganti bahan kayu ulin dengan beton agar bangunan keraton semakin kuat. Selama masa renovasi istana, Aji Sultan Muhammad Parikesit beserta keluarga kesultanan menempati istana lama peninggalan sang kakek, Aji Sultan Muhammad Sulaiman, untuk sementara waktu.

Proyek renovasi keraton baru dilakukan oleh perusahaan Belanda bernama Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) Batavia yang pengerjaannya dipimpin oleh seorang arsitek bernama Estourgie. Proses renovasi Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura ini memakan waktu selama 1 tahun dan fisik bangunan keraton selesai dikerjakan pada tahun 1937. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1938, Aji Sultan Muhammad Parikesit beserta keluarga kesultana resmi menempati istana yang baru ini. Prosesi peresmian keraton baru yang megah ini dilangsungkan dengan meriah dan diramaikan dengan pesta kembang api. Istana yang baru sudah dapat untuk didiami, maka diputuskan bahwa istana lama peninggalan Aji Sultan Muhammad Sulaiman akan dirobohkan. Pada masa sekarang, areal bekas keraton lama ini telah diganti dengan sebuah bangunan baru yakni gedung Serapo LPKK.

Aji Sultan Muhammad Parikesit adalah pemimpin Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang terakhir sebelum wilayah kesultanan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960. Namun, Aji Sultan Muhammad Parikesit dan keluarga tetap tinggal di istana seluas 2.270 m<sup>2</sup> tersebut sampai dengan tahun 1971. Setelah itu, Kedaton Kutai Kartanegara diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Nopember 1971.

Bangunan ini bergaya arsitektur kolonial modern dengan gaya "*Indische Empire*" yang ditandai dengan kolom sebagai pada bagian depan bangunannya. Terdapat 3 pembagian ruang bangunan yaitu beranda depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bangunan gedung memiliki beranda depan dengan ciri satu ruangan memanjang ke kiri dan ke kanan, kemudian bagian tengah ruangan induk terdapat 2 ruangan dan di bagian

belakang ruangan memanjang dari utara ke selatan. Bahan bangunannya didominasi oleh beton mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat hingga atap.



Gambar 5. Denah Keraton

Secara arsitektural bangunan Keraton Kutai Kartanegara mengadopsi arsitektur kolonial modern dengan gaya “Indische Empire” yang ditandai dengan kolom / tiang- tiang utama pada bagian depan bangunan keraton yang menopang atap dengan konstruksi datar. Denah dari bangunan ini menyerupai bentuk manusia / *antrophomorfik* yang memanjang dari dari depan ke belakang.

Keraton ini terbagi atas dua bagian yang besar, yaitu didepan bagian profan / operasional kerajaan dan dibelakang bagian sakral untuk raja dan keluarga. Istana ini memiliki pondasi dengan tinggi 2 m yang.



Foto 4.3 Serambi besar dengan atap terbuat dari kaca mozaik (sumber : Dokumebtasi Regtap)



Foto 4.3 Kompleks Makam Raja / Sultan Kutai Kartanegara (sumber : Dokumebtasi Regtap)

tangga yang terbuat dari keramik yang menghubungkan bagian serambi luar dengan pintu masuk. Bagian operasional kerajaan terdapat serambi yang merupakan tempat baginda sultan menerima tamu. Pada bagian ini terdapat balai singasana (*toonzaal*) tempat baginda sultan duduk diatas tahta kerajaan. Balai singasana itu diapit oleh kamar gamelan, kamar musik, ruang kerja baginda Sultan, dan perpustakaan. Pada bagian selanjutnya terdapat serambi besar, serambi ini dikelilingi oleh kamar baginda Sultan, kamar permaisuri, dan ruang makan. Serambi besar ini beratapkan kaca mozaik. Pada bagian belakang terdapat kamar – kamar yang digunakan oleh pekerja kerajaan dan ruangan dapur. Terdapat ruangan bawah tanah yang digunakan sebagai penjara dan parkir kendaraan Sultan yang mempunyai pintu keluar di bagian belakang bangunan. Bahan bangunannya didominasi oleh beton mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat hingga atap.

Di dalam kompleks istana Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura terdapat makam beberapa Raja/Sultan dan keluarga kesultanan. Nisan-nisan di kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura ini kebanyakan terbuat dari kayu ulir dengan ukiran huruf Arab. Beberapa Raja/Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang dikebumikan di kompleks ini antara lain: Aji Sultan Muhammad Muslihuddin (1780-1816), Aji Sultan Muhammad Salehuddin (1816-1845), Aji Sultan Muhammad Sulaiman (1850-1899), dan Aji Sultan Muhammad Parikesit (1920-1960). Sedangkan Aji Sultan Muhammad Alimuddin (1899-1910) dimakamkan di suatu tempat yang dimiliki oleh almarhum, yakni di daerah Gunung Gandek, Tenggarong.

## **5. Pengembangan dan Pemanfaatan Keraton Kutai Kartanegara sebagai Museum Mulawarman**

### **5.1. Dasar hukum pendirian museum**

Keraton Kutai Kartanegara diresmikan menjadi Museum Kutai pada tanggal 25 November 1971 oleh pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1976 Museum Kutai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai bekerja sama dengan Pemda Tingkat I diserahkan terimakan kepada Depdikbud oleh Gubernur Kalimantan Timur dan namanya diganti dengan Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman" sehingga berstatus sebagai Museum Negeri Provinsi dan disahkan pada tanggal 28 Mei 1979 berdasarkan SK Mendikbud 093/0/1979. Museum Mulawarman atau Keraton Kartanegara telah diregistrasi sebagai cagar budaya dengan No.SK/0151/UPT/DKP/2010 dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 012/M/1999.

### **5.2. Pengembangan dan Pemanfaatan sebagai Museum**

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya dijelaskan bahwa cagar budaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 yaitu Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Sedangkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Keraton Kutai Kartanegara dalam pengembangannya menjadi Museum Mulawarman telah bermetamorfosis menjadi tempat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rekreatif yang dapat dioptimalkan keberadaannya sebagai tempat wisata. Potensi tersebut dapat dioptimalkan agar masyarakat dapat tertarik untuk mengunjungi museum. Optimalisasi potensi museum sebagai objek wisata budaya dapat dilakukan melalui pengembangan museum yang mengacu pada perspektif wisata budaya.

Pengelolaan museum yang optimal dilakukan dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan aspek koleksi, pameran, aktifitas atau program yang dijalankan serta pelayanan yang diberikan oleh pengelola museum kepada pengunjung. Pengelola museum sebagai pihak yang secara langsung menangani pengelolaan museum adalah bagian dari pihak internal museum. Secara eksternal, peran lembaga atau pihak luar dalam pengembangan museum sangat diharapkan agar Museum Mulawarman menjadi daya tarik wisata unggulan. Aspek eksternal tersebut

mencakup pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. Ketiga pihak ini lebih berperan dalam sektor promosi atau pemasaran sehingga Museum Mulawarman lebih dikenal publik.

Upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi Museum Mulawarman sebagai daya tarik wisata, yaitu :

1. Pengembangan lokasi objek wisata . hal ini terkait dengan pengelolaan museum secara internal sehingga pihak pengelola dituntut untuk lebih baik dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi pengunjung
2. Pengembangan paket wisata budaya. peran ini ditekankan pada industri pariwisata seperti agen-agen perjalanan.
3. Pengembangan pelayanan wisata budaya yang mendukung kegiatan kunjungan ke museum seperti aksesibilitas, akomodasi, dll.
4. Pengembangan promosi wisata kepada masyarakat.

## **6. Kesimpulan**

Keraton Kutai Kartanegara merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Keberadaannya sangat penting dalam rangka merekonstruksi kehidupan masa lalu sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan saat ini. Upaya pelestarian wajib dilakukan termasuk nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai perwujudan jati diri bangsa.

Pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan sebagai Museum Mulawarman dapat dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Pengelolaan museum yang baik dapat menjadikan Museum Mulawarman sebagai objek wisata unggulan yang dapat dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Diperlukan sinergisitas yang baik antara beberapa pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan Museum Mulawarman agar optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adham.D. 1981. Salasilah Kutai. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta
- Anwar. H.Rosihan. 1962. Islam dan Anda
- Ras. JJ. 1990. Hikayat Banjar. Diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor Darul Ehsan. Malaysia
- Wertman.J.R. 1971. The Sultanate of Koetoei, Kalimantan Timur A Skecth of the traditional political structure.
- Anonim. 1975. Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai (Kumpulan Tulisan).
- Notosusanto, dkk.2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II, III, IV, V. Balai Pustaka : Jakarta.
- Mensch. Peter Van. 11894. Theoretical Museology. Amsterdam. Amsterdam School og The Arts Faculty Of museology.
- Yoeti, Oka. A. 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung
- Ma'rifat, Tisna Arif. Laporan Pemantauan Juru Pelihara Tahun 20120. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. Samarinda

### Internet

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

"Kedaton Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kaltim", diunduh dari <http://www.kalimantan-news.com/wisata.php?idw=33>, data diakses pada tanggal 28 Mei 2012.

"Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara", diunduh dari <http://www.KutaiKartanegara.com/kesultanan>, data diakses pada tanggal 28 Mei 2012.

"Kesultanan Kutai Kartanegara, Kerajaan Tertua di Indonesia," diunduh dari [http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/syaukani-hr/mti/mti-29\\_budaya2.shtml](http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/syaukani-hr/mti/mti-29_budaya2.shtml), data diakses pada tanggal 28 Mei 2012.

[http://www.KutaiKartanegarakab.go.id/index.php/tourism/museum\\_mulawarman/](http://www.KutaiKartanegarakab.go.id/index.php/tourism/museum_mulawarman/)

<http://www.KutaiKartanegarakab.go.id/>

[http://www.KutaiKartanegarakab.go.id/index.php/tourism/museum\\_mulawarman/](http://www.KutaiKartanegarakab.go.id/index.php/tourism/museum_mulawarman/)

<http://www.KutaiKartanegara.com/dokumen/borneo1712.html>

<http://www.KutaiKartanegara.com/dokumen/pp-1936.html>

<http://www.KutaiKartanegara.com/dokumen/siisilah.htm>

# ASTANA AL NURSARI

## 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Pangkalan Bun. Letak astronomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°19'-3°36' LS dan 110°25'-112°50' BT. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.



Gambar 1. Peta kabupaten Kotawaringin Barat

(Sumber : id.wikipwdia.org)

Karakteristik iklim di Kalimantan Tengah adalah tipe iklim tropis lembab dan basah. Khusus untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki dua jenis musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau berlangsung pada bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu udara rata-rata dalam satu tahun adalah 29° C, dengan suhu maksimum 33 ° C. Curah hujan rata-rata tahunan : 2.732 mm dengan rata-rata hari hujan 120 hari (Anonim, 2007).

Topografis Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi empat bagian yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut (dpl) dan kemiringan antara 0-40 %. Di sebelah utara adalah pegunungan dan tanah *lotosan* yang tahan terhadap erosi, bagian tengah terdiri dari tanah *podsolik* merah kuning dan juga tahan terhadap erosi serta sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa *alluvial/organosal* yang banyak mengandung air. Terdapat tiga sungai yang melintasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandu dengan kedalaman rata-rata lima meter dengan lebar antara 100-300 m (Cahyoadi, 2011:4).

Kabupaten Kotawaringin Barat secara administrasi terdiri atas enam kecamatan yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas wilayah 1.280 m<sup>2</sup>, Kecamatan Pangkalan Banteng dengan luas wilayah 1.306 m<sup>2</sup>, Kecamatan Arut Utara dengan luas wilayah 2.685 m<sup>2</sup>, Kecamatan Arut Selatan dengan luas wilayah 2.400



m<sup>2</sup>, Kecamatan Kumai dengan luas wilayah 2.921 m<sup>2</sup> dan Kecamatan Pangkalan Lada dengan luas wilayah 226 m<sup>2</sup>.

## 2. Nilai Arkeologis Astana Al Nursari Sebagai Bangunan Cagar Budaya

Di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2010 Pasal 1 Bab I tentang Cagar Budaya, yang dimaksud Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan Indonesia. Sedangkan Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap (Anonim, 2010: 2).

Di dalam ilmu arkeologi, cagar budaya merupakan data utama untuk memperoleh gambaran budaya mengenai masa lampau sehingga sangat penting untuk dikelola serta dilestarikan secara benar. Cagar budaya harus dikelola dengan baik karena pada dasarnya benda-benda tersebut memiliki tiga sifat yakni sifatnya yang berharga (*valuable*), langka/terbatas jumlahnya (*scarce*) dan tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*). Oleh karena sifat-sifat itulah maka pengelolaan terhadap benda cagar budaya harus arif dan bijaksana agar berdaya guna bagi banyak pihak. Pengelolaan tersebut amat penting karena terkandung nilai-nilai yang selaras dan tidak dapat dilepaskan dari makna kultural yang melekat padanya. Banyak makna yang terkandung dalam cagar budaya, di antaranya adalah makna simbolik yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat pendukungnya, sedangkan nilai itu adalah nilai estetis, asosiatif, simbolik, informatif, dan ekonomis.

Berdasarkan uraian pada UU, maka kriteria nilai penting yang digunakan adalah nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Akan tetapi, penjelasan tentang ketiga nilai penting tersebut ternyata tidak dijabarkan secara lebih rinci di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2010. Tentu hal tersebut dapat memunculkan pengetian yang luas dan melahirkan penafsiran yang berbeda pula tentang yang dimaksud nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu, sebagai kerangka operasional dalam melakukan analisis nilai penting, penulis akan merujuk pendapat Tanudirjo (2004) yaitu:

1. Nilai penting sejarah apabila sumberdaya budaya tersebut dapat menjadi bukti peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah.
2. Nilai penting ilmu pengetahuan apabila sumberdaya budaya tersebut memiliki potensi untuk diteliti dalam menjawab permasalahan bidang keilmuan tertentu. Dalam hal ini, bukan hanya ilmu arkeologi saja, tetapi juga mencakup disiplin ilmu yang terkait didalamnya.
3. Nilai penting kebudayaan apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri bangsa atau komunitas tertentu. Dalam nilai penting kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu nilai etnik apabila dapat memberikan pemahaman jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu, nilai estetis bila mengandung unsur keindahan

termasuk keserasian antara bentang alam dan karya budaya, dan serta dapat menginspirasi terciptanya karya budaya, dan nilai publik apabila berpotensi dikembangkan menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat, menyadari keberadaan manusia sekarang; berpotensi atau telah menjadi fasilitas rekreasi dan pariwisata (Tanudirdjo, 2004)

Bangunan Astana Al Nursari telah ditetapkan dengan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.28/PW.007/MKP/2008 sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah. Tentunya penetapan tersebut sudah melewati syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Adapun nilai-nilai penting yang terdapat pada bangunan Astana Al Nursari meliputi nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Nilai penting sejarah, bangunan Astana Al Nursari merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Kotawaringin (Pangeran Paku Sukma Negara) sebelum adanya perpindahan pusat pemerintahan ke Pangkalan Bun. Kondisi bangunannya relatif masih utuh dan merupakan satu-satunya tinggalan rumah adat bangsawan Banjar yang masih ada. Di bagian dalam bangunan masih tersimpan beberapa benda peninggalan seperti meriam, gong, lonceng, batu pipisan dan nekara.

Nilai penting ilmu pengetahuan Bangunan Astana Al Nursari dapat dilihat dari segi arsitektur bangunan. Astana Al Nursari merupakan bangunan tipe panggung yang bahan utamanya terbuat dari kayu ulin. Dilihat dari bentuk bangunannya, dapat dikatakan bangunan ini mendapat pengaruh dari pulau Jawa yang bercampur dengan pengaruh lokal. Pengaruh dari Jawa terlihat dari bentuk limasan. Salah satu keunikan arsitektur bangunan Astana juga terlihat dari tata ruang bangunan yang terpisah-pisah.

Nilai penting kebudayaan yang terkandung di situs Astana Al Nursari dapat dilihat berdasarkan nilai publik yang dapat mencakup sarana pembelajaran dan pariwisata. Data arkeologis berupa gong, nekara, meriam serta bangunan itu sendiri dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi generasi mendatang dalam memperelajari dan mengenal kehidupan masa lampau.

### **3. Sejarah Kerajaan**

Kotawaringin Barat berasal dari Kata "*Kutawaringin*" dan "*Barat*". Kutawaringin sendiri berasal dari dua kata yaitu *Kuta* berarti Gapura, *Waringin* berarti *Pohon Beringin* yang bermakna Pengayoman, sedangkan *Barat* berasal dari pembagian tempat. Secara keseluruhan *Kotawaringin Barat* berarti "*Gapura Pengayoman di Sebelah Barat*".

Nama Kotawaringin telah dikenal jauh sebelum kesultanan ini berdiri. Naskah paling tua menyebutkan tentang Kotawaringin adalah Kakawin Negarakretagama Pupuh XIII; XVI yang ditulis tahun 1365, menyebutkan Kotawaringin sebagai salah satu negeri di negara bagian Tanjung Negara (Kalimantan-Filipina) yang berpangkalan di Tanjungpura. Naskah lain yang menyebut Kotawaringin adalah Hikayat Banjar. Naskah ini menyebutkan bahwa Kotawaringin merupakan salah satu tanah yang berada di bawah angin (negeri di sebelah barat) yang telah ditaklukkan Kerajaan Banjar. Menurut suku Dayak yang tinggal di hulu sungai Lamandau, mereka merupakan keturunan Patih Sebatang yang berasal dari Pagaruyung (Minangkabau). Sejak diperintah Dinasti Banjarmasin, Kotawaringin secara langsung menjadi bagian dari Kesultanan Banjar, sehingga sultan-sultan Kotawaringin selalu memakai gelar Pangeran jika mereka berada di Banjar. Tetapi di dalam lingkungan Kotawaringin sendiri, para Pangeran yang menjadi raja juga disebut dengan Sultan.

Sejarah Kotawaringin dapat dibagi menjadi dua yaitu masa sebelum kesultanan dan masa awal kesultanan. Kedua masa tersebut memiliki batasan sekitar tahun 1611 – 1615 atau masa setelah sultan pertama Kotawaringin yaitu Pangeran Adipati Antakesuma bin Sultan Mustainubillah dengan gelar Ratu Bengawan Kotawaringin memerintah. Pada kedua masa ini, Kotawaringin masih dibawah pengaruh Kesultanan Banjar. Masa sebelum kesultanan memiliki sejarah dengan berbagai versi berbeda yang berhubungan dengan siapa yang berkuasa di daerah Kotawaringin. Perbedaan tersebut terjadi pada sejarah seputar tokoh dengan nama Kyai Gede yang memiliki beberapa versi yang berbeda. Versi pertama menyebutkan bahwa Kyai Gede merupakan penduduk asli yang merupakan kepala kampung masyarakat Dayak yang telah bermukim di lokasi Kotawaringin lebih dahulu. Versi yang kedua menyebutkan bahwa Kyai Gede merupakan seorang utusan Sultan Mustainubillah (Sultan Banjar ke IV) yang berasal dari Kerajaan Demak.

Versi pertama menyebutkan bahwa Kyai Gede merupakan seorang *mukallah* suku dayak sekaligus pemimpin yang sangat berpengaruh saat itu. Sebagai seorang yang berpengaruh Kyai Gede memegang kekuasaan atas wilayah Kotawaringin saat itu dan tunduk kepada Kesultanan Banjar. Pada masa awal Kesultanan Kotawaringin, Kyai Gede menjabat sebagai Mangkubumi. Versi yang kedua menyebutkan bahwa Kyai Gede adalah seseorang yang berasal dari Demak yang diperintahkan oleh Sultan Mustainubillah (Sultan Banjar ke IV) untuk merintis tegaknya Kerajaan Kotawaringin. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam bidang agama tetapi juga dalam bidang sosial politik. Salah satu bukti yang masih dapat ditemui yaitu Masjid Jami Kotawaringin atau dikenal juga Masjid Kyai Gede.

Sesuai dengan tugas yang dibebankan Sultan Mustainubillah sebagai raja dari kerajaan yang berdasarkan kelislaman, pertama-tama yang dilaksanakan Kyai Gede selaku seorang ulama adalah mengembangkan ajaran Islam. Setelah beberapa waktu lamanya menyusuri Sungai Lamandau ke arah hulu sampai di tempat yang dihuni sekelompok Suku Dayak. Pimpinan kelompok tersebut adalah Demung Tujuh Bersaudara yang merupakan pimpinan secara kolektif. Setelah berhasil mengatasi berbagai masalah dengan mereka, akhirnya Kyai Gede memutuskan untuk menetap di tempat tersebut yang disebut Tanjung Pangkalan Batu. Maka langkah pertama yang Kyai Gede lakukan adalah mengembangkan agama Islam. Dalam mengembangkan agama Islam tersebut, Kyai Gede harus menghadapi kenyataan bahwa tidak seluruh masyarakat di tempat itu menerima ajaran Islam. Sebagian masyarakat yang menerimanya dikenal sebagai kelompok "Nyaga" sedangkan yang tidak menerimanya terpaksa menyingkir ke pedalaman (ke arah "darat") meninggalkan tempat awal yang terletak di tepian sungai. Maka kelompok yang kedua tersebut disebut kelompok "Dayak Darat" yang tetap memegang keyakinan lama. Selanjutnya Kyai Gede mengembangkan tugasnya sesuai dengan yang dipercayakan Sultan Mustainubillah kepadanya. Kyai Gede juga memutuskan untuk menetap di tempat tersebut yang di kemudian hari menjadi pusat kerajaan dan disebut Kotawaringin. Sambil menanti pengangkatan raja, Kyai Gede melaksanakan tugas selaku pemimpin daerah dengan meneruskan tradisi setempat yaitu mengantar upeti ke Kerajaan Banjar. Menurut catatan, *Jajar Melahui* adalah pemimpin rombongan pengantar upeti dari rakyat Dayak setempat dan sekitarnya untuk Raja Banjar sebelum kehadiran Kerajaan Kotawaringin.

Masa awal Kesultanan Kotawaringin menurut Hikayat Banjar disebutkan bahwa Sultan Mustainubillah (Sultan Banjar) memiliki putra sebanyak empat orang dan masing-masing ingin menjadi raja penerus kerajaan. Salah satu putranya yaitu Pangeran Adipati Anta Kasuma yang bukan putra tertua meminta restu kedua orang tua dan pejabat Kerajaan Banjar untuk mencari daerah yang akan dijadikan daerah kekuasaannya. Bersama pengawal dan beberapa perangkat kerajaan, Pangeran Adipati Anta Kasuma berlayar menyusuri pesisir Kerajaan Banjar ke arah Barat. Beberapa daerah telah dilewati sampai ke daerah Kuala Pembuang. Masyarakat Kuala Pembuang yang masih berkeinginan berada dibawah kekuasaan Banjar menolak untuk dijadikan daerah kerajaan yang baru maka pangeran melanjutkan perjalanannya. Perjalanan tersebut tidak dilakukan lagi dengan menyusuri pesisir tetapi dengan menuju hulu sungai hingga mencapai ke sebuah desa yaitu Pandau.

Desa Pandau merupakan daerah yang dihuni oleh sembilan Suku Dayak yang dipimpin oleh seorang Demang Petinggi di Umpang. Masyarakat Desa Pandau mau menerima pangeran untuk dijadikan pemimpin dengan syarat mereka tidak diperlakukan seperti bawahan. Pangeran menyanggupi persyaratan tersebut dan dengan perjanjian panti darah janji samaya. Pangeran Adipati Anta Kasuma yang telah menjadi pemimpin di daerah tersebut merasa bahwa daerah yang menjadi tempat tinggalnya ini tidak layak menjadi ibukota kerajaan maka dilakukan pelayaran sepanjang Sungai Lamandau sampai ke daerah Tanjung Pangkalan Batu. Merasa daerah ini layak untuk dijadikan ibukota kerajaan maka pangeran memindahkan tempat tinggalnya ke daerah ini dan mulai membangun kerajaan. Tanjung pangkalan batu yang kemudian dikenal sebagai Kotawaringin menjadi ibukota kerajaan dan masyarakat yang menjadi bawahannya tidak lagi membayar uperi ke Kerajaan Banjar tetapi ke Pangeran Adipati Anta Kasuma. Dalam perkembangannya, Kerajaan Kotawaringin masih mengakui Kerajaan Banjar sebagai pusat pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan raja/sultan Kotawaringin masih mempunyai peran penting dalam Kerajaan Banjar sebagai salah satu bagian dari pemerintahan dan mengirimkan bantuan kepada Kerajaan Banjar jika diperlukan.

Kesultanan Kotawaringin berdiri lebih dari tiga abad dengan satu kali perpindahan ibu kota dari Kotawaringin Lama ke Sukabuni Indra Sakti yang kemudian dinamai Pangkalan Bu'un. Sultan pertama Kesultanan Kotawaringin adalah Pangeran Adipati Antakesuma bin Sultan Mustainubillah dengan gelar Ratu Bengawan Kotawaringin. Beliau memerintah dari tahun 1615-1630 M dengan dibantu Mangkubumi Kyai Gede. Di masa pemerintahan sultan pertama ini disusun undang-undang Kesultanan Kotawaringin yakni Kitab Kanun Kuntala, selain itu di bangun Istana Luhur sebagai Keraton Kesultanan Kotawaringin. Sultan juga membangun Perpatih (rumah patih) Gadong Bundar Nurhayati dan Perdipati (rumah panglima Perang) Gadong Asam, selain itu untuk keperluan perang dibangun Pa'agungan sebagai tempat menyimpan senjata dan beliau juga membangun surau serta paseban.

Di bawah ini adalah silsilah raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kotawaringin. Akan tetapi referensi yang ada memiliki banyak perbedaan mengenai nama-nama raja serta tahun berkuasa.

NO	Tahun Pemerintahan*	Sultan	Mangkubumi	Tahun Pemerintahan**	Sultan	Mangkubumi
1		Kyai Gede				
2				1615 - 1630 M	Pangeran Adipati Antakesuma bin Sultan Mustainubillah (Ratu Bengawan Kotawaringin)	Kyai Gede
3	1637 - 1650 M	Pangeran Dipati Anta Kesuma	Kyai Gede	1630 - 1655 M	Pangeran Mas Adipati	Kyai Gede
4	1650 - 1700 M	Pangeran Mas Adipati	Dipati Gading	1655 - 1682 M	Pangeran Penembahan Anum	Dipati Gading
5				1682 - 1699 M	Pangeran Prabu	Pangeran Dira
6				1699 - 1711 M	Pangeran Dipati Tuha	Pangeran Cakra
7	1700 - 1720 M	Panembahan Kotawaringin	Dipati Gading	1711 - 1727 M	Pangeran Penghulu	
8	1720 - 1750 M	Pangeran Prabu/Panembahan Derut	Pangeran Dira	1727 - 1761 M	Pangeran Ratu Bengawan	
9	1750 - 1770 M	Pangeran Adipati Muda	Pangeran Cakra	1761 - 1805 M	Pangeran Ratu Anum Kesumayuda Tuha	Pangeran Tapa Sana
10	1770 - 1785 M	Pangeran Penghulu	Pangeran Anom			
11	1785 - 1792 M	Pangeran Ratu Bagawan	Pangeran Paku Negara			
12	1792 - 1817 M	Pangeran Ratu Anom Kasuma Yudha	Pangeran Tapa Sana	1805 - 1841 M	Pangeran Ratu Imanudin	Pangeran Adipati Mohamad Saleh
13	1817 - 1855 M	Pangeran Imanuddin/Pangeran Ratu Anom	Pangeran Adipati Mohamad Saleh			
14	1855 - 1865 M	Pangeran Akhmad Hermansyah		1847 - 1862 M	Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah	Pangeran Paku Syukma Negara
15				1862 - 1867 M	Pangeran Paku Syuma Negara	Pangeran Prabunata
16	1865 - 1904 M	Pangeran Ratu Anom Alamsyah I		1867 - 1904 M	Pangeran Ratu Anum Kesumayuda	Pangeran Paku Sukma Negara yang digantikan oleh Pangeran Mangku Prabu Nata
17	1904 - 1913 M	Pangeran Ratu Sukma Negara		1904 - 1913 M	Pangeran Paku Sukma Negara	Adipati Mangku Negara
18	1913 - 1939 M	Pangeran Ratu Sukma Alamsyah	Pangeran Mangkunegara	1913 - 1939 M	Pangeran Ratu Sukma Alamsyah bin Pangeran Begawan	Pangeran Adipati Mangkunegara
19	1939 - 1948	Pangeran Kasuma Anom Alamsyah II	Pangeran Mangkunegara	1939 - 1948 M	Pangeran Ratu Kesuma Anum Alamsyah	Pangeran Adipati Mangkunegara
20	2012 - sekarang	Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah				

Tabel 2.1 Silsilah raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Kotawaringin

(sumber: \*Internet; \*\* Laporan Keg. Dokumentasi)

Kerajaan Kotawaringin semula berpusat di tempat yang dikenal sebagai Kotawaringin terletak di tepi Sungai Lamandau agak jauh ke hulu. Pada awal-awal abad ke 19 tepatnya tahun 1811 dimasa pemerintahan Pangeran Ratu Imanuddin, pusat kerajaan dipindahkan ke kota Pangkalan Bun yang terletak di tepi sungai Arut, tidak jauh dari pertemuan Sungai Arut dengan Sungai Lamandau. Pertemuan kedua sungai itu terletak tidak jauh dari muara Sungai Lamandau, sehingga dapat dikatakan pusat kerajaan makin mendekati pantai, yaitu pantai Laut Jawa. Hal ini memang perlu mengingat kelancaran hubungan perdagangan. Perpindahan pusat pemerintahan dilakukan unuk menghindari serangan para bajak laut yang sering merampas harta benda penduduk.

Pangeran Ratu Kesuma Anum Alamsyah merupakan raja terakhir yang memerintah atas daerah Kerajaan Kotawaringin. Hal ini dikarenakan ditetapkannya undang-undang tahun 1948 No 22 yang menghapus keswaprajaan Kotawaringin menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota di Sampit dan selanjutnya menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota di Pangkalan Bun. Sultan yang menjabat pada masa tersebut sempat menjabat sebagai Patih/Wedana pada pemerintah negara RI sampai masa pensiun.

#### 4. Tinjauan Arsitektural Astana Al Nursari

Astana Al Nursari terletak di Jl. Merdeka Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara geografis Astana Al Nursari terletak pada koordinat UTM 49 M 9725204 MT --- 549278 MU, berada  $\pm$  150 m di sebelah barat tepi Sungai Lamandau. Sebelah utara Astana A Nursari berbatasan dengan Jalan Munai dan pemukiman penduduk, sebelah barat berbatasan dengan pemukiman penduduk dan Kompleks Makam Kuta Tanah, sebelah selatan berbatasan dengan gang istana dan pemukiman penduduk. Jarak tempuh dari Kota Pangkalan Bun ke Kotawaringin lama  $\pm$  90 menit meggunakan *speedboat* menyusuri Sungai Arut dan Sungai Lamandau.



Foto 1 Astana Al Nursari tampak depan kiri



Foto 2 Astana Al Nursari tampak depan

Astana Al Nursari dibangun oleh Sultan Pangeran Paku Sukma Negara pada tahun 1867 M. Astana tersebut bukan istana sebagai tempat tinggal raja, melainkan sebagai tempat tinggal kaum bangsawan keturunan Raja/Sultan Kotawaringin yang masih menetap di Kotawaringin Lama setelah perpindahan pusat kerajaan ke Pangkalan Bun pada masa pemerintahan Sultan Pangeran Ratu Anom Kasumayuda. Astana ini adalah bekas rumah tinggal Pangeran Paku Sukma Negara yang berasal dari Kotawaringin Lama yang memerintah di Pangkalan Bun. Kepemilikan Astana secara turun temurun diwariskan oleh Pangeran Paku Sukma Negara kepada anaknya Pangeran Kelana Prabu Wijaya dan dilanjutkan oleh Pangeran Suria yang kemudian diteruskan

oleh Gusti Doemay Anas dan selanjutnya diwariskan kepada Gusti Djendro Soesono. Tahun 2008 Astana Al Nursari ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.28/PW.007/MKP/2008.

Astana Al Nursari menempati lahan berukuran sekitar 120 m x 150 m yang terbagi atas dua area. Area pertama adalah halaman luar yang oleh masyarakat disebut sebagai alun-alun dan merupakan lahan terbuka yang menghubungkan jalan umum. Area kedua adalah halaman dalam yang merupakan halaman tertutup dikelilingi pagar setinggi 2,4 m yang terbuat dari kayu ulin. Di area halaman dalam terdapat bangunan utama Astana Al Nursari dan hanya keluarga kerajaan serta undangan yang diizinkan masuk. Selain itu di sebelah utara



Foto 3 Pa'agonan

bangunan Astana Al Nursari terdapat bangunan dengan arsitektur rumah panggung dan konstruksi kayu berdenah segi empat dengan ukuran 7 x 2,5 m yang disebut Pa'agonan. Bangunan ini terletak sekitar 15 m yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Di bagian barat Astana Al Nursari terdapat juga sebuah rumah yang penghuninya merupakan keturunan *abdi dalem* Astana sehingga penempatan rumah tersebut berada di dekat bangunan Astana.



Foto 4 Benda koleksi Pa'gonan

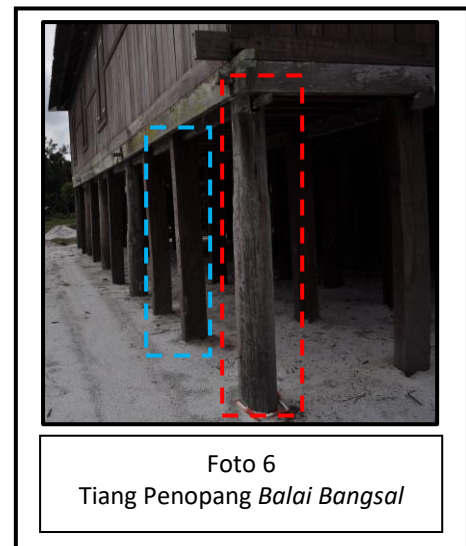
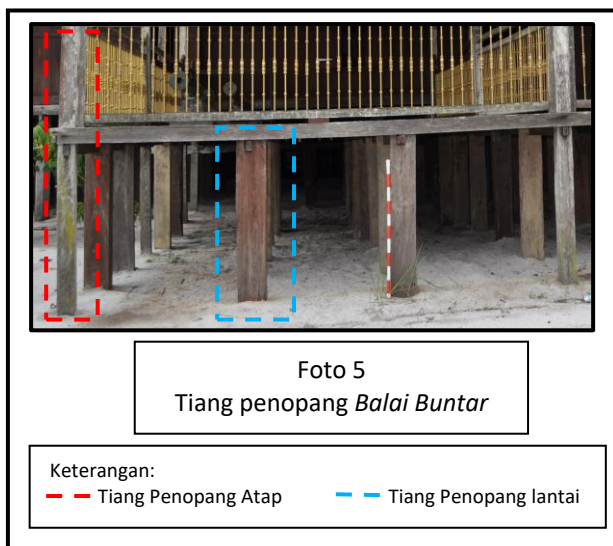


Bangunan Astana Al Nursari merupakan bangunan tipe panggung dengan ketinggian lantai 190 cm dari tanah. Rumah ini terbuat dari bahan kayu yang terdiri dari lima bangunan terpisah tetapi terikat pada bagian kolom serta bagian atap yang juga terpisah. Secara berurutan dari ruang depan adalah balai buntar yang berfungsi sebagai teras, ruang kedua adalah balai bangsal yang berfungsi sebagai ruang pertemuan dan menerima tamu, balai burung yang berfungsi sebagai penghubung antara balai bangsal dengan rumah bosar. Rumah bosar merupakan ruang utama sebagai tempat tinggal, selanjutnya adalah *pedaporan* yang berfungsi sebagai dapur dan ruang paling belakang adalah pelantaran berupa ruang tanpa atap yang berfungsi sebagai tempat mencuci. Bangunan Astana merupakan perpaduan dari bangunan tradisional yang ada di Pulau Jawa (bentuk limasan) dengan bangunan tradisional yang ada di Kalimantan.

Struktur pendukung utama bangunan meliputi tiang, lantai, rangka dinding dan rangka atap serta penutup atap menggunakan sirap kayu ulin. Pada dinding ruang pertemuan telah dilakukan pergantian bahan dengan menggunakan papan kayu kampul yang dipasang horisontal, sedangkan bentuk asli dinding tersebut menggunakan papan kayu ulin yang di pasang vertikal. Bagian pintu menerapkan model dengan daun pintu ganda dan masih menggunakan sistem engsel dari bahan kayu. Sirkulasi udara dalam ruangan ditunjang dengan pemasangan jendela pada setiap dinding dengan daun jendela ganda dan dilengkapi tralis dari kayu.

#### 4.1 Kaki Bangunan

Ruang balai *buntar* berukuran panjang 8,5 m dan lebar 7,6 m memiliki tiang pondasi terbuat dari kayu ulin berukuran 10 cm x 20 cm berjumlah 48 tiang sebagai tiang penopang lantai dengan ketinggian 140 cm dari permukaan tanah. Tiang ulin ukuran 10 cm x 10 cm berjumlah sembilan buah digunakan sebagai penopang atap *balai buntar*.



Pada *balai bangsal* digunakan tiang ulin penopang lantai setinggi 180 cm dari permukaan tanah berjumlah 58 tiang berukuran 10 cm x 20 cm. Terdapat 32 tiang berbentuk silinder terbuat dari kayu ulin utuh dengan diameter 30 cm merupakan penopang atap atas dan tiang berdiameter 20 cm berfungsi sebagai penopang atap bawah.



*Rumah bosar* merupakan bangunan yang berukuran paling luas memiliki tiang ulin berdiameter 40 cm berjumlah 30 tiang sebagai penopang atap. Tiang penopang lantai berukuran 20 cm x 15 cm dan 10 cm x 10 cm dengan jumlah 209 tiang.

Tiang *penopang balai burung* berjumlah 35 tiang ulin dengan 8 tiang utama penyangga atap bangunan. Tiang penopang *pedaporan* berjumlah 96 tiang ulin dan ruang *pelantaran* merupakan ruang terbuka tanpa atap memiliki tiang penopang lantai berjumlah 48 tiang.

#### 4.2 Tubuh Bangunan

Bagian dalam bangunan Astana Al Nursari dari arah depan yaitu *balai buntar* yang berfungsi sebagai ruang teras. Ruang ini merupakan ruang terbuka tanpa dinding yang memiliki atap. Luas *balai buntar* 64,6 m<sup>2</sup> dengan tinggi lantai dari permukaan tanah 140 cm. Untuk masuk ke dalam balai melalui sebuah tangga dai kayu ulin dengan tujuh anak tangga.



*Balai buntar* memiliki pagar keliling dari kayu dengan anak pagar terbuat dari logam yang diberi warna kuning. Tinggi anak pagar 0,8 m berjumlah 384 batang berbentuk silinder berdiameter 2 cm dengan hiasan di tengah dan di dekat ujung dan pangkal.

Ruang selanjutnya disebut *balai bangsal* yang berfungsi sebagai ruang pertemuan dengan ketinggian lantai 180 cm dari permukaan tanah. Pintu masuk *balai bangsal* adalah pintu masuk utama bangunan Astana Al Nursari berukuran 2

m x 2 m. Pintu menerapkan model dengan daun pintu ganda dan masih menggunakan sistem sumbu sebagai pengganti engsel. *Balai bangsal* memiliki panjang 19,6 m, lebar 11,6 m dan di bagian selatan terdapat dua buah ruang kecil (*bilik*) berukuran 3,2 m x 2,9 m yang saling berhadapan.

Ruang *balai bangsal* terkesan luas karena didalamnya tidak menggunakan perabotan. Tinggi plafon dari lantai mencapai 4,35 m. Di tengah ruangan terdapat tiang utama bangunan sekaligus penopang atap tingkat atas berdiameter 30 cm, berjumlah 12 tiang berderet dari utara ke selatan. Tiang penopang atap tingkat bawah dan kusen jendela sekaligus berfungsi menjadi rangka dinding untuk dinding dari papan ulin yang dipasang vertikal.

Sirkulasi udara dan pencahayaan dalam ruangan ditunjang dengan pemasangan jendela pada setiap dinding



dengan daun jendela ganda dan dilengkapi tralis kayu. Khusus pencahayaan ditunjang dengan jendela kaca statis (*skylight*) berjumlah empat buah pada atap.

Setelah *balai bangsal* terdapat *balai burung* yang berfungsi sebagai ruang penghubung antara *balai bangsal* dengan *rumah bosar*. *Balai burung* hanya memiliki dinding pada bagian utara dan selatan. Dinding pada bagian selatan dilengkapi dengan teras dan pintu ke arah halaman sekaligus akses pintu masuk bangunan Astana Al Nursari melalui sebelah selatan.

Rumah bosar merupakan ruang inti dari bangunan Astana Al Nursari dengan ukuran panjang 15,8 m, lebar 12,7 m dan tinggi atap dari lantai 11 m. Pada Rumah bosar terdapat kamar tidur pemilik Astana Al Nursari. Dinding menggunakan kayu ulin yang dipasang vertikal. Terdapat 14 tiang utama dari kayu ulin dengan diameter 40 cm setinggi 6,5 m dari permukaan tanah yang berfungsi sebagai penopang rangka atap bagian atas. Tiang penopang rangka atap bawah dengan diameter 40 cm dan tinggi 3,3 m berjumlah 14 tiang difungsikan juga sebagai rangka dinding.

Ruang padaporan dengan ukuran panjang 14 m dan lebar 9,6 m serta tinggi atap dari lantai 8 m. Sesuai dengan fungsinya sebagai dapur maka terdapat tempat untuk memasak di bagian selatan ruang padaporan yang sampai saat ini masih digunakan untuk meletakkan alat masak dan alat-alat dapur. Pengaturan pencahayaan dan sirkulasi udara didukung satu buah jendela besar, satu buah pintu berdaun ganda di sebelah barat menuju ke ruang pelantaran.

Khusus tempat masak berukuran panjang 9,6 m dan lebar 4 m ditandai dengan lantai yang lebih rendah 30 cm dari lantai padaporan lainnya. Pada bagian dindingnya dibuatkan jendela berukuran panjang 8 m dan lebar 0,8 m diberi teralis kayu. Jendela tersebut tidak menggunakan daun jendela sehingga sirkulasi udara dan cahaya cukup baik.

Ruang paling belakang Astana Al Nursari adalah ruang pelantaran yang merupakan ruang terbuka tanpa atap berukuran panjang 15 m dan lebar 5 m. pelantaran berfungsi sebagai akses masuk dari belakang bangunan astana. Fungsi lainnya adalah tempat melakukan aktivitas mencuci dan pada bagian ujung sebelah utara pelantaran terdapat dua buah kamar mandi dan dua toilet.

#### **4.3 Atap**

Bangunan Astana Al Nursari memiliki empat atap terpisah sebagai atap setiap ruang, dan hanya ruang pelantaran yang tidak memiliki atap. Rangka atap terbuat dari kayu ulin dengan bahan penutup atap dari sirap kayu ulin. Setiap perbatasan atap terdapat saluran/talang air terbuat dari kayu ulin utuh dengan panjang antara 8 m sampai 10 m. Talang air tersebut dipasang memanjang dari arah utara ke selatan di ujung atap bawah dan melewati bagian dalam bangunan dengan cara ditopang oleh kayu ulin.

Atap balai buntar berbentuk tipe perisai ditopang oleh 8 tiang kayu ulin. Pada pemugaran tahun 2011 atap balai buntar dipugar dengan mengganti keseluruhan penutup atap dengan sirap ulin yang baru. Terdapat sebuah talang air di bagian barat balai buntar.

Balai bangsal menggunakan atap bertingkat kombinasi atap tipe pelana dengan atap tipe perisai pada bagian bawahnya. Terdapat empat jendela kaca statis pada plafon (*skylight*) yang berfungsi sebagai pencahayaan dalam ruang balai bangsal. Pada plafon juga terdapat sebuah bagian berukuran 1 m x 1 m berupa

gambar bunga dengan warna cat yang sangat kontras dengan plafon baru yang tidak dicat. Gambar bunga tersebut merupakan warna dan corak plafon asli sebelum dipugar.

Ruang balai burung memiliki atap berukuran paling kecil bertipe pelana menggunakan penutup atap dari bahan sirap ulin. Pada ruang ini terdapat dua buah talang air berukuran panjang 8 m yang berfungsi mengalirkan air hujan dari atap balai bangsal, atap balai burung dan atap rumah bosar sekaligus sebagai tanda batas antar ruang.



Atap rumah bosar berbentuk tipe pelana dua tingkat dengan sudut kemiringan berbeda dan pada puncak atap dipasang hiasan mahkota di ujung sebelah utara dan selatan. Atap rumah bosar memiliki ukuran yang paling besar dan paling tinggi diantara atap ruang yang lain. Atap rumah bosar tidak menggunakan plafon sehingga dapat dilihat rangka atap masih dalam kondisi baik.

Bentuk atap pedaporan serupa dengan atap rumah bosar menggunakan tipe pelana, hanya saja atap pedaporan berukuran lebih kecil, tidak bertingkat dan tidak memiliki hiasan. Sama halnya dengan atap ruang lainnya, atap pedaporan menggunakan penutup atap dari sirap ulin.

## 5. Pelestarian Bangunan Astana Al Nursari

Kondisi bangunan Astana Al Nursari saat ini dalam kondisi baik. Ini dikarenakan pemerintah telah melakukan pemugaran Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- Tahun anggaran 1982/1983 – 1985/1986 dipugar dengan memperbaiki *balai buntar*, *pedaporan* dan *balai bangsal*.
- Tahun anggaran 1992/1993 – 1993/1994 dilakukan pemugaran pada bangunan *balai burung* dan *rumah bosar* meliputi perbaikan bagian tiang pondasi bangunan, rangka lantai dan dinding, serta rangka atap.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah melakukan pemugaran yang dilaksanakan pada :
- Tahun anggaran 2008 dilakukan pemugaran dinding tengah *rumah bosar*.
- Tahun anggaran 2009 dilakukan pemugaran berupa perbaikan tangga bangunan Astana Al Nursari terdiri dari tangga *balai buntar*, tangga *balai burung* dan tangga *pelantaran*.

Pada tahun 2011 dilakukan pemugaran Astana Al Nursari oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Tengah berupa perbaikan *balai buntar* dan *balai bangsal*.

Meskipun telah dilakukan pemugaran tetapi ada beberapa hal yang masih kurang terjaga seperti kebersihan meliputi halaman luar dan dalam, bangunan bagian dalam. Pelapukan pada bagian dinding dan atap bangunan, banyaknya tumbuhan liar yang tumbuh subur di sekitar bangunan. Kerusakan pada bagian lapisan cat plafon yang mulai terkelupas. Tiang penyangga bangunan dan rangka dinding ada beberapa yang pecah serta ditumbuhi jamur.



Kondisi dalam ruangan *rumah bosar* kurang terjaga kebersihannya dengan adanya beberapa lemari pajang, bongkaran tempat tidur, dan barang lainnya yang tidak tertata dan berdebu serta kurangnya pencahayaan yang masuk menjadikan *rumah bosar* tidak terawat. Di bawah ruang *pelantaran* banyak menggantung air limbah cucian dan kamar mandi yang langsung ke tanah.

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi bangunan dan lingkungan Astana Al Nursari, maka perlu dilakukan tindakan konservasi secara tradisional yakni dengan melakukan pembersihan pada bangunan menggunakan sapu, sikat maupun alat kebersihan lainnya. Pembersihan ini mencakup seluruh halaman Astana serta bangunan bagian dalam. Kondisi halaman yang cukup luas tanpa ditumbuhi banyak pohon juga turut mengurangi keindahan Astana. Maka sebaiknya melakukan penataan halaman yang diawali dengan penanaman rumput gajah, menambah penanaman pohon serta merawat pohon yang telah ada sebelumnya. Pembuatan sistem drainase terkait dengan perbaikan pada kamar mandi dan tempat aktifitas mencuci juga penting agar menghindari pelapukan.

Penyediaan sarana berupa papan nama dan papan larangan serta petunjuk arah diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk menunjang kelestarian astana. Alat kebersihan dan tempat sampah juga diperlukan mengingat luasnya area Astana Al Nursari dan adanya halaman luar yang digunakan beraktifitas oleh masyarakat sekitar.

Astana Al Nursari memiliki potensi sebagai obyek studi menarik bagi peminat sejarah, seni, budaya dan sekaligus sebagai obyek wisata yang masih dapat dikembangkan. Pada tahun 2011 jumlah pengunjung Astana

Al Nursari 878 orang termasuk diantaranya 73 pengunjung/wisatawan mancanegara. Di sekitar astana terdapat Masjid Kyai Gede yang juga memiliki keunikan dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pengembangan pada masa selanjutnya diharapkan Astana Al Nursari dapat menjadi museum dan pusat informasi sejarah Kerajaan Kotawaringin, mengingat masih ada benda koleksi yang dapat dipamerkan pada ruang *balai bangsal*. Pada *balai buntar* dapat dipasang etalase untuk menjual *souvenir* khas dari Kotawaringin bagi pengunjung. *Souvenir* yang dijual sebaiknya merupakan hasil kerajinan dari masyarakat sekitar agar dapat menumbuhkan rasa memiliki akan cagar budaya di Kotawaringin Lama.

Pembangunan sarana berupa dermaga yang baik perlu dilaksanakan karena untuk mencapai Kotawaringin Lama melalui Sungai Lamandau menggunakan *speedboat* menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai petualang. Ada kalanya diusahakan mendapatkan pengunjung yang melewati jalan darat melewati jembatan Sungai Lamandau dari Pangkalan Bun menuju Sukamara atau sebaliknya dengan membuat publikasi berupa baliho di sekitar jembatan tersebut.

Publikasi Astana Al Nursari dapat dilakukan dengan menyertakannya dalam setiap publikasi obyek wisata di Kalimantan Tengah. Sebagai kegiatan untuk menunjang publikasi tersebut dilakukan kegiatan untuk menghidupkan kembali kesenian daerah Kotawaringin yang dipusatkan pada Astana Al Nursari diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya Astana Al Nursari dan berkembang menjadi kawasan Cagar Budaya Kotawaringin Lama.

## **6. Kesimpulan**

Kotawaringin Barat yang dulunya berupa kerajaan banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah berupa bangunan maupun benda-benda bergerak. Salah satu tinggalannya adalah kawasan Cagar Budaya Kotawaringin Lama dengan komponen cagar budaya adalah bangunan Astana Al Nursari, Masjid Jami Kotawaringin “Kyai Gede” dan Kompleks Makam Kuta Tanah. Astana Al Nursari sebagai salah satu komponen kawasan cagar budaya Koawaringin pernah dipugar sebanyak tiga kali, walaupun demikian kondisi bangunan cukup memprihatinkan. Ini terlihat dari segi kebersihan serta pelapukan yang menyebabkan retak dan pecah pada bagian atap dan dinding bangunan.

Pelestarian yang dilakukan meliputi konservasi tradisional seperti pembersihan secara manual meliputi halaman, bagian dalam bangunan. Penataan taman juga diperlukan untuk lebih memperbaiki kondisi bangunan Astana Al Nursari. Perlu dilakukan kajian pelestarian secara menyeluruh untuk menyusun Rencana Induk Pelestarian yang meliputi konservasi, pemugaran serta penataan taman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya*. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Purbakala Makassar wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- ..... 2007. *Sejarah Singkat Kalimantan Tengah*. Kalimantanforchrist.blogspot.com/2007/09/sejarah-singkat-kalimantan-engah.html (07/05/2012).
- ..... TT. Kabupaten Kotawaringin Barat. Wikimedia Indonesia. Id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\_kotawaringin\_barat (09/05/2012).
- ..... TT. Kerajaan Kotawaringin. Wikimedia Indonesia. Id.wikipedia.org/wiki/kerajaan\_kotawaringin (09/05/2012).
- ..... 1997. Naskah Studi Kelayakan Bekas Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi. Bagian Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah Dan Kepurbakalaan Propinsi Kalimantan Tengah. Jakarta
- Fernado, Bayu, Cahyoadi, dkk. 2011. Pemantauan Kinerja Pelihara Dan Evaluasi Pemeliharaan Cagar Budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. *Laporan*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. Samarinda.
- Fernado, Bayu Cahyoadi, dkk. 2012. Pemugaran Astana Al Nursari di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Laporan*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. Samarinda.
- Reawaru, Stevanus, dkk. 2010. Dokumentasi Makam Raja-raja Kotawaringin, Kalimantan Tengah. *Laporan*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. Samarinda.
- Tanudirdjo, Daud, Aris. 2004. Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya. *Makalah*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.